

**BUKU DIKTAT**

# **PERBANKAN SYARIAH I**

**Oleh**

**TRI INDA FADHILA RAHMA, M.E.I  
NIP. 19910129 201503 2 008**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA**

**2019**

# **PERBANKAN SYARIAH**

**Oleh**

**TRI INDA FADHILA RAHMA, M.E.I**  
**NIP. 19910129 201503 2 008**

**KONSULTAN:**

**DR. MUHAMMAD YAFIZ, MA**  
**NIP. 19760423 200312 1 002**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SUMATERA UTARA**

**2019**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat dan hidayah serta petunjuk-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan diktat yang berjudul Perbankan Syariah ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi Muhammad SAW, semoga syafaatnya kita peroleh di yaumul akhir kelak.

Penulisan diktat ini sebagai bahan perkuliahan yang menyajikan tentang Perbankan Syariah secara dasar dan umum untuk mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara. Penulis berharap diktat ini dapat bermanfaat dalam mengkaji ilmu tentang Perbankan Syariah.

Penulis sangat bersyukur karena telah menyelesaikan penulisan diktat ini. Disamping itu, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu saya selama pembuatan diktat ini berlangsung sehingga terealisasikanlah diktat ini. Penulis juga menyadari bahwa diktat ini mungkin masih jauh dari sempurna, maka untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun yang dapat membuat diktat ini menjadi lebih baik. Amin Ya Rabbal Alamin.

Wassalamu'alaikum, wr, wb

Medan, Januari 2019

Penulis

Tri Inda Fadhila Rahma, M.E.I  
NIP. 19910129 201503 2 008

## DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar</b>	<b>i</b>
<b>Daftar Isi</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I.           Pengertian Bank Syariah dan Perbedaannya dengan Bank Konvensional</b>	<b>1</b>
A.     Pengertian Bank	1
B.     Pengertian Bank Syariah	2
C.     Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional	5
Soal Diskusi	9
<b>BAB II.         Sejarah Perkembangan Bank Syariah</b>	<b>10</b>
A.     Sejarah Bank	10
B.     Sejarah Perbankan Di Indonesia	11
C.     Sejarah Perbankan Syariah	12
D.     Perbankan Syariah Modern	16
E.     Perkembangan Bank Syariah di Indonesia	16
Soal Diskusi	18
<b>BAB III.       Fungsi dan Peran Sosial Perbankan Syariah</b>	<b>19</b>
A.     Fungsi Bank Secara Umum	19
B.     Fungsi Perbankan Syariah	20
C.     Peran Sosial PerBank Syariah	25
Soal Diskusi	30
<b>BAB IV.       Peraturan Perbankan Syariah</b>	<b>17</b>
A.     Bentuk Hukum dan Pendirian Bank	31
B.     Sumber Hukum Perbankan Syariah	35
C.     Dasar Hukum Perbankan Syariah	36
D.     Tinjauan Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia	38
E.     Regulasi Peraturan Perbankan Syariah	40
Soal Diskusi	46

<b>BAB V.</b>	<b>Jenis-Jenis Perbankan</b>	47
	A. Jenis Bank Secara Umum	47
	B. Jenis-Jenis Bank Syariah	58
	C. Jenis kegiatan usaha Bank Syariah	62
<b>BAB VI.</b>	<b>Produk Penghimpunan Dana Perbankan Syariah</b>	64
	A. Tabungan ( <i>Saving Deposit</i> )	64
	1. Tabungan <i>Wadiah</i>	65
	2. Tabungan <i>Mudharabah</i>	69
	B. Giro ( <i>Demand Deposit</i> )	72
	1. Giro <i>Wadiah</i>	72
	2. Giro <i>Mudharabah</i>	74
	C. Deposito <i>Mudharabah</i>	75
	Soal Diskusi	77
<b>BAB VII.</b>	<b>Produk Penyaluran Dana Perbankan Syariah</b>	78
	A. Kredit	78
	1. Pengertian Kredit	78
	2. Unsur-Unsur Kredit	79
	3. Tujuan Dan Fungsi Kredit	79
	4. Jenis Kredit	81
	5. Prosedur Dalam Pemberian Kredit	82
	6. Kredit Bermasalh	84
	B. Pembiayaan	86
	1. Pengertian Pembiayaan	86
	2. Unsur-Unsur Pembiayaan	87
	C. Produk Penyaluran Dana Bank syariah	88
	1. <b>Pembiayaan Dengan Prinsip Jual Beli (<i>Ba'i</i>)</b>	<b>89</b>
	2. <b>Pembiayaan dengan Prinsip Sewa (<i>Ijarah</i>)</b>	<b>94</b>
	3. Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil ( <i>Syirkah</i> )	95
	Soal Diskusi	99

<b>BAB VIII.</b>	<b>Produk Jasa Perbankan Syariah</b>	100
A.	Pengertian Jasa Bank	100
B.	Jenis Pelayanan Jasa Bank	101
C.	Jenis Pelayanan Jasa Bank Dalam Syariah	110
	Soal Diskusi	117
<b>BAB IX.</b>	<b>Sumber dan Alokasi Dana Perbankan Syariah</b>	118
A.	Sumber-Sumber Dana Bank Syariah	118
B.	Alokasi Dana Bank Syariah	122
C.	Pembagian Keuntungan ( <i>Profit Distribution</i> )	125
	Soal Diskusi	126
<b>BAB X.</b>	<b>Kapita Selekt : Pengembangan Bank Syariah di Indonesia</b>	127
A.	Tantangan Perbankan Syariah	127
B.	Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia	129
C.	<i>Grand Strategy</i> Pengembangan Pasar Perbankan Syariah	130
	Soal Diskusi	132
<b>Daftar Pustaka</b>		133
<b>Daftar Istilah</b>		135
<b>Daftar Singkatan</b>		137

## **BAB I. PENGERTIAN PERBANKAN SYARIAH DAN PERBEDAANNYA DENGAN BANK KONVENSIONAL**

### **Tujuan Intruksional**

1. Menjelaskan pengertian bank
2. Menjelaskan pengertian bank syariah
3. Menjelaskan perbedaan bank syariah dengan bank konvensional

### **A. Pengertian Bank**

Bank berasal dari bahasa Italia yaitu *banca* yang berarti tempat penukaran uang. Secara umum pengertian bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan yang umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal dengan banknote.<sup>1</sup>

Pengertian bank menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dari pengertian bank menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Kegiatan pokok bank ialah menghimpun dan menyalurkan dana sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung. Bank dalam kegiatannya menghimpun dana dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Kemudian memberikan balas jasa berupa bunga. Kegiatan menyalurkan dana yakni berupa pemberian pinjaman kepada masyarakat. Sedangkan jasa-jasa perbankan lainnya diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan utama tersebut.

Usaha-usaha atau kegiatan perbankan yakni sebagai berikut:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu
2. Memberikan kredit
3. Menerbitkan surat pengakuan hutang

---

<sup>1</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, edisi kedua, 2007).

4. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya
5. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah
6. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya
7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga
8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga
9. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak
10. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek
11. Membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya
12. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat
13. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah
14. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **B. Pengertian Bank Syariah**

Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberi kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip Syariat Islam.<sup>2</sup>

Berdasarkan rumusan tersebut, Bank Syariah berarti Bank yang tata cara beroperasinya didasarkan pada tata cara bermuamalat secara Islam, yakni mengacu kepada ketentuan-ketentuan Alquran dan Al hadist. Muamalat adalah ketentuan-ketentuan yang

---

<sup>2</sup> M. Nadratuzzaman Hosen, *Perbankan Syariah*, (Jakarta, pkes Publishing, versi e-book, Agustus, 2008).



mengatur hubungan manusia dengan manusia, baik hubungan pribadi maupun antara perorangan dengan masyarakat. Muamalah ini meliputi bidang kegiatan jual-beli (*ba'i*), bunga (riba), piutang, gadai (*rahn*), memindahkan utang (*hawalah*), bagi untung dalam perdagangan (*qira'ah*), jaminan (*dhomah*), persekutuan (*syirkah*), persewaan dan perburuan (*ijarah*).<sup>3</sup>

Bank syariah memiliki sistem operasional yang berbeda dengan bank konvensional. Bank syariah memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabah, pembayaran dan penarikan bunga di larang dalam semua bentuk transaksi. Bank syariah tidak mengenal sistem bunga, baik bunga yang di peroleh dari nasabah yang meminjam uang atau bunga yang di bayar kepada penyimpan dana di bank syariah.<sup>4</sup>

Menurut Ismail, perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara yaitu menghimpun dan dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi dari pihak pemilik dana. Bank syariah sebagai lembaga intermediasi antar pihak investor yang menginvestasikan dananya di bank kemudian selanjutnya bank syariah yang menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan dana.<sup>5</sup>

Pengertian bank syariah menurut Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup lembaga, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam pelaksanaan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Dari beberapa pengertian bank syariah yang dikemukakan maka dapat disimpulkan bahwa bank syariah adalah badan usaha yang fungsinya sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan penyalur dana kepada masyarakat, yang sistem dan mekanisme kegiatan usahanya berdasarkan hukum Islam sebagaimana yang diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis.

---

<sup>3</sup> Warkum Suwito, *Asas-Asas Bank Islam Dan Lembaga-Lembaga Terkait (Bamui, Takaful Dan Pasar Modal Syariah) Di Indonesia* (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2004), h.5

<sup>4</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta : Kencana-Prenada Media Group 2011), h.31-32

<sup>5</sup> *Ibid*, h.32

Bank syariah berfungsi sebagai lembaga perantara keuangan, yang tugasnya yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana (*surplus unit*) pada satu sisi, dan sisi lain, bank syariah juga menyalurkan dana kepada masyarakat yang sedang membutuhkan dana (*deficit unit*).

Usaha-usaha yang dapat dilakukan oleh sebuah bank syariah dan tidak dapat dilakukan oleh bank konvensional menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 19 s.d 21 adalah:

1. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan atau bentuk lainnya, dan bentuk investasi berupa tabungan, deposito atau bentuk lainnya berdasarkan akad yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
2. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah, musyarakah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
3. Menyalurkan pembiayaan untuk transaksi jual-beli dengan berbagai akad yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
4. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad qardh atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
5. Menyalurkan pembiayaan penyewaan kepada nasabah berdasarkan akad ijarah dan/atau sewa beli yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
6. Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad hawalah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
7. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah.
8. Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia.
9. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga berdasarkan suatu akad yang sesuai dengan prinsip syariah.
10. Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan akad yang berdasarkan prinsip syariah.
11. Melakukan fungsi Wali Amanat berdasarkan akad wakalah.
12. Memberikan fasilitas letter of credit atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah.
13. Menyediakan tempat penyimpanan barang dan surat berharga, memindahkan uang, dan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial

sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.

14. Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan prinsip syariah.
15. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Umum Syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
16. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip berdasarkan prinsip syariah.
17. Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan prinsip syariah.
18. Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
19. Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek dan jangka panjang berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang.
20. Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan sarana elektronik.

Dalam perbankan syariah terdapat pihak terafiliasi adalah:

1. Komisaris, direksi atau kuasanya pejabat dan karyawan bank syariah.
2. Dewan pengawas syariah, akuntan public, penilai dan konsultan hukum.

### **C. Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional**

Bank konvensional dan bank syariah dalam beberapa hal memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, persyaratan umum pembiayaan, dan syarat-syarat umum untuk mendapat pembiayaan.

Bank konvensional memperoleh keuntungan berasal dari bunga sedangkan bank syariah dalam kegiatan atau usaha yang dijalankan yakni memperoleh keuntungan dari pembiayaan dengan prinsip bagi hasil diperoleh keuntungan sesuai dengan kesepakatan (nisbah bagi hasil) dengan masing-masing nasabah (*mudharib* atau mitra usaha), dari pembiayaan dengan prinsip jual beli diperoleh margin keuntungan, sedangkan dari pembiayaan dengan prinsip sewa diperoleh pendapatan sewa. Keseluruhan pendapatan dari

*pooling fund* ini kemudian dibagihasilkan antara bank dengan semua nasabah yang menitipkan, menabung, atau menginvestasikan uangnya sesuai dengan kesepakatan awal. Bagian nasabah atau hak pihak ketiga akan didistribusikan kepada nasabah, sedangkan bagian bank akan dimasukkan ke dalam laporan laba rugi sebagai pendapatan operasi utama. Sementara itu, pendapatan lain seperti dari *mudharabah muqayyadah* (investasi terikat) dan jasa keuangan dimasukkan ke dalam laporan laba rugi sebagai pendapatan operasi lainnya.<sup>6</sup>

Terdapat perbedaan pokok antara sistem bank konvensional dengan sistem bank syariah secara ringkas dapat dilihat dari empat aspek, yaitu sebagai berikut,

1. **Falsafah** : pada bank syariah tidak berdasarkan atas bunga, spekulasi dan ketidakjelasan, sedangkan pada bank konvensional berdasarkan atas bunga.
2. **Operasional** : pada bank syariah, dana masyarakat berupa titipan dan investasi baru akan mendapatkan hasil jika diusahakan terlebih dahulu, sedangkan pada bank konvensional, dana masyarakat berupa simpanan yang harus dibayar bunganya pada saat jatuh tempo. Pada sisi penyaluran, bank syariah menyalurkan dananya pada sektor usaha yang halal dan menguntungkan, sedangkan pada bank konvensional, aspek halal tidak menjadi pertimbangan utama.
3. **Sosial** : pada bank syariah, aspek sosial dinyatakan secara eksplisit dan tegas yang tertuang dalam visi dan misi perusahaan, sedangkan pada bank konvensional tidak tersirat secara tegas.
4. **Organisasi** : bank syariah harus memiliki DPS (Dewa Pengawas Syariah). Sementara itu bank konvensional tidak memiliki Dewan Pengawas Syariah.

Selain itu, perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah dapat dilihat dari empat aspek lain, yaitu sebagai berikut;

1. Akad dan Aspek Legalitas

Akad yang dilakukan dalam bank syariah memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Nasabah sering kali berani melanggar kesepakatan/perjanjian yang telah dilakukan bila hukum itu hanya berdasarkan hukum positif belaka, tetapi tidak demikian bila perjanjian tersebut memiliki pertanggungjawaban hingga *yaumul qiyamah* nanti. Setiap akad

---

<sup>6</sup> Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2015), h. 33

dalam perbankan syariah, baik dalam hal barang, pelaku transaksi, maupun ketentuan lainnya harus memenuhi ketentuan akad.

## 2. Lembaga Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian perbedaan atau perselisihan antara bank dan nasabah pada perbankan syariah berbeda dengan perbankan konvensional. Kedua belah pihak pada perbankan syariah tidak menyelesaikannya di pengadilan negeri, tetapi menyelesaikannya sesuai tata cara dan hukum materi syariah. Lembaga yang mengatur hukum materi dan atau berdasarkan prinsip syariah di Indonesia dikenal dengan nama Badan Arbitrase Muamalah Indonesia (BAMUI) yang didirikan secara bersama oleh Kejaksaan Agung RI dan Majelis Ulama Indonesia.

## 3. Struktur Organisasi

Bank syariah dapat memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional, misalnya dalam hal komisaris dan direksi, tetapi unsur yang dapat membedakan antara bank syariah dan bank konvensional adalah keharusan adanya DPS yang berfungsi mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah. DPS biasanya diletakkan pada posisi setingkat dewan komisaris pada setiap bank. Hal ini untuk menjamin efektivitas setiap opini yang diberikan oleh DPS. Oleh karena itu, biasanya penetapan anggota DPS dilakukan oleh rapat umum pemegang saham setelah para anggota DPS itu mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional (DSN).

## 4. Bisnis dan Usaha yang Dibiayai

Bisnis dan usaha yang dilakukan bank syariah tidak terlepas dari kriteria syariah. Hal tersebut menyebabkan bank syariah tidak akan mungkin membiayai usaha yang mengandung unsur-unsur yang diharamkan. Terdapat sejumlah batasan dalam hal pembiayaan. Tidak semua proyek atau objek pembiayaan dapat didanai melalui dana bank syariah, namun harus sesuai dengan kaidah-kaidah syariah.

## 5. Lingkungan dan Budaya Kerja

Bank syariah selayaknya memiliki lingkungan kerja yang sesuai dengan syariah syariah. Dalam hal etika, misalnya sifat *amanah* dan *shiddiq*, harus melandasi

setiap karyawan sehingga tercermin integritas eksekutif muslim yang baik. Selain itu, karyawan bank syariah harus profesional (*fathanah*) dan mampu melaksanakan tugas secara team-work di mana informasi merata di seluruh fungsional organisasi (*tabligh*). Dalam hal *reward* dan *punishment*, diperlukan prinsip keadilan yang sesuai dengan syariah.

Dari penjelasan di atas terlihat jelas esensi dan karakteristik bank syariah berbeda dengan bank konvensional. Perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional dapat dirangkum sebagai berikut:<sup>7</sup>

	Bank Konvensional	Bank Syariah
Fungsi dan Kegiatan Bank	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Intermediasi</li> <li>- Jasa Keuangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Intermediasi</li> <li>- Manajer Investasi</li> <li>- Investor</li> <li>- Sosial</li> <li>- Jasa Keuangan</li> </ul>
Mekanisme dan Objek Usaha	Bebas	Anti riba dan anti <i>maysir</i>
Prinsip Dasar Operasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bebas nilai (prinsip materialis)</li> <li>- Uang sebagai komoditi</li> <li>- Bunga</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak bebas nilai (prinsip syariah Islam)</li> <li>- Uang sebagai alat tukar dan bukan komoditi</li> <li>- Bagi hasil, jual beli, sewa</li> </ul>
Prioritas Pelayanan	Kepentingan pribadi	Kepentingan publik
Orientasi	Keuntungan ( <i>profit</i> )	Tujuan sosial-ekonomi Islam, keuntungan ( <i>profit-sharing</i> )
Bentuk	Bank komersial	Bank komersial, bank pembangunan, bank universal atau <i>multi-purpose</i>
Evaluasi Nasabah	Kepastian pengembalian	Lebih hati-hati karena

---

<sup>7</sup> *Ibid*

	pokok dan bunga ( <i>creditworthiness</i> dan <i>collateral</i> )	partisipasi dalam resiko
Hubungan Nasabah	Terbatas debitur-kreditur	Erat sebagai mitra usaha
Sumber Likuiditas Jangka Pendek	Pasar uang, Bank Sentral	Pasar Uang Syariah, Bank Sentral
Pinjaman yang diberikan	Komersial dan nonkomersial, berorientasi laba	Komersial dan nonkomersial, berorientasi laba dan nirlaba
Lembaga Penyelesaian Sengketa	Pengadilan, Arbitrase	Pengadilan, Badan Arbitrase Syariah Nasional
Resiko Usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Resiko bank tidak terkait langsung dengan debitur, resiko debitur tidak terkait langsung dengan bank</li> <li>- Kemungkinan terjadi <i>negative spread</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dihadapi bersama antara bank dan nasabah dengan prinsip keadilan dan kejujuran</li> <li>- Tidak mungkin terjadi <i>negative spread</i></li> </ul>
Struktur Organisasi Pengawas	Dewan Komisaris	Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Dewan Syariah Nasional
Investasi	Halan atau haram	Halal
Lingkungan dan Budaya Kerja	Non- Islami	Islami

### Soal Diskusi

1. Jelaskan pengertian bank?
2. Jelaskan pengertian bank syariah?
3. Jelaskan perbedaan bank syariah dengan bank konvensional?

## **BAB II. SEJARAH PERKEMBANGAN BANK SYARIAH**

### **Tujuan Intruksional:**

1. Menjelaskan tentang sejarah bank
2. Menjelaskan tentang sejarah perbankan di Indonesia
3. Menjelaskan tentang sejarah perbankan syariah
4. Menjelaskan tentang perbankan syariah modern
5. Menjelaskan tentang perkembangan bank syariah di Indonesia

### **A. Sejarah Bank**

Sejarah mencatat asal mula dikenalnya kegiatan perbankan adalah pada zaman kerajaan tempo dulu di daratan Eropa. Kemudian usaha perbankan ini berkembang ke Asia Barat oleh para pedagang. Perkembangan perbankan di Asia, Afrika dan Amerika dibawa oleh bangsa Eropa pada saat melakukan penjajahan ke negara jajahannya baik di Asia, Afrika maupun benua Amerika.

Pada zaman Babilonia (kurang lebih tahun 2000 sebelum masehi) praktik perbankan didominasi dengan transaksi pinjaman emas dan perak. Bank yang melakukan praktik ini disebut Temples of Babylon. Kurang lebih 500 tahun sebelum masehi, praktik perbankan Yunani mulai berkembang yaitu menerima simpanan uang dari masyarakat dan menyalurkannya pada kalangan bisnis. Pada era ini mulai muncul bank-bank swasta. Pada zaman Romawi, praktik perbankan meliputi: praktik tukar menukar uang, menerima deposito, memberi kredit, dan melakukan transfer dana. Ini menunjukkan perkembangan praktik-praktik perbankan.<sup>8</sup>

Bila ditelusuri, sejarah dikenalnya perbankan dimulai dari jasa penukaran uang. Sehingga dalam sejarah perbankan, arti bank dikenal sebagai meja tempat penukaran uang. Dalam perjalanan sejarah kerajaan pada masa dahulu penukaran uangnya dilakukan antar kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lain. Kegiatan penukaran ini sekarang dikenal dengan nama Pedagang Valuta Asing (Money Changer). Kemudian dalam perkembangan selanjutnya, kegiatan operasional perbankan berkembang lagi menjadi tempat penitipan uang atau yang disebut sekarang ini kegiatan simpanan.

---

<sup>8</sup> I Gusti Ayu Purnawati, dkk, *Akuntansi Perbankan Teori dan Soal Latihan*. (Yogyakarta: GRAHA ILMU, 2014), hal. 6-7.



Seiring dengan perkembangan dunia, maka perkembangan perbankan pun semakin pesat. Hal ini disebabkan karena perkembangan dunia perbankan tidak terlepas dari perkembangan perdagangan. Perkembangan perdagangan yang semula hanya berkembang di daratan Eropa akhirnya menyebar ke Asia Barat. Bank-bank yang sudah terkenal pada saat itu di benua Eropa adalah Bank Venesia tahun 1171. Sebaliknya perkembangan perbankan di daratan Inggris baru dimulai pada abad ke-16.<sup>9</sup>

Perbankan modern dimulai pada abad ke-16 di Inggris, Belanda, dan Belgia. Pada saat itu tukang emas bersedia menerima logam (emas dan perak) untuk disimpan. Tanda bukti penyimpanan emas ini ditunjukkan dengan surat deposito yang disebut *goldsmith's note*. Era ini merupakan cikal bakal munculnya uang kertas. Pihak-pihak yang terlibat pada zaman ini adalah konsumen, produsen serta pedagang, raja-raja serta aparatnya serta organisasi gereja. Pada awal era perbankan modern, pengaturan kredit dibagi menjadi: pinjaman, penjualan, wesel, dan pinjaman laut. Pinjaman penjualan dikhususkan untuk membantu pembelian hasil-hasil panen dan membantu para produsen. Wesel (*bill of exchange*) digunakan untuk pengiriman uang ke luar negeri.

## **B. Sejarah Perbankan di Indonesia**

Perbankan di Indonesia berkembang sejak zaman Belanda. Lembaga bank kali pertama didirikan di Batavia pada tanggal 10 Oktober 1827 yang bernama De Javasche Bank. Tujuan didirikannya lembaga perbankan ini adalah untuk meningkatkan perekonomian orang-orang Belanda yang berada di Indonesia. Seiring perkembangan *De Javasche Bank*, bermunculan bank-bank yang dikelola oleh swasta, seperti bank *Escomto*, *Rotterdamsche Bank*, *Nederland Handelsbank*, dan *Internatio*. Bank-bank tersebut bertujuan untuk membantu membiayai kegiatan ekspor dan impor.

Pada tahun 1896, seorang penduduk pribumi yaitu patih dari Purwokerto yang bernama R. Aria Wirya Atmaja mendirikan bank yang diberi nama Bank Penolong dan Tabungan (*Hulp en Spaar Bank*). Tujuan didirikannya bank tersebut adalah untuk membantu para anggotanya agar terhindar dari para rentenir dan tengkulak yang sering memeras. Bank Penolong dan Tabungan ternyata berkembang sangat pesat. Akhirnya oleh pemerintah Belanda, Bank Penolong dikembangkan lagi dan diberi nama *Hulp Spaar en Hanbow Credit Bank* dan selanjutnya namanya diganti menjadi *Algemene Volks Credit*

---

<sup>9</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. (Jakarta: RAJA GRAFINDO, 2014), hal. 13-14.

*Bank*. Kemudian, namanya berubah lagi menjadi Bank Rakyat Indonesia. Begitu juga *De Javasche Bank*, setelah Indonesia merdeka namanya diganti menjadi Bank Indonesia (1951).

Di zaman kemerdekaan perbankan di Indonesia bertambah maju dan berkembang lagi. Beberapa bank Belanda dinasionalisir oleh pemerintah Indonesia. Bank-bank yang ada di zaman awal kemerdekaan, antara lain:<sup>10</sup>

1. Bank Negara Indonesia yang didirikan tanggal 5 Juli 1946 kemudian menjadi BNI 1946.
2. Bank Rakyat Indonesia yang didirikan tanggal 22 Februari 1946. Bank ini berasal dari DE ALGEMENE VOLKSCREDIET bank atau Syomin Ginko.
3. Bank Surakarta MAI (Maskapai Adil Makmur) tahun 1945 di Solo.
4. Bank Indonesia di Palembang tahun 1946.
5. Bank Dagang Nasional Indonesia tahun 1946 di Medan.
6. Indonesia Banking Corporation tahun 1946 di Yogyakarta, kemudian menjadi Bank Amerta.
7. NV Bank Sulawesi di Manado tahun 1946.
8. Bank Dagang Indonesia NV di Banjarmasin tahun 1949.

### **C. Sejarah Perbankan Syari'ah**

Pada awalnya pembentukan bank islam banyak diragukan karena beberapa alasan. *Pertama*, banyak orang yang beranggapan bahwa sistem perbankan bebas bunga (interest free) adalah suatu yang tidak mungkin dan tidak lazim. *Kedua*, keraguan tentang bagaimana bank islam akan membiayai operasionalnya<sup>11</sup>

Berikut adalah tahapan sejarah dan perkembangan bank syari'ah:

1. Tahapan di Zaman Nabi SAW dan Sahabat

Perbankan adalah satu lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang. Didalam sejarah perekonomian kaum muslimin, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak jaman Rasulullah SAW. Praktek-praktek seperti menerima titipan harta,

---

<sup>10</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, edisi kedua, 2007).

<sup>11</sup> Nur Yasin, *Hukum Ekonomi Islam* (Malang: UIN Malang Press, 2009), 131

meninjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang, telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah. Dengan demikian, fungsi-fungsi utama perbankan modern yaitu menerima deposit, menyalurkan dana, dan melakukan transfer telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam, bahkan sejak zaman Rasulullah.

Jelaslah bahwa ada individu-individu yang telah melaksanakan fungsi perbankan di zaman Rasulullah SAW, meskipun individu tersebut tidak melaksanakan seluruh fungsi perbankan. Ada sahabat yang melaksanakan fungsi menerima titipan harta, ada sahabat yang melaksanakan fungsi pinjam-meminjam uang, ada yang melaksanakan fungsi pengiriman uang, dan ada pula yang memberikan modal kerja. Biasanya satu orang hanya melakukan satu fungsi saja.

## 2. Tahapan di Zaman Bani Umayyah dan Bani Abasiyah

Jelas saja institusi bank tidak dikenal dalam kosa kata fikih Islam, karena memang institusi ini tidak dikenal oleh masyarakat Islam di masa Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, maupun Bani Abbasiyah. Di jaman Rasulullah saw fungsi-fungsi tersebut dilakukan oleh perorangan, dan biasanya satu orang hanya melakukan satu fungsi saja. Baru kemudian, di jaman Bani Abbasiyah, ketiga fungsi perbankan dilakukan oleh satu individu.

Perbankan mulai berkembang pesat ketika beredar banyak jenis mata uang pada zaman itu sehingga perlu keahlian khusus untuk membedakan antara satu mata uang dengan mata uang lainnya. Ini diperlukan karena setiap mata uang mempunyai kandungan logam mulia yang berlainan sehingga mempunyai nilai yang berbeda pula. Orang yang mempunyai keahlian khusus ini disebut naqid, sarraf, dan jihbiz. Hal ini merupakan cikal-bakal praktek penukaran mata uang (money changer). Istilah jihbiz mulai dikenal sejak zaman Muawiyah (661-680M) yang sebenarnya dipinjam dari bahasa Persia, kahbad atau kihbud. Pada masa pemerintahan Sasanid, istilah ini dipergunakan untuk orang yang ditugaskan mengumpulkan pajak tanah.

Peranan banker pada zaman Abbasiyah mulai populer pada pemerintahan Muqtadir (908-932M). Saat itu, hampir setiap wazir mempunyai bankir sendiri.

Misalnya, Ibnu Furat menunjuk Harun ibnu Imran dan Joseph ibnu wahab sebagai bankirnya. Lalu Ibnu Abi Isa menunjuk Ali ibn Isa, Hamid ibnuWahab menunjuk Ibrahim ibn Yuhana, bahkan Abdullah al-Baridi mempunyai tiga orang banker sekaligus: dua Yahudi dan satu Kristen. Kemajuan praktek perbankan pada zaman itu ditandai dengan beredarnya saq (cek) dengan luas sebagai media pembayaran. Bahkan, peranan bankir telah meliputi tiga aspek, yakni menerima deposit, menyalurkannya, dan mentransfer uang. Dalam hal yang terakhir ini, uang dapat ditransfer dari satu negeri ke negeri lainnya tanpa perlu memindahkan fisik uang tersebut. Para money changer yang telah mendirikan kantor-kantor di banyak negeri telah memulai penggunaan cek sebagai media transfer uang dan kegiatan pembayaran lainnya.

Dalam sejarah perbankan Islam, adalah Sayf al-Dawlah al-Hamdani yang tercatat sebagai orang pertama yang menerbitkan cek untuk keperluan kliring antara Baghdad (Irak) dan Aleppo (Spanyol sekarang).<sup>12</sup>

### 3. Tahapan di Masa Eropa

Dalam perkembangan selanjutnya, kegiatan yang dilakukan oleh perorangan jihbiz kemudian dilakukan oleh institusi yang saat ini dikenal sebagai institusi bank. Ketika bangsa Eropa mulai menjalankan praktek perbankan, persoalan mulai timbul karena transaksi yang dilakukan menggunakan instrumen bunga yang dalam pandangan fikih adalah riba, dan oleh karenanya haram. Transaksi berbasis bunga ini semakin merebak ketika Raja Henry VIII pada tahun 1545, membolehkan bunga (interest) meskipun tetap mengharamkan riba (usury) dengan syarat bunganya tidak boleh berlipat ganda (excessive). Ketika Raja Henry VIII wafat, ia digantikan oleh Raja Edward VI yang membatalkan kebolehan bunga uang, ini tidak berlangsung lama. Ketika wafat, ia digantikan oleh Ratu Elizabeth I yang kembali membolehkan bunga uang.

Selanjutnya, bangsa Eropa mulai bangkit dari keterbelakangannya dan mengalami renaissance. Penjelajahan dan penjajahan mulai dilakukan ke seluruh penjuru dunia, sehingga kegiatan perekonomian dunia mulai didominasi oleh bangsa-bangsa Eropa. Pada saat yang sama, peradaban muslim mengalami

---

12 Iman hilman dkk, *perbankan syariah masa depan*, senayan abadi, jakarta 2003

kemerosotan dan negara-negara muslim satu per satu jatuh ke dalam cengkeraman penjajahan bangsa-bangsa Eropa. Akibatnya, institusi-institusi perekonomian umat muslim runtuh dan digantikan oleh institusi ekonomi bangsa Eropa. Keadaan ini berlangsung terus sampai zaman modern ini. Karena itu, institusi perbankan yang ada sekarang di mayoritas negara-negara muslim merupakan warisan dari bangsa Eropa, yang notabennya berbasis bunga.

#### 4. Tahapan di Zaman Modern (Pasca Eropa)

##### a. Tahapan Pengembangan kerangka konseptual (1950-1975)

Pada periode ini banyak dilakukan seminar, diskusi dan kajian-kajian oleh para ekonom, bankir dan ahli hukum tentang permasalahan riba, moralitas ekonomi dan alternatif akad & praktek perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah.

##### b. Tahapan eksperimen (1975 – 1990)

Pada periode ini, muncul inisiatif terutama dari kalangan swasta untuk mempraktekkan konsep perbankan syariah, misalnya melalui pendirian : Dubai Islamic Bank dan Dar Al-Maal Al Islami di Emirat Arab (1975). Juga di Pakistan dan Iran dilaksanakan legalisasi sistem perbankan syariah secara nasional.

##### c. Tahapan penetrasi pasar & perluasan wilayah operasi (1990 – sekarang).

- 1) Keberhasilan dan stabilitas perkembangan bank-bank syariah telah menarik perhatian banyak pihak.
- 2) Sejumlah lembaga keuangan di negara-negara non muslim (misal: Inggris, Luxemburg & Swiss) juga mulai akomodatif terhadap kebutuhan masyarakat dan investor yang menginginkan untuk melaksanakan transaksi-transaksi keuangan secara syariah sepanjang memenuhi ketentuan dari otoritas keuangan setempat.
- 3) Penetrasi pasar melalui perluasan jangkauan perkembangan lembaga keuangan syariah secara internasional antara lain ditunjukkan dengan meluasnya lokasi usaha lembaga keuangan syariah yang mencapai 34 negara, serta meluasnya lembaga keuangan internasional besar yang berbasis dan dimiliki non muslim ke dalam bisnis jasa keuangan syariah

seperti Citybank, HSBC Bank, Standard Chartered Bank dan Chase Manhatta

#### **D. Perbankan Syariah Modern**

Usaha modern pertama untuk mendirikan bank tanpa bunga pertama kali dilakukan di Malaysia pada pertengahan tahu 1940-an, tetapi usaha tersebut tidak sukses. Eksperimen lain dilakukan di Pakistan pada akhir tahu 1950-an, di mana suatu lembaga perkreditan tanpa bunga didirikan di pedesaan Negara itu.

Pendirian bank syariah yang paling sukses dan inovatif di masa modern dilakukan di Mesir pada tahun 1963, dengan berdirinya Mit Ghamr Local Saving Bank. Di Mesir bank ini mendapat sambutan yang cukup hangat, terutama dari kalangan petani dan masyarakat pedesaan.

Kesuksesan Mit Ghamr ini memberikan inspirasi bagi umat Muslim di seluruh dunia, sehingga timbulah kesadaran bahwa prinsip-prinsip Islam ternyata masih dapat diaplikasikan dalam bisnis modern. Setelah berdirinya OKI dimana salah satu agendanya adalah mendirikan bank Islam, maka akhirnya pada bulan Oktober 1975 terbentuklah *Islamic Development Bank* (IDB) yang beranggotakan 22 negara Islam pendiri. Bank ini menyediakan bantuan finansial untuk pembangunan negara-negara anggotanya, membantu mendirikan bank Islam dinegaranya masing-masing, dan memainkan peran penting dalam penelitian ilmu ekonomi, perbankan dan keuangan Islam. Kini bank yang berpusat di Jeddah-Arab Saudi itu telah memiliki lebih dari 43 negara anggota.

Kini, perbankan syariah telah mengalami perkembangan yang cukup pesat dan menyebar ke banyak negara, bahkan ke negara-negara Barat. *The Islamic Bank International of Denmark* tercatat sebagai bank syariah pertama yang beroperasi di Eropa, yakni pada tahun 1983 di Denmark.

#### **E. Perkembangan Bank Syariah di Indonesia.**

Pendirian bank syariah diawali dengan berdiriya dua bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) di Bandung pada tahun 1991 yakni BPR Syariah Dana Mardhotillah dan BPR Syariah Berkah Amal Sejahtera serta PT BPRS Heraukat di Nanggroe Aceh Darussalam. Pendirian bank syariah di Indonesia diparkarai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui lokakarya “Bunga Bank dan Perbankan” di Cisarua, Bogor 18-20 Agustus

1990. Hasil ini dibahas dalam Munas IV MUI yang kemudian dibentuklah tim kerja untuk mendirikan bank syariah di Indonesia sehingga berdirilah PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991 dan beroperasi pada tahun 1992.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah menjadi tolak ukur keberhasilan eksistensi ekonomi syariah. Bank Muamalat sebagai bank syariah pertama dan menjadi pioneer bagi bank syariah lainnya telah lebih dahulu menerapkan sistem ini ditengah menjamurnya bank-bank konvensional. Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 telah menenggelamkan bank-bank konvensional dan banyak yang dilikuidasi karena kegagalan sistem bunganya. Sementara perbankan yang menerapkan sistem syariah dapat tetap eksis dan mampu bertahan.

Tidak hanya itu, di tengah-tengah krisis keuangan global yang melanda dunia pada penghujung akhir tahun 2008, lembaga keuangan syariah kembali membuktikan daya tahannya dari terpaan krisis. Lembaga-lembaga keuangan syariah tetap stabil dan memberikan keuntungan, kenyamanan serta keamanan bagi para pemegang sahamnya, pemegang surat berharga, peminjam dan para penyimpan dana di bank-bank syariah.

Hal ini dapat dibuktikan dari keberhasilan bank Muamalat melewati krisis yang terjadi pada tahun 1998 dengan menunjukkan kinerja yang semakin meningkat dan tidak menerima sepeser pun bantuan dari pemerintah dan pada krisis keuangan tahun 2008, bank Muamalat bahkan mampu memperoleh laba Rp. 300 miliar lebih. Perbankan syariah sebenarnya dapat menggunakan momentum ini untuk menunjukkan bahwa perbankan syariah benar-benar tahan dan kebal krisis dan mampu tumbuh dengan signifikan. Oleh karena itu perlu langkah-langkah strategis untuk merealisasikannya.

Langkah strategis pengembangan perbankan syariah yang telah di upayakan adalah pemberian izin kepada bank umum konvensional untuk membuka kantor cabang Unit Usaha Syariah (UUS) atau konversi sebuah bank konvensional menjadi bank syariah. Langkah strategis ini merupakan respon dan inisiatif dari perubahan Undang-Undang perbankan no. 10 tahun 1998. Undang-undang pengganti UU no.7 tahun 1992 tersebut mengatur dengan jelas landasan hukum dan jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Bank Indonesia. *Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2002-2011*. Jakarta : Bank Indonesia, 2002.

Perkembangan perbankan syariah selama satu tahun terakhir hingga tahun 2016 jumlah bank syariah di Indonesia dapat ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 1. Perkembangan Bank Syariah Tahun 2016**

<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah Bank</b>							
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Bank Umum Syariah (BUS)	6	11	11	11	11	12	13	14
Unit Usaha Syariah (UUS)	25	23	24	24	23	22	21	20
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	139	150	155	158	160	161	167	168

Sumber: [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id), Statistik Perbankan Syariah, tahun 2018

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa perkembangan jumlah Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) sampai dengan tahun 2018 telah mengalami perubahan, serta jumlah jaringan kantor meningkat. Sehingga pelayanan kebutuhan masyarakat akan perbankan syariah menjadi semakin meluas yang tercermin dari bertambahnya Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu (KCP) dan Kantor Kas (KK).

Perkembangan tentunya memberikan harapan yang positif bagi perkembangannya pada tahun 2018. Namun hal yang menonjol pada tahun ini adalah terjadinya perlambatan pertumbuhan yang signifikan akibat perlambatan pada sisi pengumpulan Dana Pihak Ketiga (DPK). Optimisme untuk tetap tumbuh masih terpelihara dalam industri perbankan syariah.

### **Soal Diskusi**

1. Jelaskan asal mula sejarah bank?
2. Jelaskan sejarah perbankan syariah?
3. Jelaskan perkembangan bank syariah di Indonesia?



## **BAB VII.**

### **FUNGSI DAN PERAN SOSIAL PERBANKAN SYARIAH**

#### **Tujuan Intruksional:**

1. Menjelaskan tentang fungsi perbankan secara umum
2. Menjelaskan tentang fungsi bank syariah
3. Menjelaskan tentang peran sosial bank syariah

#### **A. Fungsi Perbankan Secara Umum**

Pada dasarnya, fungsi sebuah bank adalah sebagai Lembaga perantara keuangan (financial intermediation). Dana yang ada di masyarakat (unit surplus) dihimpun untuk kemudian disalurkan kepada masyarakat (individu dan perusahaan) yang membutuhkan (unit deficit). Disini bank berperan sebagai Lembaga keuangan yang berfungsi menghubungkan pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (unit surplus) dengan pihak-pihak yang membutuhkan dana.

Fungsi mendasar dari bank umum adalah sejalan dengan pengertian bank, yaitu berperan sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat atau sector riil, atau dunia usaha yang memerlukan.

Adapun peran dan fungsi bank umum yang terdiri dari bank umum yang terdiri dari bank pemerintah, bank swasta nasional, dan bank asing atau campuran secara spesifik antara lain sebagai berikut:

##### *1. Penciptaan Uang*

Bank umum mempunyai fungsi penciptaan uang dalam hal ini uang giral, yaitu alat pembayaran melalui mekanisme pemindahbukuan. Kemampuan bank umum dalam menciptakan uang giral menyebabkan posisi dan fungsi bank umum menjadi sangat penting dalam pelaksanaan kebijakan moneter.

##### *2. Mendukung Kelancaran Mekanisme Pembayaran*

Bank umum berfungsi untuk mendukung kelancaran mekanisme pembayaran. Hal tersebut dimungkinkan karena salah satu jasa yang ditawarkan bank umum adalah jasa-jasa yang berkaitan dengan mekanisme pembayaran. Contohnya, penerimaan setoran, transfer uang, dan kliring.

### 3. *Penghimpun Dana Simpanan*

Fungsi bank umum adalah menghimpun dana masyarakat. Dana yang paling banyak disimpan oleh bank bank umum adalah dana simpanan. Di Indonesia, dana simpanan terdiri dari tabungan, giro, deposito berjangka, sertifikat deposito.

### 4. *Mendukung Kelancaran Transaksi Internasional*

Bank umum juga memiliki fungsi yang sangat dibutuhkan untuk memudahkan atau memperlancar transaksi internasional, baik transaksi barang atau jasa maupun transaksi modal. Kesulitan-kesulitan dalam transaksi antarnegara akibat berbagai kendala seperti perbedaan letak geografis, budaya, dan sistem moneter akan dapat diatasi melalui kehadiran bank umum, sehingga transaksi menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien.

### 5. *Penyimpanan Surat Berharga*

Bank umum dapat berfungsi sebagai Lembaga untuk menyimpan surat-surat berharga. Perkembangan ekonomi yang semakin pesat menyebabkan bank memperluas jasa pelayanan dengan menyimpan sekuritas atau surat-surat berharga.

### 6. *Pemberian Jasa-Jasa Lainnya.*

Bank umum dapat memberikan beragam jasa keuangan lain yang dapat mempermudah kegiatan ekonomi masyarakat umumnya. Kegiatan ekonomi masyarakat umumnya. Di Indonesia, pemberian jasa oleh bank umum antara lain penyediaan fasilitas pembayaran telepon, transfer uang lewat ATM, Anjungan Tunai Mandiri dan pembayaran gaji karyawan.<sup>14</sup>

## **B. Fungsi Perbankan Syariah**

Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank yang dalam aktivitasnya melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip Syariah dan melaksanakan kegiatan lalu lintas pembayaran. Bank umum Syariah dapat melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang Syariah. Bank umum Syariah disebut juga dengan full branch, karena tidak di bawah

---

<sup>14</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Surabaya:Kencana,2015), hal.39

koordinasi bank konvensional, akan tetapi aktivitas serta pelaporannya terpisah dengan induk banknya.

Bank umum Syariah memiliki akta pendirian yang terpisah dari induknya, bank konvensional, atau berdiri sendiri, bukan anak perusahaan bank konvensional. Sehingga setiap laporan yang diterbitkan oleh bank Syariah akan terpisah dengan induknya. Dengan demikian, dalam hal kewajiban memberikan pelaporan kepada pihak lain seperti BI, Dirjen Pajak, dan Lembaga lain, dilakukan secara terpisah.

Bank Syariah memiliki tiga fungsi utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi, menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dari bank, dan juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan Syariah.

#### *1. Penghimpun Dana Masyarakat*

Fungsi bank Syariah yang pertama yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Bank Syariah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad al-Wadiah dan dalam bentuk investasi dengan menggunakan akad al-Mudharabah. Al-Wadiah adalah akad antara pihak pertama (masyarakat) dengan pihak kedua (bank), dimana pihak pertama menitipkan dananya kepada bank, dan pihak kedua, bank menerima titipan untuk dapat dimanfaatkan titipan pihak pertama dalam transaksi yang diperbolehkan dalam islam. Al-mudharabah merupakan akad antara pihak yang memiliki dana kemudian menginvestasikan dananya atau disebut juga dengan shahibul maal dengan pihak kedua atau bank yang menerima dana yang disebut juga dengan mudharib, yang mana pihak mudharib dapat memanfaatkan dana yang diinvestasikan oleh shahibul maal untuk tujuan tertentu yang diperbolehkan dalam Syariah islam.

Masyarakat mempercayai bank Syariah sebagai tempat yang aman untuk melakukan investasi, dan menyimpan dana (uang). Masyarakat yang kelebihan dana membutuhkan keberadaan bank Syariah untuk menitipkan dananya atau menginvestasikan dananya dengan aman. Keamanan atas dana (uang) yang dititipkan atau diinvestasikan di bank oleh masyarakat merupakan factor yang sangat penting yang menjadi pertimbangan. Masyarakat akan merasa lebih aman apabila uangnya diinvestasikan di bank Syariah. Dengan menyimpan uangnya di

bank, nasabah juga akan mendapat keuntungan berupa/return atas uang yang diinvestasikan yang besarnya tergantung kebijakan masing-masing bank Syariah serta tergantung pada hasil yang diperoleh bank Syariah.

Return merupakan imbalan yang diperoleh nasabah atas jumlah dana yang diinvestasikan ke bank. Imbalan yang diberikan oleh bank bisa dalam bentuk bonus dalam hal dananya dititipkan dengan menggunakan akad Al-Wadi`ah, dan bagi hasil dalam hal dana yang diinvestasikan menggunakan akad Al-Mudharabah. Dalam menghimpun dana pihak ketiga, bank menawarkan produk titipan dan investasi antara lain; Giro Wadi`ah, tabungan Wadi`ah, tabungan Mudharabah, dan deposito Mudharabah, serta investasi Syariah lainnya yang diperkenankan sesuai sistem operasional bank Syariah.

## 2. *Penyaluran Dana Kepada Masyarakat*

Fungsi bank Syariah yang kedua yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Masyarakat dapat memperoleh pembiayaan dari bank Syariah asalkan dapat memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Menyalurkan dana merupakan aktifitas yang sangat penting bagi bank Syariah. Bank Syariah akan memperoleh return atas dana yang di salurkan. Return atau pendapatan yang di peroleh bank atas penyaluran dana ini tergantung pada akadnya.

Bank menyalurkan dana kepada masyarakat dengan menggunakan bermacam-macam akad, antara lain akad jual beli dan akad kemitraan atau kerja sama usaha. Dalam akad jual beli, maka return yang diperoleh bank atas penyaluran dananya adalah dalam bentuk margin keuntungan. Margin keuntungan merupakan selisih antara harga jual kepada nasabah dan harga beli bank. Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas penyaluran dana kepada nasabah yang merupakan akad kerja sama usaha adalah bagi hasil.

Kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat, disamping merupakan aktivitas yang dapat menghasilkan keuntungan berupa pendapatan margin keuntungan dan bagi hasil, juga untuk memanfaatkan dana yang idle (idle fund). Bank telah membayar sejumlah tertentu atas dana yang telah dihimpunnya. Pada akhir bulan atau pada saat tertentu bank akan mengeluarkan biaya atas dana yang

telah dihimpun dari masyarakat yang telah menginvestasikan dananya di bank. Bank tidak boleh membiarkan dana masyarakat mengendap. Dana nasabah investor harus segera disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan agar memperoleh pendapatan.

Pembiayaan bank Syariah dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.
- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bittamlik.
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, istishna.
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh.
- e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

### 3. *Pelayanan Jasa Bank*

Bank Syariah, disamping menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat, juga memberikan pelayanan jasa perbankan. Pelayanan jasa bank Syariah ini diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Pelayanan jasa kepada nasabah merupakan fungsi bank Syariah yang ketiga. Berbagai jenis produk pelayanan jasa yang dapat diberikan oleh bank Syariah antara lain jasa pengiriman uang (transfer), pemindahbukuan, penagihan surat berharga, kliring, letter of credit, inkaso, garansi bank, dan pelayanan jasa bank lainnya.

Aktivitas pelayanan jasa, merupakan aktivitas yang diharapkan oleh bank Syariah untuk dapat meningkatkan pendapatan bank yang berasal dari fee atas pelayanan jasa bank. Beberapa bank berusaha untuk meningkatkan teknologi informasi agar dapat memberikan pelayanan jasa yang memuaskan nasabah. Pelayanan yang dapat memuaskan nasabah ialah pelayanan jasa yang cepat dan akurat. Harapan nasabah dalam pelayanan jasa bank ialah kecepatan dan keakuratannya. Bank Syariah berlomba-lomba untuk berinovasi dalam meningkatkan kualitas produk layanan jasanya. Dengan pelayanan jasa, bank Syariah mendapat imbalan berupa fee yang disebut *fee based income*.

Apabila selama ini dikenal fungsi bank konvensional adalah sebagai intermediary (penghubung) antara pihak yang kelebihan dana dan yang membutuhkan dana selain menjalankan fungsi jasa keuangan, maka dalam bank syariah mempunyai fungsi yang berbeda dengan bank konvensional. Fungsi bank syariah yaitu manajer investasi, Investor, Jasa keuangan dan sosial. Fungsi-fungsi ini dapat diuraikan menjadi berikut:<sup>15</sup>

1. Manajer investasi

Salah satu fungsi bank syariah yang sangat penting adalah sebagai manajer investasi, maksudnya adalah bahwa bank syariah tersebut merupakan manajer investasi dari pemilik dana yang dihimpun sangat tergantung pada keahlian, kehati-hatian, dan profesionalisme dari bank syariah. Fungsi ini tidak banyak diketahui, dimengerti, dan dipahami oleh para bankir yang bekerja di bank syaria (bukan Bankir syariah), yang kebanyakan masih mempergunakan paradigma pola kerja bank konvensional. Penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah yang diharapkan mendapatkan hasil, mempunyai implikasi langsung kepada pemilik dana. Jika investasi yang dilakukan bank syariah mengalami pembayaran yang tidak lancar bahkan sampai macet, dapat mengakibatkan pendapatan yang diperoleh kecil dan pendapatan yang diterima oleh pemilik dana yang dihimpun menjadi kecil pula. Besarnya dana atau investasi yang dilakukan oleh bank syariah bukanlah otomatis pendapatan bagi hasil besar yang diterima oleh pemilik dana yang dihimpun.

2. Investor

Bank-bank menginvestasikan dana yang disimpan pada bank tersebut (dana pemilik bank maupun dana rekening investasi) dengan jenis dan pola investasi yang sesuai dengan syariah. Investasi yang sesuai dengan syariah tersebut meliputi akad Murabahah, sewa-menyewa, musyarakah, akad Mudharabah, akad salam atau istisna, pembentukan perusahaan atau akuisisi pengendalian atau kepentingan lain dalam rangka mendirikan perusahaan, memperdagangkan produk, dan investasi atau memperdagangkan saham yang dapat diperjual belikan. Keuntungan dibagikan kepada pihak yang memberikan dana, setelah

---

<sup>15</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004)

bank menerima keuntungan Mudharibnya yang sudah disepakati sebelum pelaksanaan akad.

### 3. Jasa Keuangan

Dalam menjalankan fungsi ini, bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank non syariah, seperti misalnya memberikan pelayanan kliring, transfer, inkaso, pembayaran gaji dan sebagainya hanya saja yang sangat diperhatikan adalah prinsip-prinsip syariah yang tidak boleh dilanggar. Bank-bank islam juga menawarkan berbagai jasa-jasa keuangan lainnya untuk memperoleh imbalan atas dasar *agency contract* atau sewa. Contohnya meliputi *Letter of guarantee*, *wire transfer*, *letter of credit*, dll.

### 4. Fungsi sosial

Konsep perbankan islam mengharuskan bank-bank islam memberikan pelayanan sosial apakah melalui dana *Qard* (pinjaman kebajikan) atau Zakat dan dana sumbangan sesuai dengan prinsip-prinsip islam. Disamping itu, konsep perbankan islam juga mengharuskan bank-bank islam untuk memainkan peran penting di dalam pengembangan sumber daya manusianya dan memberikan kontribusi bagi kesejahteraan sosial.

## C. Peran Sosial Perbankan Syariah

Perhatian terhadap penetapan pembiayaan perbankan dan akses keuangan bagi masyarakat miskin melalui proses intermediasi social berkaitan juga dengan perbankan Syariah yang seharusnya memegang tanggung jawab lebih besar terhadap kesejahteraan social dan komitmen religious demi tercapainya tujuan ekonomi islam, termasuk juga keadilan social, distribusi pendapatan/kekayaan yang merata, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Penulis-penulis seperti El-Gamal<sup>16</sup>, Al-Harran, Akhtar, percaya terhadap potensi perbankan Syariah yang luar biasa untuk ikut serta dalam perannya sebagai intermediasi social dan melayani kebutuhan masyarakat miskin yang seringkali diabaikan oleh sector perbankan konvensional.

---

<sup>16</sup> M.A. El-Gamal, *Islamic Finance: Law, Economic and Practice*, (Cambridge:Cambridge University Press,2006)

Prinsip Syariah menekankan bahwa para pelaku ekonomi untuk selalu menjunjung etika dan moral hukum dalam kegiatan ekonomi. Realisasi dari konsep Syariah, pada dasarnya sistem ekonomi/perbankan Syariah memiliki tiga ciri yang mendasar yaitu prinsip keadilan, menghindarkan kegiatan yang dilarang dan memperhatikan aspek kemanfaatan.<sup>17</sup>

Ketiga ciri sistem perbankan Syariah yang demikian, tidak hanya memfokuskan perhatian pada diri sendiri untuk menghindarkan praktek bunga, tetapi juga kebutuhan untuk menerapkan prinsip Syariah dalam sistem ekonomi secara seimbang.

Secara keseluruhan Perbankan Syariah tidak hanya memperhatikan pada perolehan keuntungan semata. Perbankan Syariah merupakan suatu sistem yang bertujuan memberikan kontribusi positif terhadap tercapainya tujuan social-ekonomi dari masyarakat muslim, sebagaimana telah terangkum dalam Maqasid Al-Syariah. Sebagai suatu etnis bisnis yang bernaftaskan Syariah, perbankan Syariah diharapkan dapat memenuhi tujuan ekonomi islam, yakni memastikan bahwa kekayaan dapat berputar secara adil dan merata tanpa menzalimi pihak-pihak yang benar-benar berhak mendapatkannya.<sup>18</sup>

Bank Syariah dalam menjalankan usahanya minimal mempunyai 5 prinsip operasional yang terdiri yaitu :

1. Sistem simpanan, prinsip simpanan murni merupakan fasilitas yang diberikan oleh bank Syariah untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang kelebihan dana untuk menyimpan dananya dalam bentuk Al-Wadi'ah. Fasilitas al wadi'ah bisa diberikan untuk tujuan keamanan dan pemindah bukuan dan bukan untuk tujuan investasi guna mendapatkan keuntungan seperti halnya tabungan dan deposito.
2. Bagi hasil, sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana.
3. Margin keuntungan, prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan oleh nasabah atau mengangkat nasabah sebagai agen bank dan nasabah dalam kapasitasnya sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual

---

<sup>17</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 20

<sup>18</sup> A.Ibn,Treastie on *Maqasid al-shariah* (alih Bahasa oleh El-Mesawi,M.E.T) (London:The International Institute of Islamic Thought,2006) hal.92.



barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan

4. Sewa, prinsip ini secara garis besar terbagi menjadi 2 jenis : (a) ijarah (b) Bai al takjiri
5. Fee, prinsip ini meliputi seluruh layanan non pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk produk berdasarkan sistem ini ialah al kafalah, al hawalah, al hawalah, al qardh. Ar rahn.

Sedangkan peranan bank syariah adalah sebagai berikut:<sup>19</sup>

1. Memurnikan operasional perbankan syariah sehingga dapat lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat.
2. Meningkatkan kesadaran syariah umat Islam sehingga dapat memperluas segmen dan pangsa pasar perbankan syariah.
3. Menjalin kerja sama dengan para ulama, karena bagaimanapun peran ulama khususnya di Indonesia sangat dominan bagi kehidupan umat Islam.

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga keuangan Bank dan Non Bank yang bersifat formal dan beroperasi di pedesaan, umumnya tidak dapat menjangkau lapisan masyarakat dari golongan ekonomi menengah ke bawah. Ketidakmampuan tersebut terutama dalam sisi penanggungan resiko dan biaya operasi, juga dalam identifikasi usaha dan pemantauan kredit yang layak usaha. Ketidakmampuan lembaga keuangan ini menjadi penyebab terjadinya kekosongan pada segmen pasar keuangan di wilayah pedesaan. Akibatnya 70% sampai 90% kekosongan ini diisi oleh lembaga keuangan non-formal, termasuk yang ikut beroperasi adalah para rentenir dengan mengenakan suku bunga yang tinggi. Untuk menanggulangi kejadian-kejadian seperti ini perlu adanya suatu lembaga yang mampu menjadi jalan tengah. Wujud nyatanya adalah dengan memperbanyak mengoperasionalkan lembaga keuangan berprinsip bagi hasil, yaitu Bank Umum Syariah, BPR Syariah dan *Baitul Mal wa Tamwil*.

Secara khusus peran bank syariah secara nyata dapat terwujud dalam aspek-aspek berikut:<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004) hal. 7

<sup>20</sup> *Ibid*, hal. 9

1. Menjadi peranan nasionalisme baru, artinya bank syariah menjadi fasilitator aktif bagi terbentuknya jaringan usaha ekonomi kerakyatan. Disamping itu bank syariah perlu mencontohkan keberhasilan tarekat dagang islam, kemudian ditarik keberhasilannya untuk masa kini.
2. Memberdayakan ekonomi umat dan beroperasi secara transparan. Artinya, pengelolaan bank syariah harus didasarkan pada visi ekonomi kerakyatan, dan upaya ini terwujudnya jika ada mekanisme operasi yang transparan.
3. Memberikan return yang lebih baik. Artinya, investasi di bank syariah tidak memberikan janji yang pasti mengenai return (keuntungan) yang diberikan kepada investor. Oleh karena itu, bank syariah harus mampu memberikan return yang lebih baik dibandingkan dengan bank konvensional. Disamping itu nasabah pembiayaan akan memberikan bagi hasil sesuai dengan keuntungan yang diperolehnya. Oleh karena itu pengusaha harus bersedia memberikan keuntungan yang tinggi kepada bank syariah.
4. Mendorong penurunan spekulasi dipasar keuangan. Artinya, bank syariah mendorong terjadinya transaksi produktif dari dana masyarakat. Dengan demikian, spekulasi dapat ditekan.
5. Mendorong pemerataan pendapatan. Artinya, bank syariah bukan hanya mengumpulkan dana pihak ketiga namun dapat mengumpulkan dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS). Dana ZIS dapat disalurkan melalui pembiayaan qardhul hasan, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi pada akhirnya terjadi pemerataan ekonomi.
6. Peningkatan efisiensi mobilitas dana. Artinya, adanya produk al-mudharabah, al-muqayyadah berarti terjadi kebebasan bank untuk melakukan investasi atas dana yang diserahkan oleh investor, maka bank syariah sebagai finansial arranger, bank memperoleh komisi atau bagi hasil bukan karena spread bunga.
7. *Uswah hasanah* implementasi moral dalam menyelenggarakan usaha bank. Salah satu sebab terjadinya krisis adalah adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Bank syariah karena sifatnya sebagai bank berdasarkan prinsip syariah wajib memposisikan diri sebagai *uswatun hasanah* dalam implementasi moral dan etika bisnis yang benar atau melaksanakan etika dan moral agama dalam aktivitas ekonomi.

Sebagaimana ditentukan dalam pasal 4 UU Perbankan Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi social dalam bentuk Lembaga Baitul maal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, hibah, atau dana social lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Bank Syariah dan UUS juga dapat menghimpun dana social yang besar dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf sesuai dengan kehendak pemberi wakaf. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa

- a. Bank Syariah berfungsi sebagai Lembaga Baitul maal
- b. Bank Syariah bisa menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana social lainnya yang diantaranya berasal dari pengenaan sanksi terhadap nasabah
- c. Bank Syariah dapat menghimpun dana social yang berasal dari wakaf uang.
- d. Bank Syariah menyalurkan dana social yang berasal dari wakaf uang kepada pengelola wakaf sesuai dengan kehendak pemberi wakaf.

Berlandaskan pada ketentuan pasal 4 ayat (4) UU Perbankan Syariah, yang menentukan bahwa pelaksanaan fungsi social sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fungsi social Bank Syariah ini terkait erat dengan pengelolaan zakat dan UU pengelola zakat.

Fungsi social lain bank Syariah ialah menerima wakaf uang. Wakaf berupa uang diatur secara khusus dalam pasal 28-31 UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf ketentuan mengenai wakaf uang adalah; (1) wakif dibolehkan mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan Syariah yang ditunjuk oleh menteri; (2) wakaf uang dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak wakif yang dilakukan secara tertulis; (3) wakaf diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang; (4) sertifikat wakaf uang diterbitkan dan disampaikan oleh Lembaga keuangan Syariah; (5) Lembaga keuangan Syariah atas nama Nazir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada Menteri selambat-lambatnya tujuh hari sejak diterbitkan sertifikat wakaf uang. Sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.<sup>21</sup>

Sebagai lembaga yang mempunyai fungsi sosial, bank syariah mempunyai beragam sumber dana dan penyaluran dana sosial. Salah satu realisasi fungsi sosial bank syariah, berkaca pada Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004, adalah sebagai lembaga yang

---

<sup>21</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

menerima dana sosial seperti Zis dan menyalurkannya atas nama bank atau lembaga amil zakat yang ditunjuk pemerintah. Zis sendiri adalah sumber dana sosial yang terbesar di bank syariah.

### **Soal Diskusi**

1. Jelaskan perbedaan antara fungsi bank konvensional dengan fungsi bank syariah secara umum?
2. Jelaskan peran bank syariah sebagai fungsi sosial?

## **BAB V. PERATURAN PERBANKAN SYARIAH**

### **Tujuan Intruksional:**

1. Menjelaskan bentuk hukum dan pendirian bank
2. Menjelaskan sumber hukum perbankan syariah
3. Menjelaskan dasar hukum perbankan syariah
4. Menjelaskan tinjauan hukum perbankan syariah di indonesia
5. Menjelaskan regulasi bagi bank syariah

### **A. Bentuk Hukum dan Pendirian Bank**

Pengaturan bentuk umum suatu Bank Umum menurut Undang – Undang Perbankan dapat berupa perseroan terbatas, koperasi atau perusahaan daerah. Sedangkan pengaturan bentuk hukum dari kantor perwakilan dan kantor cabang bank yang berkedudukan di luar negeri menurut Undang – Undang Perbankan adalah mengikuti bentuk umum kantor pusatnya.<sup>22</sup>

Bank dikatakan sebagai badan usaha mengandung arti bahwa bank harus memenuhi unsur badan usaha, yaitu melakukan kegiatan yang terus menerus, bertujuan mencari keuntungan, memenuhi aspek publisitas (terang – terangan), melakukan aktivitas tertentu, dan melakukan pembukuan. Berbeda dengan UU No. 10 Tahun 1998 yang tidak menetapkan pengertian Bank Konvensional dengan Bank Syariah, UU No. 21 Tahun 2008 memberikan pengertian tentang Bank Konvensional dengan Bank Syariah. Menurut Pasal 1 Ayat 4 UU No. 21 Tahun 2008, Bank Konvensional adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat. Menurut Pasal 1 Ayat 7 Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Pengaturan tentang syarat, jumlah, tugas, kewenangan, tanggung jawab, serta hal lain yang menyangkut Dewan Komisaris dan Direksi Bank Syariah, menurut pasal 28 Undang – Undang Perbankan Syariah telah dituangkan kedalam Anggaran Dasar Bank Syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. Pokok – pokok pengaturan tugas Direksi Bank Syariah dalam Anggaran Dasar, antara lain:

---

<sup>22</sup> Pasal 21 ayat (1) jo. Pasal 22 ayat (3) Undang – Undang Perbankan .

1. Tugas dan tanggung jawab
2. Pelaporan, dan
3. Perlindungan dalam pelaksanaan tugas

Dalam operasionalnya Perbankan syariah sebagai salah satu sistem perbankan nasional memerlukan berbagai sarana pendukung agar dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi pengembangan ekonomi nasional. Salah satu sarana pendukung vital adalah adanya pengaturan yang memadai dan sesuai dengan karakternya. Pengaturan tersebut diantaranya dituangkan dalam Undang – Undang Perbankan Syariah. Pembentukan Undang – Undang Perbankan Syariah menjadi kebutuhan dan keniscayaan bagi berkembangnya lembaga tersebut. Pengaturan mengenai perbankan syariah dalam UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998 belum spesifik dan kurang mengakomodasi karakteristik operasional perbankan syariah, dimana disisi lain pertumbuhan dan volume usaha bank syariah berkembang cukup pesat.

Dalam perkembangannya, pengaturan bentuk badan hukum bagi Bank Umum Syariah menurut Undang-Undang Perbankan Syariah adalah Perseroan Terbatas.<sup>23</sup> sebagai peraturan pelaksana dari ketentuan tersebut telah dimuat Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 yang menentukan bentuk badan Bank adalah Perseroan Terbatas. Yang dimaksud dengan “perseroan terbatas” di dalam penjelasan pasal tersebut adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.<sup>24</sup>

Persyaratan untuk memperoleh izin biasanya diikuti oleh berbagai syarat dan salah satu syaratnya adalah bentuk hukum bank yang akan didirikan. Ada beberapa bentuk hukum bank yang dapat dipilih jika ingin mendirikan bank. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 bentuk badan hukum Bank Umum dapat berupa salah satu dari alternatif dibawah ini:

1. Perseroan Terbatas (PT)
2. Koperasi, atau

---

<sup>23</sup> Pasal 7 Undang – Undang Perbankan Syariah.

<sup>24</sup> Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009.

### 3. Perseroan Daerah (PD)

Sedangkan bentuk badan hukum Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dapat berupa:

1. Perusahaan Daerah (PD)
2. Koperasi
3. Perseroan Terbatas (PT)
4. Atau bentuk lain yang ditetapkan oleh pemerintah

Dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 ini maka Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4434) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/35/PBI/2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4536) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dengan demikian pencabutan tersebut menyangkut perubahan bentuk hukum Bank Umum Syariah yang telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia sebelumnya.<sup>25</sup>

Bank Syariah di Indonesia dapat dibagi ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). BUS memiliki bentuk kelembagaan seperti bank umum konvensional, sedangkan BPRS memiliki bentuk kelembagaan seperti BPR konvensional. Badan hukum BUS dan BPRS dapat berbentuk Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah, atau Koperasi. Sementara itu, UUS bukan merupakan badan hukum tersendiri, tetapi merupakan unit atau bagian dari suatu bank umum konvensional.

Unit Usaha Syariah Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja di kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah dan atau unit syariah. Dalam struktur organisasi, UUS berada satu tingkat di bawah direksi bank umum konvensional yang bersangkutan. UUS dapat berusaha sebagai bank devisa atau bank nondevisa. Sebagai suatu unit kerja khusus, UUS mempunyai tugas untuk :

1. Mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan kantor cabang syariah,
2. Menyusun laporan keuangan konsolidasi dari seluruh kantor cabang syariah, dan
3. Melakukan tugas penatausahaan laporan keuangan kantor cabang syariah.

---

<sup>25</sup> Pasal 80 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009.

Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPRS merupakan badan usaha yang setara dengan bank perkreditan rakyat konvensional dengan bentuk hukum Perseroan Terbatas, Koperasi, Perusahaan Daerah, atau Bentuk lainnya yang ditetapkan pemerintah.<sup>26</sup>

Setiap perusahaan yang akan menjalankan usahanya di suatu negara atau suatu wilayah harusla terlebih dulu memperoleh izin dari pihak yang berwenang . Perolehan izin terkadang tidaklah mudah, karena biasanya suatu izin usaha yang dikeluarkan perlu memenuhi berbagai persyaratan. Izin suatu usaha perlu diberikan agar perusahaan yang hendak didirikan atau dijalankan nantinya tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan pemerintah.

Demikian pula hanya untuk melakukan pendirian suatu bank, juga perlu mendapat izin dari instansi yang terkait. Bagi perbankan di Indonesia sebelum melakukan kegiatannya harus memperoleh izin dari Bank Indonesia. Artinya jika ingin mendirikan bank atau pembukaan cabang baru maka diharuskan untuk memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditentukan Bank Indonesia. Bank Indonesia mempelajari permohonan tersebut untuk menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan.<sup>27</sup>

Bank Umum dapat didirikan dan menjalankan usahanya dengan izin Bank Indonesia selaku Bank Sentral. Pemberian izin untuk mendirikan Bank Umum dilakukan melalui 2 tahapan. *Pertama*, tahap persetujuan untuk melakukan persiapan Pendirian Bank yang bersangkutan. *Kedua*, berupa pemberian izin usaha yakni izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha setelah persiapan selesai dilakukan. Selama belum mendapat izin usaha, pihak yang mendapat persetujuan prinsip tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan usaha apapun di bidang perbankan.<sup>28</sup>

Penjelasan secara rinci untuk pendirian bank umum dijabarkan dalam SK Direksi BI No: 32/33/Kep/Dir, Tentang Bank Umum tanggal 12 Mei 1999 :

Dalam pasal 3 disebutkan :

1. Bank hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha dengan izin Direksi Bank Indonesia.

---

<sup>26</sup> Diana Yumanita, *Bank Syariah*, (Jakarta : Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia, 2005), hal.68-70.

<sup>27</sup> Budi Santoso, *Bank & Lembaga Keuangan Lain*, ( Jakarta: Salemba Empat,2002), hal.76.

<sup>28</sup> Agus Triyanta, *Hukum Perbankan Syariah*, (Malang : Setara Press,2016), hal.87.



2. Bank hanya dapat didirikan oleh:

- a. WNI dan/atau Badan Hukum Indonesia; atau
- b. WNI dan/atau Badan Hukum Indonesia dengan WNA dan/atau Badan Hukum Asing secara kemitraan.<sup>29</sup>

Disamping izin yang telah diajukan, maka permohonan dapat memilih bentuk badan hukum yang diinginkan dan yang telah ditentukan. Pemilihan bentuk badan hukum ini tergantung dari jenis bank yang dipilihnya apakah bank umum atau BPR. Masing-masing bentuk badan hukum mempunyai kelebihan dan kekurangannya.

## **B. Sumber Hukum Perbankan Syariah**

Bank-bank syariah memiliki dua jenis hukum, yaitu Hukum Syariah dan Hukum Positif. Yang dimaksud dengan hukum positif adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti bank syariah adalah lembaga keuangan maka, bank syariah juga harus tunduk pada **Undang-Undang no.7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998**. Dengan diundangkannya **Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah** yaitu undang-undang yang khusus berlaku bagi bank-bank syariah, maka bank syariah juga tunduk dan diatur oleh undang-undang tersebut.

Bank-bank syariah biasanya berbentuk perseroan terbatas, maka bank-bank syariah yang berbentuk perseroan terbatas itu tunduk pula pada **Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas**. Bagi suatu bank syariah berlaku pula **anggaran dasar** dari bank tersebut sebagaimana anggaran dasar itu dibuat oleh notaris pada waktu pendiriannya. Apabila bank syariah tersebut merupakan perseroan terbuka, yaitu perseroan yang telah terdaftar sahamnya dipasar modal, maka bank tersebut harus tunduk pula pada **Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang pasar modal dan berbagai peraturan BAPEPAM**.

Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, ditetapkan bahwa bank-bank syariah indonesia, yang terdiri atas bank yang sepenuhnya melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan bank Konvensional yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah melalui Unit Usaha Syariah yang dimilikinya, tidak boleh melakukan kegiatan usaha yang melanggar Prinsip Syariah.

---

<sup>29</sup> Marhaenis Abdul Hay, *Hukum Perbankan*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1997), hal.125-127.

Untuk memahami hukum islam sebagai sumber hukum bagi transaksi muamalah, dibawah ini dijelaskan hal-hal yang menyangkut berbagai sumber hukum Islam yang harus dipedomani oleh bank-bank syariah dalam melaksanakan kegiatan usahanya agar tidak melanggar Prinsip Syariah sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Perbankan Syariah. Pemahaman tersebut sangat penting oleh karena akad-akad muamalah yang dibuat oleh bank-bank syariah yang melanggar Prinsip Syariah Perbankan akan mengakibatkan akad-akad muamalah tersebut menjadi batal demi hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa untuk menentukan keabsahan suatu transaksi perbankan berdasarkan Prinsip Syariah (transaksi muamalah, tolak ukur untuk pengujiannya adalah terutama sumber-sumber hukum sebagai berikut :<sup>30</sup>

1. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998.
2. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
3. Ketentuan Perundang-undangan khususnya KUH perdata tentang Perikatan dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
4. Peraturan-peraturan Bank Indonesia tentang Perbankan Syariah.
5. Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Fatwa DSN-MUI) sebagaimana fatwa tersebut dikeluarkan berdasarkan *Al-Qur'an* dan *as-sunnah* sebagai sumber hukum Islam
6. Fatwa-fatwa berbagai mazhab tentang transaksi keuangan syariah sepanjang belum ditentukan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
7. Putusan-putusan pengadilan Agama Indonesia dan putusan-putusan Badan Syariah Nasional (BASYARNAS) Majelis Ulama Indonesia.
8. Berbagai pandangan/ doktrin dari para ilmuwan hukum mengenai aspek-aspek hukum berbagai produk finansial syariah.

### **C. Dasar Hukum Perbankan Syariah**

Bank syariah secara yuridis normatif atau yuridis empiris diakui keberadaanya di negara Republik Indonesia. Pengakuan secara yuridis normatif tercatat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, diantaranya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, Undang-Undang No. 10 Tahun tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7

---

<sup>30</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Islam Di Indonesia*, Bandung. Citra Aditya Bakti, 2002.

Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Selain itu, pengakuan secara yuridis empiris dapat dilihat perbankan syariah tumbuh dan berkembang pada umumnya diseluruh Ibukota provinsi dan Kabupaten di Indonesia, bahkan beberapa bank konvensional dan lembaga keuangan lainnya membuka unit usaha syariah (bank syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, dan semacamnya). Pengakuan secara yuridis dimaksud, memberi peluang tumbuhkan berkembangnya kegiatan usaha perbankan syariah, termasuk memberi kesempatan kepada bank umum (konvensional) untuk membuka kantor cabang yang khusus melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah.<sup>31</sup>

Bank Syariah dan Bank Muamalat serta bank konvensional yang membuka layanan syariah di Indonesia menjadikan pedoman Undang-Undang No. 7 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang No.3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Beberapa rumusan garis hukum adalah sebagai berikut :

- a) Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup tentang kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
- b) Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepadamasyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk lainnya dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
- c) Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.
- d) Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip

---

<sup>31</sup> Andri Soemitra. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta, Prenada, 2010

bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan dengan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau adanya pilihan pemindahan kepemilikan atau barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtima*).

Selain itu, perlu dikemukakan bahwa dalam Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, menjelaskan : (1) dapat memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah untuk jangka waktu paling lama 90 hari kepada Bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek Bank yang bersangkutan, dan (2) Pelaksanaan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat 1, wajib dijamin oleh Bank penerima dengan agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diterimanya.

#### **D. Tinjauan Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia**

Sebenarnya dunia perbankan di Indonesia sudah dikenal sejak zaman kolonial Belanda. Bahkan bank-bank yang ada pada saat itu pun sesungguhnya adalah bank-bank bekas peninggalan penjajah Belanda yang telah dinasionalisasi. Perbankan yang ada di awal-awal kemerdekaan sampai dengan adanya deregulasi perbankan pada tahun 1988 merupakan bank yang secara keseluruhan mendasar pengelolaannya pada prinsip bunga (*interest*). Seiring dengan banyaknya tuntutan masyarakat yang menghendaki suatu lembaga keuangan yang bebas dari bunga (*riba*), maka dibutuhkan rangkaian upaya secara yuridis dan kelembagaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut.

Eksistensi perbankan syariah di Indonesia lebih tegas terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang merupakan amandemen dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dalam ketentuan pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dengan demikian, secara tegas dapat dikatakan bahwa melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, eksistensi dari Perbankan Syariah di Indonesia

benar-benar telah diakui. Hal ini tampak dalam kata-kata bank berdasarkan pada prinsip syariah. Dalam pasal ayat (13) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dijelaskan bahwa prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.

Semula pengaturan mengenai produk-produk perbankan syariah didasarkan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Kemudian karena produk hukum berupa fatwa secara yuridis tidak mempunyai kekuatan mengikat secara umum (terbatas pada orang yang meminta fatwa), maka ada pendapat bahwa fatwa yang dibuat oleh DSN MUI hendaknya dijadikan sebagai hukum positif dengan jalan memasukkannya ke dalam peraturan perundang-undangan.<sup>32</sup>

Adapun Fatwa DSN MUI yang terkait dengan produk-produk perbankan syariah antara lain sebagai berikut :

1. Fatwa Nomor 01/DSN –MUI/IV/2000 tentang Giro.
2. Fatwa Nomor 02/DSN –MUI/IV/2000 tentang Tabungan.
3. Fatwa Nomor 04/DSN –MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*.
4. Fatwa Nomor 05/DSN –MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Salam*.
5. Fatwa Nomor 06/DSN –MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Istishna*.
6. Fatwa Nomor 07/DSN –MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah*.

Mengingat kewenangan pengaturan terhadap bank secara teknis ada pada Bank Indonesia, maka ketenyuan yang ada dalam Fatwa DSN tepat jika dimasukkan ke dalam Peraturan Bank Indonesia. Untuk itu, pada Tahun 2005 keluarlah PBI No. 7/46/PBI tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

Kemudian untuk mempersamakan cara pandang bagi setiap pelaku dalam industri perbankan syariah, termasuk pengelola bank/pemilik dana/pengguna dana, serta otoritas pengawas dirasa perlu menetapkan ketentuan tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dalam peraturan Bank Indonesia.

---

<sup>32</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, Jakarta, Kencana-Prenadamedia Group, 2014

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah juga mengatur mengenai penyelesaian sengketa ini. Pasal 55 undang-undang dimaksud menyebutkan bahwa: (1) penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama; (2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana pada ayat 1, penyelesaian sengketa dilakukan sesuai isi Akad (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak boleh bertentangan dengan prinsip Syariah. Penjelasan pasal 55 ayat (2) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad” adalah upaya melalui :<sup>33</sup>

- (a) Musyawarah
- (b) Mediasi Perbankan
- (c) Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) atau lembaga arbitrase lainnya
- (d) Melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Dengan demikian, aturan hukum yang mengikat dalam pelaksanaan kegiatan usaha perbankan syariah adalah hukum islam (syariah) sebagaimana yang tertuang dalam Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas. Di samping itu, juga dalam konteks kehidupan suatu negara, maka hukum positif juga menjadi landasan hukum bagi bank islam dalam operasional kegiatan usahanya.

## **E. Regulasi Peraturan Perbankan Syariah**

### **1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan.**

Pengaturan tentang perbankan di Indonesia sudah dimulai sejak zaman Belanda. Untuk menertibkan praktik lembaga pelepas uang yang banyak terjadi pada waktu itu, dikeluarkanlah peraturan, baik dalam bentuk undang-undang maupun berupa surat-surat keputusan resmi dari pihak pemerintah. Diantara lembaga keuangan yang telah berdiri sejak zaman penjajahan tersebut, yaitu *De Javashe Bank N.V*, tanggal 10 Oktober 1827 yang kemudian dikeluarkan undang-undang *De Javashe Bank Wet 1872*. Bank inilah yang kemudian menjadi Bank Indonesia, setelah melalui proses nasionalisasi pada tahun 1951, dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1951 yang mulai berlaku tanggal 6 Desember 1951.

---

<sup>33</sup> Andri Soemitra. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta, Prenada, 2010

Regulasi perbankan di Indonesia secara sistematis dimulai pada tahun 1967 dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan. Undang-undang ini mengatur secara komprehensif sistem perbankan yang berlaku pada masa itu. Dimana akan berhubungan dengan kedudukan perbankan syariah pada masa berlakunya Undang-Undang ini adalah adanya pengaturan mengenai pengertian “kredit” yang terdapat di dalamnya.

Dalam Undang-Undang ini disebutkan bahwa Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan lain pihak, dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang ditetapkan. Dari bunyi pasal di atas tampak pengertian, bahwa usaha perbankan yang ada pada masa itu (perbankan konvensional) operasionalnya menggunakan sistem kredit, tidak mungkin melaksanakan kredit tanpa mengambil bunga.

Hal ini dikarenakan konsep bunga melekat dalam pengertian kredit itu sendiri. Sehingga, tidak dimungkinkan perbankan syariah untuk didirikan, sebab kegiatan usaha bank pada masa itu harus menggunakan bunga. Bahkan perbankan pada masa itu ditentukan tingkat bunganya oleh pemerintah secara seragam, agar tidak terjadi penentuan bunga yang sewenang-wenang oleh masing-masing bank dan untuk menjaga stabilitas keuangan negara.

## **2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan**

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk didirikan pada 1 November 1991, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia, dan memulai kegiatan operasinya pada 1 Mei 1992. Dengan dukungan nyata dari eksponen Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha Muslim, pendirian Bank Muamalat juga menerima dukungan masyarakat, terbukti dari komitmen pembelian saham Perseroan senilai Rp. 84 miliar pada saat penandatanganan akta pendirian Perseroan. Selanjutnya, pada acara silaturahmi peringatan pendirian tersebut di Istana Bogor, diperoleh tambahan komitmen dari masyarakat Jawa Barat yang turut menanam modal senilai Rp. 106 miliar.

Pada awal pendirian Bank Muamalat Indonesia, keberadaan bank syariah ini belum mendapat perhatian yang optimal dalam tatanan industri perbankan nasional.

Landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem syariah ini hanya dikategorikan sebagai 'bank dengan sistem bagi hasil', tidak terdapat rincian landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan. Sistem bagi hasil dalam Undang-Undang ini hanya diuraikan sepintas lalu dan merupakan 'sisipan' belaka. Ketentuan bagi hasil tersebut diatur dalam Pasal 6 Huruf i, dimana disebutkan bahwa Bank Umum dapat menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. Kemudian dalam Pasal 13 huruf c, yang menyebutkan bahwa Bank Perkreditan Rakyat dapat menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

Ketentuan prinsip bagi hasil kemudian dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Peraturan Pemerintah ini memberi makna bank berdasarkan prinsip bagi hasil adalah Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang melakukan kegiatan usaha semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil. Selanjutnya dalam Pasal Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 disebutkan bahwa prinsip bagi hasil adalah prinsip bagi hasil berdasarkan Syari'at yang digunakan oleh bank berdasarkan prinsip bagi hasil dalam:

- a. menetapkan imbalan yang akan diberikan kepada masyarakat sehubungan dengan penggunaan/pemanfaatan dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya;
- b. menetapkan imbalan yang akan diterima sehubungan dengan penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan baik untuk keperluan investasi maupun modal kerja.
- c. menetapkan imbalan sehubungan dengan kegiatan usaha lainnya yang lazim dilakukan oleh bank dengan prinsip bagi hasil.

Pengertian prinsip bagi hasil dalam penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan, termasuk pula kegiatan usaha jual beli.



### **3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.**

Perkembangan perbankan Syariah sangat pesat dan menjanjikan prospek yang menguntungkan. Meskipun eksistensi bank Syariah di Indonesia secara formal telah dimulai sejak tahun 1992 dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Namun, harus diakui bahwa Undang-Undang tersebut memang belum memberikan landasan hukum yang cukup kuat terhadap pengembangan bank Syariah karena masih menggunakan istilah bank bagi hasil. Pengertian bank bagi hasil yang dimaksudkan dalam Undang-Undang tersebut belum sesuai dengan cakupan pengertian bank syariah yang relatif lebih luas dari bank bagi hasil. Dengan tidak adanya pasal-pasal dalam Undang-Undang tersebut yang mengatur bank Syariah, maka hingga tahun 1998 belum terdapat ketentuan operasional yang secara khusus mengatur kegiatan usaha bank Syariah.

Tahun 1998 lahirlah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Undang-Undang tersebut mengatur lebih rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan dimplementasikan. Undang-Undang tersebut memberi arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah. Walaupun Undang-Undang ini belum spesifik dan kurang mengakomodasi karakteristik operasional Perbankan Syariah, dimana, di sisi lain pertumbuhan dan volume usaha Bank Syariah berkembang cukup pesat.

Dalam penjelasan umumnya Undang-Undang ini menyebutkan bahwa peranan bank yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah perlu ditingkatkan untuk menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, Undang-undang ini memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mendirikan bank yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, termasuk pemberian kesempatan kepada Bank Umum untuk membuka kantor cabangnya yang khusus melakukan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah.

Ketentuan mengenai bank syariah diatur dalam Pasal 1, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 13, Pasal, Pasal 29 dan Pasal 37. Pada Pasal 6 huruf m, disebutkan bahwa Usaha Bank Umum adalah menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan

oleh Bank Indonesia. Kemudian dalam Pasal 13 huruf c, disebutkan bahwa Usaha Bank Perkreditan Rakyat adalah menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Kemudian pada tahun 1999 lahir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Undang-Undang ini juga menetapkan bahwa Bank Indonesia dapat melakukan pengendalian moneter berdasarkan prinsip-prinsip Syariah. Keberadaan kedua Undang-Undang tersebut telah mengamanatkan Bank Indonesia untuk menyiapkan perangkat ketentuan dan fasilitas penunjang lainnya yang mendukung operasional bank Syariah sehingga memberikan landasan hukum yang lebih kuat dan kesempatan yang lebih luas bagi pengembangan perbankan Syariah di Indonesia. Yaitu dengan dikeluarkannya sejumlah ketentuan operasional dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia. Kedua Undang-Undang tersebut selanjutnya menjadi dasar hukum bagi keberadaan dua sistem perbankan di Indonesia, yaitu adanya dua sistem perbankan (konvensional dan Syariah) secara berdampingan dalam memberikan pelayanan jasa perbankan bagi masyarakat.

Upaya pengembangan perbankan Syariah di Indonesia tidak semata hanya merupakan konsekuensi dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tetapi juga merupakan bagian dari upaya penyehatan sistem perbankan yang bertujuan meningkatkan daya tahan perekonomian nasional. Krisis ekonomi yang terjadi sejak pertengahan tahun 1997 membuktikan bahwa bank yang beroperasi dengan prinsip Syariah dapat bertahan ditengah gejolak nilai tukar dan tingkat suku bunga yang tinggi. Kenyataan tersebut ditopang oleh karakteristik operasi bank Syariah yang melarang bunga (riba), transaksi yang bersifat tidak transparan (gharar) dan spekulatif (maysir). Dengan kenyataan tersebut, pengembangan perbankan Syariah diharapkan dapat meningkatkan ketahanan sistem perbankan nasional yang sedemikian rupa dapat menciptakan perekonomian yang tangguh. Yaitu perekonomian yang pertumbuhan sektor keuangannya sejalan dengan pertumbuhan sektor riil.

#### **4. Undang undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah**

Dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 menyebutkan bahwa guna menjamin kepastian hukum bagi *stakeholders* dan sekaligus memberikan

keyakinan kepada masyarakat dalam menggunakan produk dan jasa Bank Syariah, dalam Undang-Undang Perbankan Syariah ini diatur jenis usaha, ketentuan pelaksanaan syariah, kelayakan usaha, penyaluran dana, dan larangan bagi Bank Syariah maupun Unit Usaha Syariah yang merupakan bagian dari Bank Umum Konvensional. Sementara itu, untuk memberikan keyakinan pada masyarakat yang masih meragukan kesyariahan operasional Perbankan Syariah selama ini, diatur pula kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah meliputi kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur-unsur riba, *maisir*, *gharar*, haram, dan zalim.

Sebagai undang-undang yang khusus mengatur perbankan syariah, dalam Undang-Undang ini diatur mengenai masalah kepatuhan syariah (*syariah compliance*) yang kewenangannya berada pada Majelis Ulama Indonesia yang direpresentasikan melalui Dewan Pengawas Syariah yang harus dibentuk pada masing-masing Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Untuk menindaklanjuti implementasi fatwa yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia ke dalam Peraturan Bank Indonesia, di dalam internal Bank Indonesia dibentuk komite perbankan syariah, yang keanggotaannya terdiri atas perwakilan dari Bank Indonesia, Departemen Agama, dan unsur masyarakat yang komposisinya berimbang. Setelah terbit Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan maka Fatwa Majelis Ulama Indonesia dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Undang undang Nomor 21 tahun 2008 memiliki beberapa ketentuan umum yang menarik untuk dicermati. Ketentuan umum sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 adalah merupakan sesuatu yang baru dan akan memberikan implikasi tertentu, meliputi:

- b. Istilah Bank Perkreditan Rakyat yang diubah menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Perubahan ini untuk lebih menegaskan adanya perbedaan antara kredit dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
- c. Definisi Prinsip Syariah. Dalam definisi dimaksud memiliki dua pesan penting yaitu (1) prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dan (2) penetapan pihak/lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa yang menjadi dasar prinsip syariah.
- d. Penetapan Dewan Pengawas Syariah sebagai pihak terafiliasi seperti halnya akuntan publik, konsultan dan penilai.

- e. Definisi pembiayaan yang berubah secara signifikan dibandingkan definisi yang ada dalam Undang-Undang sebelumnya tentang perbankan (Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998). Dalam definisi terbaru, pembiayaan dapat berupa transaksi bagi hasil, transaksi sewa menyewa, transaksi jual beli, transaksi pinjam meminjam dan transaksi sewa menyewa jasa (multijasa).

Kemudian Bank Syariah yang telah mendapatkan izin usaha setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ini, wajib mencantumkan dengan jelas kata "syariah" setelah kata "bank" atau nama bank . Sedangkan Unit Usaha Syariah yang telah mendapatkan izin usaha setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ini, wajib mencantumkan dengan jelas frase "Unit Usaha Syariah" setelah nama Bank pada kantor Unit Usaha Syariah yang bersangkutan. Selain mendirikan Bank Syariah atau UUS baru, pihak-pihak yang ingin melakukan kegiatan usaha perbankan syariah dapat melakukan pengubahan (konversi) bank konvensional menjadi Bank syariah. Pengubahan dari Bank Syariah menjadi bank konvensional merupakan hal yang dilarang dalam UU ini. Disamping itu, pendirian Bank Umum Syariah baru dapat dilakukan dengan cara pemisahan (*spin off*) Unit Usaha Syariah dari induknya yang dilakukan secara sukarela atau dilakukan dalam rangka memenuhi kewajiban.

### **Soal Diskusi**

1. Jelaskan bentuk hukum dan pendirian bank di Indonesia?
2. Jelaskan sumber hukum perbankan syariah?
3. Jelaskan dasar hukum perbankan syariah?
4. Jelaskan tinjauan hukum perbankan syariah di indonesia
5. Jelaskan regulasi bagi bank syariah

## **BAB VI. JENIS-JENIS PERBANKAN**

### **Tujuan Intruksional:**

1. Menjelaskan jenis-jenis bank secara umum
2. Menjelaskan jenis-jenis bank syariah
3. Menjelaskan jenis kegiatan usaha bank syariah

### **A. Jenis Bank Secara Umum**

Dalam praktiknya perbankan di Indonesia saat ini terdapat beberapa jenis perbankan seperti yang diatur dalam undang undang Perbankan. Jika kita melihat jenis perbankan sebelum keluar Undang Undang perbankan Nomor 10 tahun 1998 dengan sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 14 tahun 1967, maka dapat beberapa perbedaan. Namun, kegiatan utama atau pokok bank sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dan tidak berbeda satu sama lainnya.<sup>34</sup>

Perbedaan jenis perbankan dapat dilihat dari segi fungsi, serta kepemilikannya. Dari segi fungsi perbedaan yang terjadi terletak pada luasnya kegiatan atau jumlah produk yang dapat ditawarkan serta jangkauan wilayah operasinya. Sedangkan kepemilikan perusahaan dilihat dari segi kepemilikan sahamnya.

Perbedaan lainnya adalah dilihat dari segi siapa nasabah yang mereka layani apakah masyarakat luas atau masyarakat dalam atau lokasi tertentu (kecamatan). Jenis perbankan juga dibagi kedalam bagaimana caranya menentukan harga jual dan harga beli atau dengan kata lain caranya mencari keuntungan.

Adapun jenis perbankan jika ditinjau dari berbagai segi antara lain:<sup>35</sup>

#### **1. Dilihat dari segi fungsinya . Terdiri dari :**

- a. Bank Sentral
- b. Bank umum
- c. Bank pembangunan
- d. Bank tabungan
- e. Bank pasar
- f. Bank desa
- g. Lumbung desa

---

<sup>34</sup> Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hal 19

<sup>35</sup> *Ibid*, hal. 20

- h. Bank pegawai
- i. Bank lainnya

Namun, setelah keluar UU pokok perbankan No 7 tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan keluarnya UU RI No10 Tahun 1998 maka jenis perbankan berdasar fungsi terdiri dari:

- a. Bank sentral
- b. Bank umum
- c. Bank perkreditan rakyat(BPR)

Bentuk bank pembangunan dan bank tabungan yang semula berdiri sendiri dengan keluarnya UU diatas berubah fungsi menjadi bank Umum.sedangkan bank desa, bank pasar,lumbung desa dan bank pegawai menjadi bank perkreditan rakyat (BPR).<sup>36</sup>

#### **a. Bank Sentral**

Bank sentral yang dimaksud adalah Bank Indonesia. Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini.

Tujuan Bank Indonesia berdasarkan UU No.23 Th. 1999 tentang Bank Indonesia adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan rupiah. Kestabilan rupiah yang diinginkan adalah:

- 1) Kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa yang dapat diukur dengan atau tercermin dari perkembangan laju inflasi.
- 2) Kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang Negara lain.

Aspek pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi, sementara aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. dengan kestabilan nilai mata uang rupiah, maka akan sangat banyak manfaat yang akan diperoleh terutama untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Agar kestabilan nilai rupiah dapat tercapai dan terpelihara, maka bank Indonesia memiliki tugas lain:

- 1) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter
- 2) Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran

---

<sup>36</sup> *Ibid*

3) Mengatur dan mengawasi bank.<sup>37</sup>

Perumusan tujuan tunggal ini dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang harus dicapai Bank Indonesia serta batas-batas tanggung jawabnya. Dengan demikian, tercapai atau tidaknya tujuan Bank Indonesia ini kelak akan dapat diukur dengan mudah.

Dibawah ini adalah beberapa fungsi utama bank sentral adalah:

1) Agen fiskal pemerintah (Fiscal Agent of Government)

Bank sentral berfungsi memberikan nasehat dan bantuan untuk mengelola berbagai masalah/transaksi keuangan pemerintah, seperti menyimpan asset milik pemerintah.

2) Banyaknya Bank (Banker of Bank atau Lender of Last Resort)

Sebagai banknya bank, bank sentral memberi bantuan kepada bank-bank umum yang mengalami kesulitan likuiditas tetapi sulit mendapatkan dananya dari sumber dana lain.

3) Penentu dan Pelaksana Kebijakan Moneter (Monetary Policy Maker)

Sebagai penentu dan pelaksana kebijakan moneter, bank sentral bertugas mengendalikan jumlah uang beredar (dan tingkat bunga) dengan menggunakan instrument-instrumen kebijakan moneter.

4) Pengawasan, Evaluasi, dan pembinaan Perbankan (Supervision, Examination, and Regulation of Members Bank)

Mengingat bahwa sampai saat ini bank adalah lembaga keuangan yang terbesar dan terpenting, maka kesehatan dan kestabilan sektor perbankan memberikan kontribusi yang sangat besar bagi stabilitas sektor keuangan. Oleh karena itu, pengawasan, evaluasi, dan pembinaan perbankan oleh bank sentral sangat penting.

5) Penanganan Transaksi Giro (The Clearing)

Dengan fungsi ini bank sentral mengontrol dan mengelola kegiatan-kegiatan transaksi yang menggunakan alat pembayaran giro, sebab transaksi-transaksi tersebut terjadi dalam jumlah yang sangat besar, antarbank, antarwilayah, dan antarnegara.

6) Riset-riset Ekonomi

---

<sup>37</sup> Kasmir, *Bank dan lembaga keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hal. 180

Riset-riset yang dilakukan bank sentral terutama yang berkaitan dengan masalah-masalah dan perkembangan sektor moneter.

Tugas utama bank sentral umumnya adalah menjaga stabilitas moneter perekonomian sebuah negara. Untuk dapat menjalankan tugas tersebut, bank sentral melaksanakan fungsi pengaturan jumlah uang beredar.

Tugas Bank Indonesia sebagai Bank sentral adalah sebagai berikut:

*1) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter*

Dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter bank Indonesia berwenang:

- a) Menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi yang ditetapkan.
- b) Melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang termasuk, tetapi tidak terbatas pada:
  - i. Operasi pasar terbuka di pasar uang
  - ii. Penetapan tingkat diskonto
  - iii. Penetapan cadangan wajib minimum
  - iv. Pengaturan kredit atau pembiayaan
- c) Memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, paling lama 90 hari kepada bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek bank yang bersangkutan
- d) Melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan sistem nilai tukar yang telah ditetapkan.
- e) Mengelola cadangan devisa
- f) Menyelenggarakan survei secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan yang dapat bersifat makro dan mikro.

*2) Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran*

- a) Melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran



- b) Mewajibkan penyelenggaraan jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan kegiatannya
- c) Menetapkan penggunaan alat pembayaran
- d) Mengatur sistem kliring antar bank
- e) Menyelenggarakan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank
- f) Menetapkan macam, harga, ciri uang yang akan dikeluarkan bahan yang digunakan dan tanggal mulai berlakunya sebagai alat pembayaran yang sah
- g) Mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik dan memusnahkan uang dari peredaran, termasuk memberikan penggantian dengan nilai sama

### 3) *Mengatur dan mengawasi Bank Umum dan BPR*

- a) Menetapkan ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian
- b) Memberikan dan mencabut izin usaha bank
- c) Memberikan izin pembukaan, penutup dan pemindahan kantor bank
- d) Memberikan izin atas kepemilikan dan kepengurusan bank
- e) Memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan usaha tertentu
- f) Mewajibkan bank untuk menyampaikan laporan, keterangan, dan penjelasan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan Bank Indonesia
- g) Melakukan pemeriksaan terhadap bank
- h) Memerintahkan bank untuk menghentikan sementara sebagian atau keseluruhan kegiatan apabila diduga merupakan tindak pidana
- i) Mengatur dan mengembangkan informasi antar bank
- j) Mengambil tindakan terhadap suatu bank apabila membahayakan
- k) Tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa yang independen dan dibentuk berdasarkan UU
- l) Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah mengenai RAPBN serta kebijakan lain yang berkaitan dengan tugas dan wewenang BI
- m) Dalam hal pemerintah menerbitkan surat-surat hutang Negara, pemerintah wajib berkonsultasi dengan BI dan DPR
- n) Bank Indonesia dapat membantu penerbitan surat-surat hutang Negara yang diterbitkan oleh pemerintah

- o) Bank Indonesia dilarang memberikan kredit kepada pemerintah

#### 4) *Hubungan dengan Pemerintah dan Internasional*

Hubungan Bank Indonesia dengan pemerintah seperti yang tertuang dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 1999 adalah sebagai berikut:

- a) Bertindak sebagai pemenang kas pemerintah
- b) Untuk dan atas nama pemerintah BI dapat menerima pinjaman luar negeri, menata usahakan serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan pemerintah terhadap pihak luar negeri.
- c) Pemerintah wajib meminta pendapat BI dalam siding cabinet yang membahas masalah ekonomi, perbankan dan keuangan
- d) Dapat melakukan kerja sama dengan bank sentral Negara lain dan organisasi/lembaga internasional.
- e) BI bertindak untuk dan atas nama Negara RI sebagai lembaga internasional dan lembaga multilateral
- f) Bank Indonesia dapat membantu penerbitan surat-surat utang Negara yang diterbitkan pemerintah.
- g) Bank Indonesia dilarang memberikan kredit kepada pemerintah.

Dalam hal hubungan Bank Indonesia dengan dunia internasional, maka bank Inddonesia:

- a) Dapat melakukan kerja sama dengan Bank Sentral Negara lain dan Organisasi dan Lembaga Internasional
- b) Dalam hal dipersyaratkan bahwa anggota Internasional atau lembaga Multilateral adalah Negara, maka Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama Negara Republik Indonesi sebagai anggota.

#### 5) *Akuntabilitas dan Anggaran*

Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik. Dalam memenuhi tuntutan akuntabilitas, perlu sekiranya organisasi sektor publik untuk menyelenggarakan pertanggungjawabannya baik secara horisontal

maupun vertikal. Akuntabilitas kinerja sebagai salah satu media pertanggungjawaban dari suatu pemerintah daerah pada dasarnya adalah merupakan perwujudan kewajiban suatu pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan atau kegagalan dalam pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan implementasi dari rencana pembangunan dan kebijaksanaan pemerintah, sehingga penyusunan, pengelolaan dan penatausahaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan sistem akuntansi pemerintah. Selama ini sistem akuntansi yang digunakan oleh pemerintah masih berdasarkan single entry yang dampaknya mengakibatkan belum dapat disajikan bentuk laporan yang optimal.

**b. Bank Umum**

Pengertian bank umum dan bank perkreditan rakyat sesuai dengan UU NO 10 Tahun 1998 adalah sebagai berikut: Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah Umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan diseluruh wilayah Indonesia bahkan keluar negeri (Cabang). Bank Umum sering disebut bank komersil (commercial bank).

**c. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)**

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah dalam kegiatan BPR tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya jasa-jasa perbankan yang ditawarkan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan atau jasa bank umum.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> *Ibid*

## 2. Dilihat dari segi Kepemilikan

Maksudnya adalah siapa saja yang memiliki bank tersebut. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akte pendirian atau penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan. Jenis bank dilihat dari segi kepemilikan adalah :<sup>39</sup>

### a) Bank milik pemerintah

Merupakan bank yang akte pendirinya maupun modal bank ini sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia, sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula. Contoh bank-bank milik pemerintah di Indonesia, antara lain sebagai berikut:

- Bank Negara Indonesia 46 (BNI)
- Bank Rakyat Indonesia (BRI)
- Bank Tabungan Negara (BTN)
- Bank Mandiri

Kemudian Bank Pemerintah Daerah (BPD) terdapat di daerah tingkat I dan Tingkat II masing-masing provinsi. Modal BPD sepenuhnya dimiliki oleh pemda masing-masing tingkatan. Contoh BPD adalah :<sup>40</sup>

- BPD DKI Jakarta
- BPD Jawa Barat
- BPD Jawa Tengah
- BPD DI. Yogyakarta
- BPD Riau
- BPD Jawa Timur
- BPD Sulawesi Selatan
- BPD Nusa Tenggara Barat
- BPD Papua dan BPD lainnya

### b) Bank Milik Swasta Nasional

Merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional. Kemudian akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula dengan pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta pula.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> *Ibid*, hal 21

<sup>40</sup> *Ibid*, hal 22

Contoh Bank milik Swasta Nasional antara lain :

- Bank Bumi Putra
- Bank Central Asia
- Bank Danamon
- Bank Internasional Indonesia
- Bank Lippo
- Bank Mega
- Bank Muamalat
- Bank Niaga
- Bank Universal

c) Bank Milik Koperasi

Merupakan bank yang kepemilikan saham-sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Contoh bank jenis ini adalah Bank Umum Koperasi Indonesia ( Bukopin).<sup>42</sup>

d) Bank Milik Asing

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada diluar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Kepemilikannya pun jelas dimiliki oleh pihak asing ( Luar Negeri). Contoh bank Asing antar lain :<sup>43</sup>

- ABN AMRO Bank
- American Express Bank
- Bank of American
- Bank of Tokyo
- Bangkok Bank
- City Bank
- Chase Manhattan Bank
- Deutsche Bank
- European Asian Bank
- Hongkong Bank

---

<sup>41</sup> *Ibid*, hal 22

<sup>42</sup> *Ibid*, hal 23

<sup>43</sup> *Ibid*

- Standart Chartered Bank

e) Bank Milik Campuran

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga Negara Indonesia. Contoh Bank campuran antara lain :<sup>44</sup>

- Bank finconesia
- Bank Merincorp
- Bank PDFCI
- Bank Sakura Swadarma
- Ing Bank
- Inter Pacifik Bank
- Mithsubishi Buana Bank
- Paribas BBD Indonesia
- Sumitomo Niaga Bank
- Sanwa Indonesia Bank

### 3. Dilihat dari Segi Status

Dilihat dari segi kemampuannya melayani masyarakat, bank umum dapat dibagi kedalam 2 jenis. Pembagian Jenis ini Disebut juga Pembagian berdasarkan Kedudukan atau Status bank tersebut. Kedudukan atau status ini menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat dari segi jumlah produk, model maupun kualitas pelayanannya. Untuk memperoleh status tertentu, diperlukan penilaian-penilaian dengan kriteria tertentu pula. Jenis Bank dilihat dari segi status adalah sebagai berikut :<sup>45</sup>

a. Bank Devisa

Merupakan Bank yang dapat Melaksanakan transaksi-transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya : Transfer keluar negeri, Inkaso keluar negeri, Travelers Cheque, Pembukaaan dan pembayaran Letter of credit dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi Bank Devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia.

b. Bank Non Devisa

---

<sup>44</sup> *Ibid*

<sup>45</sup> *Ibid*, hal 24

Merupakan Bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai Bank Devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya Bank Devisa. Jadi Bank Non Devisa merupakan kebalikan daripada Bank Devisa, Dimana transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas Negara.

#### **4. Dilihat Dari Segi cara menentukan Harga (Berdasarkan Kegiatan Operasionalnya )**

Jenis bank jika dilihat dari segi atau caranya dalam menentukan harga, baik harga jual maupun harga beli. Terbagi dalam dua kelompok, yaitu :<sup>46</sup>

##### **a. Bank Yang Berdasarkan Prinsip Konvensional ( Barat )**

Mayoritas Bank yang berkembang di Indonesia dewasa ini adalah bank yang berorientasi pada prinsip konvensional. Hal ini tidak terlepas dari sejarah bangsa Indonesia dimana asal mula bank di Indonesia dibawa oleh colonial Belanda. Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode, yaitu:

- 1) Menetapkan bunga sebagai harga, untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula harga untuk produk pinjamannya ( Kredit ) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga ini dikenal dengan istilah *Spread based*.
- 2) Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan konvensional menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau persentase tertentu. System pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah *fee based*.

##### **b. Bank yang berdasarkan prinsip Syariah (Islam)**

Bank Berdasarkan Prinsip Syariah belum lama berkembang di Indonesia. Namun, diluar negeri terutama di Negara-negara Timur Tengah seperti Mesir atau Pakistan. Bank yang berdasarkan Prinsip Syariah Sudah Berkembang Pesat sejak lama.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> *Ibid*, hal 25

<sup>47</sup> *Ibid*

Bank berdasarkan Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan Hukum Islam antar bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya.

Dalam menentukan harga atau keuntungan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah sebagai berikut ;

- 1) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil ( *Mudharabah*)
- 2) Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal ( *Musyarakkah*)
- 3) Prinsip Jual Beli barang dengan memperoleh keuntungan (*Murabahah*)
- 4) Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) Atau dengan adanya pemilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijaeah wa iqtina* )

Sedangkan penentuan biaya-biaya jasa bank lainnya bagi bank yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah juga sesuai dengan syariat islam. Sumber penentuan harga atau pelaksanaan kegiatan bank prinsip syariah dasar hukumnya adalah Al-Quran dan Sunnah rasul.

## **B. Jenis-Jenis Bank Syariah**

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan maupun transaksi perbankan lainnya. Beberapa bank syariah menawarkan semua produk perbankan, sebagian bank syariah hanya menawarkan produk tertentu dan seterusnya. Produk dan jasa bank syariah yang dapat diberikan kepada masyarakat tergantung jenis banknya.

### **1. Bank Umum Syariah**

Bank Umum Syariah ( BUS ) adalah Bank yang dalam aktivitasnya melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah dan melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank Umum Syariah disebut juga dengan *full branch*, karena tidak dibawah koordinasi bank konvensional, akan tetapi aktivitas serta pelaporannya terpisah dengan induk banknya.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2016), hal 51



Bank umum syariah memiliki akta pendirian yang terpisah dari induknya, Bank Konvensional, atau berdiri sendiri, bukan anak perusahaan bank konvensional. Dengan demikian, dalam hal kewajiban memberikan pelaporan kepada pihak lain seperti BI, Dirjen Pajak, dan Lembaga lain, dilakukan secara terpisah.

Contoh Bank Umum Syariah antara lain :

1. PT. Bank Muamalat Indonesia
2. PT. Bank Syariah Mandiri
3. PT. Bank BRI Syariah
4. PT. Bank BNI Syariah
5. PT. Bank Mega Syariah
6. PT. Bank Panin Syariah
7. PT. BCA Syariah
8. PT. Bank Victoria Syariah
9. PT. Bank Syariah Bukopin
10. PT. Bank Maybank Indonesia Syariah
11. PT. Bank Jabar Banten Syariah
12. PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah

## **2. Unit Usaha Syariah**

Unit usaha Syariah merupakan unit usaha yang dibentuk oleh bank konvensional, akan tetapi dalam aktivitasnya menjalankan kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah, serta melaksanakan kegiatan lalu lintas pembayaran.<sup>49</sup>

Aktivitas Unit Usaha Syariah sama dengan aktivitas dalam menawarkan produk penghimpunan dana pihak ketiga, penyaluran dana, kepada pihak yang membutuhkan, serta memberikan pelayanan jasa perbankan lainnya.

Unit Usaha Syariah ( UUS ) adalah unit kerja dari kantor pusat bank konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang

---

<sup>49</sup> *Ibid*, hal. 53

pembantu syariah dan atau unit Syariah. ( *Undang-Undang Perbankan No. 21 tahun 2008* )

Namun demikian , transaksi Unit Usaha Syariah tetap dipisahkan dengan transaksi yang terjadi di bank konvensional. Hal ini dilakukan dengan alasan bahwa semua transaksi syariah tidak boleh dicampur dengan transaksi konvensional. Unit Usaha Syariah memberikan laporan secara terpisah atas aktivitas operasionalnya, meskipun pada akhirnya dilakukan konsolidasi oleh induknya.

Unit Usaha Syariah tidak memiliki akta pendirian secara terpisah dari induknya bank konvensional, akan tetapi merupakan divisi tersendiri atau cabang tersendiri yang khusus melakukan transaksi perbankan sesuai syariah islam.

Contoh Unit Usaha Syariah, antara lain :

- a. PT. Bank Tabungan Negara (BTN)
- b. PT. Bank CIMB Niaga Syariah
- c. PT. Bank Danamon Indonesia syariah
- d. PT. Bank IFI
- e. PT. Bank Internasional Indonesia Syariah
- f. PT. Bank OCBC NISP
- g. PT. Bank Permata Syariah
- h. PT. Bank Sinarmas
- i. PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN)
- j. The Hongkong and Shanghai Banking Corp. (HSBC)
- k. PT. BPD Jambi
- l. PT. BPD Riau Kepri
- m. PT. BPD Sumatera Barat
- n. PT. BPD Sumatera Utara
- o. PT. BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung
- p. PT. Bank DKI
- q. PT. BPD Jawa Tengah
- r. PT. BPD Jawa Timur
- s. PT. BPD Yogyakarta
- t. PT. BPD Kalimantan Timur
- u. PT. BPD Kalimantan Barat

- v. PT. BPD Kalimantan Selatan
- w. PT. BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat
- x. PT. BPD Nusa Tenggara Barat

### **3. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah**

Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) tidak dapat dikonversi menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR).<sup>50</sup> Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tidak diizinkan untuk membuka Kantor Cabang, kantor perwakilan, dan jenis kantor lainnya di luar negeri.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh:

1. Warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia
2. Pemerintah daerah
3. Dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2.

Kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah meliputi:

1. Menghimpun dana dari masyarakat
2. Menyalurkan dana kepada masyarakat
3. Menempatkan dana pada Bank Syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan Akad wadi'ah atau Investasi berdasarkan Akad mudharabah dan/atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
4. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan UUS
5. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan Prinsip Syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah selain memiliki kantor pusat juga diperbolehkan membuka:

---

<sup>50</sup> Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 129

1. Kantor Cabang.
2. Kantor Kas.
3. Kantor Kas Diluar Kantor.

Bentuk Badan Hukum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Perseroan Terbatas (PT). Dalam struktur organisasi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) terdapat Dewan Pengawas yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada serta mengawasi kegiatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) agar selalu sesuai dengan prinsip syariah.

### **C. Jenis kegiatan usaha Bank Syariah**

Jenis kegiatan usaha Bank Syariah terdiri atas bank umum Syariah dan unit usaha syariah.

1. Kegiatan usaha bank umum meliputi :
  - a. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan , atau bentuk lainnya yang di persammakan dengan itu berdasarkan akad wadi'ah.
  - b. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah.
  - c. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah, akad musyarakah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
  - d. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad mudharabah, akad salam, akad istishna'.
  - e. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
  - f. Membeli, menjual, atau menjamin atas resiko sendiri surat berhrga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah.
2. Kegiatan usaha UUS meliputi :
  - a. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan , atau bentuk lainnya yang di persammakan dengan itu berdasarkan akad wadi'ah.

- b. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah.
- c. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah, akad musyarakah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- d. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad mudharabah, akad salam, akad istishna'.
- e. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad qordh atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

### **Soal Diskusi**

1. Sebutkan dan jelaskan perbedaan jenis-jenis bank secara umum?
2. Jelaskan jenis-jenis perbankan syariah dan perbedaannya?
3. Jelaskan kegiatan usaha bank syariah menurut masing-masing jenisnya?

## **BAB VII. PRODUK PENGHIMPUNAN DANA PERBANKAN SYARIAH**

### **Tujuan Intruksional:**

1. Menjelaskan tentang produk tabungan dalam perbankan syariah dan jenis-jenisnya.
2. Menjelaskan tentang produk giro dalam perbankan syariah dan jenis-jenisnya.
3. Menjelaskan tentang produk deposito dalam perbankan syariah

### **A. Tabungan (*Saving Deposit*)**

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.<sup>51</sup>

Pengertian tabungan menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Seperti halnya simpanan giro, simpanan tabungan juga mempunyai syarat-syarat tertentu bagi pemegangnya dan persyaratan masing-masing bank berbeda satu sama lainnya. Disamping persyaratan yang berbeda, tujuan nasabah menyimpan uang di rekening tabungan juga berbeda. Demikian pula, sasaran bank dalam memasarkan produk tabungannya juga berbeda sesuai dengan sasaran yang diinginkan.

Pengertian penarikan hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, maksudnya adalah untuk menarik uang yang disimpan di rekening tabungan antarsatu bank dengan bank lainnya berbeda, tergantung dari bank yang mengeluarkannya. Hal ini sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat antara bank dengan si penabung. Sebagai contoh dalam hal frekuensi penarikan, apakah 2 kali seminggu atau setiap hari atau mungkin setiap saat seperti rekening giro. Yang jelas haruslah sesuai dengan perjanjian sebelumnya yang telah dibuat oleh bank. Apabila nasabah menyimpan uang di bank tersebut maka otomatis nasabah menyetujuinya. Kemudian dalam hal sarana atau alat penarikan juga tergantung dengan perjanjian yang dibuat oleh bank.

---

<sup>51</sup> Khotibul Umam. *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016)

Sedangkan menurut DR. Andri Soemitra, MA, tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadi'ah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang disamakan dengan itu.<sup>52</sup>

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah dan/atau UUS berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang disamakan dengan itu. Sedangkan investasi adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah dan/atau UUS berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang disamakan dengan itu.

### **1. Tabungan Wadiah**

*Wadiah* adalah akad antara pemilik dengan penyimpan, untuk menjaga harta/modal dari kerusakan atau kerugian dan untuk keamanan harta.

Landasan Syariah QS Annisa (4):58 :

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.”*

Hadis Riwayat Dawud dan Al Tirmidzi :

*“ Tunaikanlah amanat itu kepada orang yang memberi amanat kepadamu dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu ”*

*Wadiah* terdiri dari dua jenis, yakni sebagai berikut:

- a. *Wadiah Yad Amanah*

---

<sup>52</sup> Andri Soemitra, *Bank dan lembaga keuangan syariah*, (Depok: Kencana, 2017), hal. 71

*Wadiah Yad Amanah* (kepercayaan) ialah dimana penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut sampai diambil kembali oleh penitip.<sup>53</sup>

Ciri-ciri *Wadiah Yad Amanah* adalah sebagai berikut:

- 1) Penerima titipan (*costudian*) adalah memperoleh kepercayaan (*trustee*)
- 2) Harta/modal/barang yang berada dalam titipan harus dipisahkan
- 3) Harta dalam titipan tidak dapat digunakan
- 4) Penerima titipan tidak mempunyai hak untuk memanfaatkan simpanan

Penerima titipan tidak diharuskan mengganti segala resiko kehilangan atau kerusakan harta yang dititipkan kecuali bila kehilangan atau kerusakan itu karena kelalaian penerima titipan atau bila status titipan telah berubah menjadi *Wadiah Yad Dhamanah*.

b. *Wadiah Yad Dhamanah*

*Wadiah Yad Dhamanah* (simpanan yang dijamin) dimana titipan yang selama belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan.<sup>54</sup> Apabila dari hasil pemanfaatan tersebut diperoleh keuntungan maka seluruhnya menjadi hak penerima titipan. Biasanya bank syariah menggunakan prinsip *wadiah yad dhamanah* untuk produk tabungan dan giro.

Ciri-ciri *Wadiah Yad Dhamanah*

- 1) Penerima titipan adalah dipercaya dan penjamin barang yang dititipkan
- 2) Harta dalam titipan tidak harus dipisahkan
- 3) Harta/modal/barang dalam titipan dapat digunakan untuk perdagangan

---

<sup>53</sup> Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah; dari Teori ke Praktek*, (Jakarta, Gema Insani Press, 2001).

<sup>54</sup> *Ibid*



- 4) Penerima titipan berhak atas pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan harta titipan dalam perdagangan
- 5) Pemilik harta/modal/ barang dapat menarik kembali titipannya sewaktu-waktu.

Karakteristik Umum Tabungan berdasarkan akad *Wadi'ah* adalah sebagai berikut:

- 1) Bersifat titipan

Dalam hal titipan, maka orang yang dititipi berkewajiban untuk memelihara dan menjaga barang titipan tersebut. Ia tidak dibenarkan menggunakan dana yang dititipkan, kecuali atas izin pemiliknya.

- 2) Titipan bisa diambil kapan saja

Hal ini disebabkan sifatnya titipan, maka pemilik dana dapat menarik dananya sewaktu-waktu dan pihak yang dititipi harus selalu siap mengembalikan dana yang dititipkan.

- 3) Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Karena bersifat titipan pula, maka tidak ada kewajiban bagi pihak yang menitipkan (nasabah) untuk memberikan imbalan apapun kepada bank, dan bank tidak berkewajiban memberikan imbalan apapun kepada nasabah sekalipun dananya sudah dikelola secara komersial. Namun pihak bank boleh memberikan athaya (bonus) kepada nasabah dengan catatan tidak diperjanjikan di depan atau dituangkan dalam akad. Jadi, athaya ini murni adalah hak bank, maka nasabah tidak dapat menuntut untuk diberikan.

Sedangkan konsep Bonus pada tabungan *wadi'ah* adalah sebagai berikut:

- 1) Penerima titipan (bank) tidak boleh menyatakan atau menjanjikan imbalan atau keuntungan apapun kepada pemegang rekening wadiah
- 2) Pemilik harta titipan tidak boleh mengharapkan atau meminta imbalan atau keuntungan atas rekening *wadiah*
- 3) Setiap imbalan atau keuntungan yang dijanjikan sebelumnya dapat dianggap riba, baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk lain

- 4) Penerima titipan (bank) atas kehendaknya sendiri dapat memberikan imbalan kepada pemilik harta titipan (pemegang rekening *wadiah*)

Persyaratan kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk giro atas dasar akad *wadiah* berlaku menurut Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) no. 10/14/DPbs tertanggal 17 Maret 2008 adalah sebagai berikut:

- 1) Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana,
- 2) Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah,
- 3) Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah,
- 4) Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk giro atau tabungan atas dasar akad *wadiah*, dalam bentuk perjanjian tertulis,
- 5) Bank dapat membebaskan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya kartu ATM, buku/cek/bilyet giro, biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening,
- 6) Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah, dan dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah.

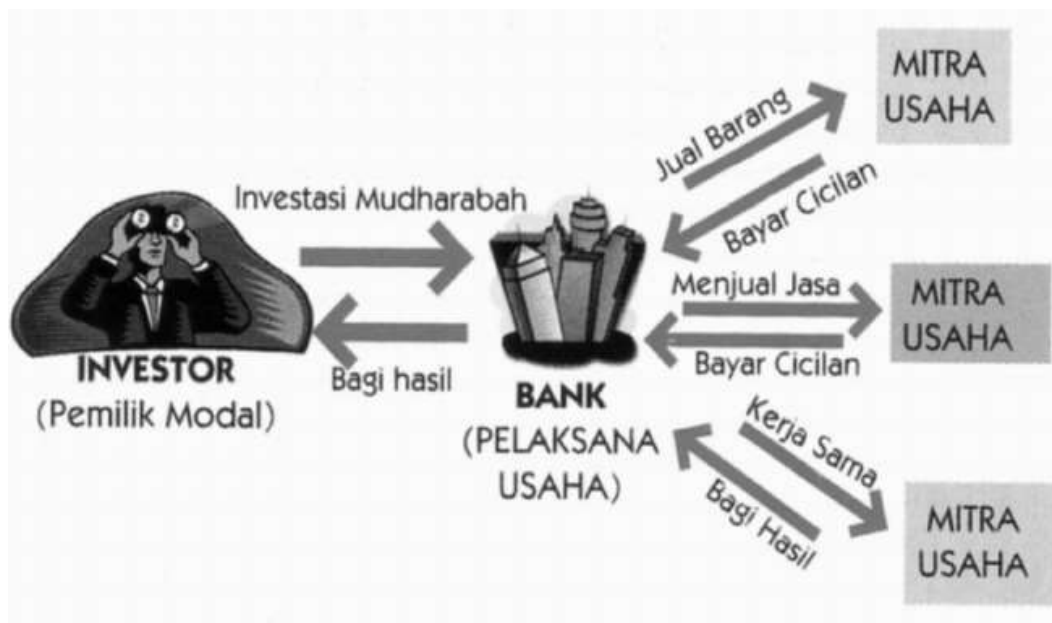
#### Fasilitas Yang diperoleh dari Tabungan *Wadiah*

- 1) Menggunakan buku atau kartu ATM
- 2) Minimum setoran saldo pertama dan saldo minimum yang harus dipertahankan
- 3) Tabungan tidak terbatas dapat ditarik sewaktu-waktu
- 4) Tipe rekening :
  - ✓ Rekening perorangan
  - ✓ Rekening bersama atau beberapa individu
  - ✓ Perkumpulan/kelompok yang tidak berbadan hukum

- ✓ Rekening perwalian, yang dioprasikan oleh orang tua wali atau wali atas nama pemegang rekening (yang belum dewasa)
- 5) Pembayaran bonus dilakukan dengan mengkredit rekening tabungan

## 2. Tabungan *Mudharabah*

*Mudharabah* disebut juga *Muqarradah* yang berarti bepergian untuk urusan dagang. Secara muamalah, *Al-mudharabah* adalah : Akad kerjasama antara pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pengusaha (*mudharib*) untuk melakukan suatu usaha bersama.<sup>55</sup> Keuntungan yang diperoleh dibagi antara keduanya dengan perbandingan nisbah yang disepakati sebelumnya.

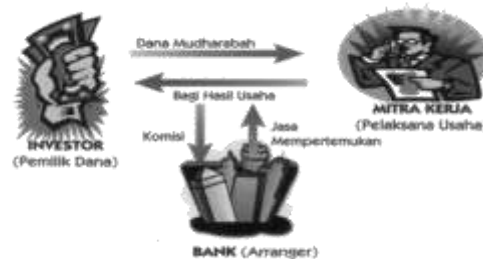


Jenis-jenis *Mudharabah* adalah sebagai berikut:

- a. *Mudharabah Muthlaqah* dimana pemilik (*shahibul maal*) dana memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola (*mudharib*) untuk mempergunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan. Namun pengelola tetap bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan sesuai dengan kebiasaan usaha normal yang sehat (*uruf*) (bank biasanya menggunakan produk tabungan dan deposito untuk jenis ini)

<sup>55</sup> Adiwarman A. Karim. *Bank Islam; analisis fiqh dan keuangan*. Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006

- b. *Mudharabah muqayyadah* dimana pemilik dana menentukan syarat dan pembatasan kepada pengelola dan pengguna dana tersebut dengan jangka waktu, tempat, jenis usaha dan sebagainya. (untuk jenis ini akan dibahas pada topik pembiayaan)



Karakteristik Umum Tabungan berdasarkan *Mudharabah*, yaitu:

- Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
- Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
- Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Persyaratan kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk giro atas dasar akad *mudharabah* berlaku menurut Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) no. 10/14/DPbs tertanggal 17 Maret 2008 adalah sebagai berikut:

- Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*),

- b) Pengelolaan dana oleh Bank dapat dilakukan sesuai batasan-batasan yang ditetapkan oleh pemilik dana (*mudharabah muqayyadah*) atau dilakukan dengan tanpa batasan-batasan dari pemilik dana (*mudharabah mutlaqah*),
- c) Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah,
- d) Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk tabungan atau deposito atas dasar akad *mudharabah*, dalam bentuk perjanjian tertulis,
- e) Dalam akad *mudharabah muqayyadah* harus dinyatakan secara jelas syarat-syarat dan batasan tertentu yang ditentukan oleh nasabah,
- f) Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati,
- g) Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening,
- h) Bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.

Fasilitas yang diperoleh untuk tabungan

- a) Menggunakan buku tabungan
- b) Setoran awal minimum berdasarkan kebijakan bank
- c) Setoran berikutnya tidak dibatasi dan waktu penarikan sesuai dengan akad
- d) Bagi hasil dikreditkan pada rekening tabungan setiap akhir bulan
- e) Tipe tabungan :
  - o Rekening perorangan
  - o Rekening bersama (dua atau lebih)
  - o Rekening organisasi yang tidak berbadan hukum
  - o Rekening perwalian yang dioperasikan orang tua/wali
  - o Rekening dijadikan jaminan pembiayaan
- f) Pengakhiran perjanjian tabungan terjadi bila tabungan ditutup

## **B. Giro (*Demand Deposit*)**

Giro adalah simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat, artinya adalah yang yang disimpan di rekening giro dapat diambil setiap waktu setelah memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan.<sup>56</sup> Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 1 angka 23, bahwa giro adalah simpanan berdasarkan akad *wadiah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan perintah pemindah bukuan.

### **1. Giro *Wadiah***

Giro *wadiah* merupakan bentuk simpanan yang penarikannya dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan yang didasarkan pada prinsip titipan. Bank syariah menerapkan prinsip *wadiah yad dhamanah*, yakni nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada Bank Syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan Bank Syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi yang disertai hak untuk mengelola dana titipan dengan tanpa mempunyai kewajiban memberikan bagi hasil dari keuntungan pengelolaan dana tersebut. Namun demikian, Bank Syariah diperkenankan memberikan insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya.

Ketentuan umum Giro berdasarkan prinsip *wadiah* yang diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 01/DSN-MUI/IV/2000 adalah sebagai berikut:

- a. Bersifat titipan
- b. Titipan bisa diambil kapan saja (*on call*)
- c. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian ( '*athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) no. 10/14/DPbs tertanggal 17 Maret 2008 bahwa persyaratan kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk giro atas dasar akad *wadiah* berlaku sebagai berikut:

---

<sup>56</sup> Khotibul Umam, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), hal. 9

- a. Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana,
- b. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah,
- c. Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah
- d. Bank nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk giro atau tabungan atas dasar akad *wadiah*, dalam bentuk perjanjian tertulis,
- e. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya kartu ATM, buku/cek/bilyet giro, biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening,
- f. Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah, dan
- g. Dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah.

#### Fasilitas yang diperoleh dari Giro *Wadiah*

- a. Kepada pemegang rekening diberikan buku cek untuk mengoperasikan rekening
- b. Ada minimum setoran awal, dan diperlukan referensi bagi pemegang rekening
- c. Calon pemegang rekening tidak terdaftar dalam daftar hitam dari BI
- d. Penarikan dana dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan menggunakan cek atau instruksi tertulis lainnya
- e. Tipe rekening :
  - ✓ Rekening perorangan
  - ✓ Rekening bersama atau rekening kelompok/perkumpulan
  - ✓ Rekening perusahaan (Badan hukum)
- f. Servis lainnya :
  - ✓ Cek khusus
  - ✓ Instruksi siaga (standing instruction)
  - ✓ Transfer dana secara otomatis

- g. Pemegang rekening menerima salinan rekening (*account statement*) setiap bulan dengan rincian transaksi selama bulan yang bersangkutan.
- h. Bank dapat mengirim konfirmasi saldo kepada pemegang rekening setiap akhir tahun atau setiap periode tertentu (yang lebih pendek) bila dianggap perlu oleh bank atau atas permintaan pemegang rekening.

## 2. Giro *Mudharabah*

Giro *mudharabah* mendapatkan fasilitas yang sama dengan giro *wadiah*, namun yang membedakan adalah akad. Dalam Giro *mudharabah* Bank Syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana). Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, Bank Syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad *mudharabah* dengan pihak lain.<sup>57</sup>

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) no. 10/14/DPbs tertanggal 17 Maret 2008 bahwa persyaratan kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk giro atas dasar akad *mudharabah* berlaku sebagai berikut:

- a. Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*),
- b. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah,
- c. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati,
- d. Bank nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk giro atau tabungan atas dasar akad *mudharabah*, dalam bentuk perjanjian tertulis,
- g) Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya cek/bilyet giro, biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening,

---

<sup>57</sup> Khotibul Umam. *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), hal. 9



- h) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah.

### **C. Deposito *Mudharabah***

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 deposito didefinisikan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank atau pada saat jatuh tempo. Dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Deposito didefinisikan sebagai investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan Bank Syariah atau UUS. Deposito merupakan produk dari bank yang memang ditujukan untuk kepentingan investasi dalam bentuk surat-surat berharga, sehingga dalam perbankan syariah akan memakai prinsip mudharabah. Berbeda dengan perbankan konvensional yang memberikan imbalan berupa bunga bagi nasabah deposan, maka dalam perbankan syariah imbalan yang diberikan kepada nasabah deposan adalah bagi hasil (*profit sharing*) sebesar nisbah yang telah disepakati di awal akad.

Deposito terdiri dari beberapa jenis, yakni sebagai berikut:

1. Deposito berjangka biasa

Deposito yang berakhir pada jangka waktu yang diperjanjikan, perpanjangan hanya dapat dilakukan setelah ada permohonan baru atau pemberitahuan dari penyimpan.

2. Deposito berjangka otomatis

Pada saat jatuh tempo, secara otomatis akan diperpanjang untuk jangka waktu yang sama tanpa pemberitahuan dari penyimpan.

Dalam Fatwa DSN No.03/DSNMUI/IV/2000 tertanggal 01 April 2000 tentang Deposito memberikan landasan syariah dan ketentuan tentang deposito mudharabah sebagai berikut:

- a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.

- b. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
- c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- e. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- f. Bank diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan.

Adapun dasar hukum deposito dalam hukum dapat dijumpai dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Deposito dalam bank syariah diatur melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Deposito sebagai salah satu produk penghimpunan dana juga mendapatkan dasar hukum dalam PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Pasal 3 PBI dimaksud menyebutkan antara lain bahwa pemenuhan prinsip syariah dilakukan melalui kegiatan penghimpunan dana dengan mempergunakan akad mudharabah dan lainnya. Selain itu mengenai deposito ini juga telah diatur dalam sebuah Fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 1 April 2000 yang menyatakan bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam bidang investasi, memerlukan jasa perbankan . Salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari dari masyarakat adalah deposito, yaitu simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah menyimpan dengan bank.

Fasilitas yang diperoleh untuk Deposito adalah sebagai berikut:

- a. Menggunakan sertifikat deposito atau bilyet deposito
- b. Minimum jumlah investasi ditentukan oleh bank
- c. Mempunyai jangka waktu (1, 3,6,12, 24 bulan dst)
- d. Kontrak berakhir pada saat jatuh tempo, tetapi dapat diperpanjang (ARO)
- e. Bagi hasil diberikan pada saat jatuh tempo, interim bagi hasil dapat diberikan setiap periode yang diperjanjikan

- f. Nisbah bagi hasil ditetapkan dimuka. Bank dapat memberikan bagi hasil melebihi tetapi tidak boleh kurang dari nisbah yang diperjanjikan. Kelebihan bagi hasil atas nisbah dianggap bonus.
- g. Berdasarkan proyek khusus dimana bank ingin membiayai. Penggunaan dana investasi khusus bersifat *back to back*
- h. Jumlah investasi tergantung pada proyek biasanya dalam jumlah besar
- i. Jangka waktu investasi mengikuti jangka waktu proyek
- j. Pembayaran keuntungan tergantung pada kemajuan/penerimaan keuntungan oleh proyek
- k. Nisbah bagi hasil ditetapkan kedua belah pihak, biasanya tergantung pada tingkat kelayakan proyek yang dibiayai.

### **Soal Diskusi**

1. Jelaskan produk tabungan dalam perbankan syariah dan jenis-jenisnya?
2. Jelaskan produk giro dalam perbankan syariah dan jenis-jenisnya?
3. Jelaskan produk deposito dalam perbankan syariah?

## **BAB V. PRODUK PENYALURAN DANA PERBANKAN SYARIAH**

### **Tujuan Intruksional:**

1. Menjelaskan tentang pengertian kredit dan jenis-jenis kredit pada bank konvensional
2. prinsip jual beli (*ba'i*)
3. Menjelaskan tentang prinsip sewa (*Ijarah*)
4. Menjelaskan tentang prinsip bagi hasil (*Syirkah*)

### **A. Kredit**

#### **1. Pengertian Kredit**

Menurut UU Perbankan No. 10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.<sup>58</sup>

Kata Kredit berasal dari bahasa latin yakni *creder* yang berarti percaya. Dari asal katanya istilah kredit memiliki arti khusus yakni meminjamkan uang atau penundaan pembayaran suatu barang, dimana pemberian kredit ini didasarkan oleh kepercayaan antara kreditur (Lembaga Keuangan) kepada debitur (Seseorang atau kelompok). Secara Umum kredit diartikan sebagai suatu peminjaman sejumlah modal oleh pemilik modal kepada pengguna modal dimana terdapat unsur kepercayaan berupa keyakinan diberikan kepada penerima kredit bahwa pinjaman yang disepakati akan terlaksana dengan baik. Dalam pemberian kredit pihak perbankan akan mengadakan perjanjian terlebih dahulu dengan pihak peminjam, namun sebelum hal ini terjadi pihak peminjam mengajukan proposal terlebih dahulu kepada pihak perbankan untuk dianalisa dalam hal latar belakang nasabah atau perusahaan.

Prospek usahanya, jaminan yang diberikan. Hal ini diberikan agar pihak perbankan menjadi yakin serta bahwa nasabah adalah orang yang tepat untuk diberikan pinjaman. Pemberian kredit yang tanpa melalui tahap analisis akan dapat menyebabkan kerugian bagi pihak perbankan itu sendiri karena akan dapat menimbulkan kredit macet

---

<sup>58</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenada Goup, 2011), hal. 106

dikemudian hari. Hal inilah yang banyak terjadi di banyak tubuh perbankan pada tahun 1997 dimana banyak bank umum yang dilikuidasi oleh BI dikarenakan likuiditasnya berada dibawah standar BI.

## **2. Unsur-Unsur Kredit**

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit menurut buku Bank dan Lembaga Keuangan karya Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, adalah sebagai berikut :

- a. Kepercayaan; yaitu suatu keyakinan pemberian kredit bahwa kredit yang di berikan (berupa uang, barang, atau jasa) akan benar-benar di terima kembali di masa yang akan datang.
- b. Kesepakatan; kesepakatan ini meliputi kesepakatan antar si pemberi kredit dengan si penerima kredit.
- c. Jangka waktu; setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah di sepakati.
- d. Risiko; adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya/macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya.
- e. Balas jasa, merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau fase tersebut yang kita kenal dengan nama bunga.

## **3. Tujuan Dan Fungsi Kredit**

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai tujuan tertentu. Tujuan pemberian kredit tersebut tidak akan terlepas dari misi bank tersebut di dirikan. Adapun tujuan utama pemberian kredit antara lain:

- a. Mencari keuntungan yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut hasilnya terutama dalam bentuk bunga yang di terima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang di bebaskan kepada nasabah.

- b. Membantu usaha nasabah; tujuan lain dari pemberian kredit adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dan investasi maupun dana untuk modal kerja.
- c. Membantu pemerintah; bagi pemerintah semakin banyak kredit yang di salurkan oleh pihak perbankan maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor. Keuntungan bagi pemerintah dengan menyebarnya pemberian kredit adalah:
  - 1) Penerimaan pajak dari keuntungan yang di peroleh nasabah dan bank.
  - 2) Membuka kesempatan kerja, dalam hal ini untuk kredit dan pembangunan usaha baru atau perluasan usaha akan membutuhkan tenaga kerja baru, sehingga dapat menyerap tenaga kerja yang masih menganggur.
  - 3) Meningkatkan jumlah barang dan jasa, jelas sekali bahwa sebagian besar kredit yang di salurkan akan dapat meningkatkan jumlah barang dan jasa yang beredar di masyarakat.
  - 4) Menghemat devisa negara, terutama untuk produk-produk yang sebelumnya di impor dan apabila sudah dapat di produksi di dalam negeri dengan fasilitas kredit yang ada, jelas akan dapat menghemat devisa negara.
  - 5) Meningkatkan devisa negara, apabila dari kredit yang di biayai untuk keperluan ekspor. Tujuan kredit ini antara satu sama lainnya sangat berkaitan mengingat tujuan kredit tersebut untuk memperoleh keuntungan di pihak perbankan dan di pihak masyarakat menerima manfaat dalam bentuk peningkatan dan perluasan usaha secara terarah dan berkesinambungan.<sup>59</sup>

Kemudian di samping tujuan di atas maka suatu fasilitas juga memiliki fungsi secara luas di antaranya adalah:

- a. Untuk meningkatkan daya guna uang
- b. Untuk meningkatkan daya guna uang.
- c. Sebagai alat stabilitas ekonomi.
- d. Untuk meningkatkan semangat usaha; bagi penerima kredit maka akan dapat meningkatkan semangat berusaha, apalagi nasabah yang memiliki modal pas-pasan.
- e. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan.

---

<sup>59</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Revisi*. (Jakarta: PT. RajaGrafinda Persada, 2014), hal 140

- f. Untuk meningkatkan hubungan internasional; pinjaman internasional akan dapat meningkatkan kerja sama internasional yang lebih baik di berbagai sektor, sehingga dalam jangka panjang akan menciptakan perdamaian antar bangsa.

#### **4. Jenis Kredit**

Kredit yang diberikan bank umum dan bank perkreditan rakyat untuk masyarakat terdiri dari berbagai jenis. Secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain:

- a. Dilihat Dari Segi Kegunaan

- 1) Kredit Investasi

- Biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi.

- 2) Kredit Modal Kerja

- Digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.

- b. Dilihat Dari Segi Tujuan Kredit

- 1) Kredit Produktif

- Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa.

- 2) Kredit Konsumtif

- Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha.

- 3) Kredit Perdagangan

- Kredit yang digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada supplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar.

- c. Dilihat Dari Segi Jangka Waktu

- 1) Kredit Jangka Pendek

- Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

- 2) Kredit Jangka Menengah

Jangka waktu kreditnya berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun, biasanya untuk investasi. Sebagai contoh kredit untuk pertanian seperti jeruk, atau peternakan kambing.

3) Kredit Jangka Panjang

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya di atas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit atau manufaktur dan untuk kredit konsumtif seperti kredit perumahan.

d. Dilihat Dari Segi Jaminan

1) Kredit Dengan Jaminan

Kredit yang diberikan dengan suatu jaminan, jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan si calon debitur.

2) Kredit Tanpa Jaminan

Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama baik si calon debitur selama ini

e. Dilihat Dari Segi Sektor Usaha

- 1) Kredit Pertanian
- 2) Kredit Peternakan
- 3) Kredit Industri
- 4) Kredit Pertambangan
- 5) Kredit Pendidikan
- 6) Kredit Profesi
- 7) Kredit Perumahan<sup>60</sup>

## 5. Prosedur Dalam Pemberian Kredit

Prosedur pemberian kredit secara umum dapat dibedakan antara pinjaman perseorangan dengan pinjaman oleh suatu badan hukum, dan dapat ditinjau dari segi tujuannya apakah untuk konsumtif atau produktif.

---

<sup>60</sup> Suharno, *Analisa Kredit*, (Jakarta : Djambatan, 2003), hal 60



Secara umum dijelaskan prosedur pemberian kredit oleh badan hukum sebagai berikut :

a. Pengajuan berkas-berkas

Dalam hal ini pemohon kredit harus mengajukan permohonan kredit dan berkas-berkas lain yang dibutuhkan kedalam proposal. Pengajuan proposal kredit hendaknya yang berisi antara lain :

- 1) Latar belakang perusahaan
- 2) Maksud dan tujuan
- 3) Besarnya kredit dan jangka waktu
- 4) Cara pemohon mengembalikan kredit
- 5) Jaminan kredit

b. Penyelidikan berkas pinjaman

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar. Jika menurut perbankan belum lengkap, maka nasabah diminta untuk segera untuk melengkapinya dan apabila sampai batas tertentu nasabah tidak sanggup melengkapinya masa sebaiknya permohonan kredit dibatalkan.

1) Wawancara I

Merupakan penyelidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peinjman, untuk meyakinkan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti dengan yang diinginkan.

2) *On the spot*

Merupakan kegiatan memeriksa ke lapangan dengan mininjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasil dari on the spot dicocokkan dengan hasil wawancara I.

3) Wawancara II

Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat dilakukan on the spot di lapangan.

4) Keputusan kredit

Keputusan kredit dalam hal ini adalah menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima, maka dipersiapkan administrasinya, biasanya keputusan kredit yang akan mencakup :

- a) Jumlah uang yang diterima
  - b) Jangka waktu kredit
  - c) Dan biaya-biaya yang harus dibayar
- c. Penandatanganan akad kredit/ perjanjian lainnya

Maka sebelum kredit dicairkan maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit, mengikat jaminan dengan hipotek dan surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu.

## **6. Kredit Bermasalah**

Penyebab kegagalan kredit dapat berasal dari dalam bank maupun pihak luar. Bila ditarik suatu garis besar terjadinya kegagalan kredit (kredit bermasalah/macet) adalah karena kurang cakupannya pihak pengelola kredit, lemahnya monitoring penggunaan kredit, dan adanya itikad yang kurang baik dari debitur. Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan kegagalan kredit antara lain sebagai berikut:<sup>61</sup>

### *a. Faktor internal*

Ada beberapa faktor intern bank yang dapat menyebabkan kredit macet antara lain:

- 1) Adanya tindak kecurangan dari aparat pengelola bank
- 2) Bank terlalu mengejar target
- 3) Petugas bank terlalu memfokuskan terhadap jaminan
- 4) Petugas bank merasa berhutang budi, karena telah memperoleh hadiah dari debitur
- 5) Bank terlambat mencairkan pinjaman
- 6) Terlalu kecil atau terlalu besar memberikan kredit
- 7) Debitur memperoleh katabelece dari pejabat yang lebih tinggi baik dari top manajemen bank itu sendiri atau dari pejabat pemerintah yang berkuasa
- 8) Kurangnya pengetahuan teknis para pengelola kredit

---

<sup>61</sup> Thomas Suyatno & dkk, *Dasar-Dasar Perkreditan Edisi Keempat*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal 78

- 9) Pengelola kredit tidak tegas dan lemah dalam melakukan monitoring penggunaan kredit
- 10) Kurang baiknya manajemen information system yang ada di bank tersebut
- 11) Kebijakan kredit yang ada belum memadai
- 12) Lemahnya monitoring terhadap penggunaan kredit
- 13) Adanya sikap yang ceroboh, dan mengampangkan dari pengelola kredit

b. *Faktor eksternal*

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terhadap kegagalan/penyebab kredit macet, antara lain:

- 1) Kebijakan pemerintah (sosial, politik, ekonomi) yang berpengaruh terhadap operasional perusahaan.
- 2) Terjadinya bencana alam, kerusakan yang merusak/menghancurkan usaha debitur.
- 3) Itikad buruk dari debitur.
- 4) Adanya penyalahgunaan fasilitas kredit.
- 5) Pemalsuan suara.
- 6) Mengguankan anggunan milik pihak III.
- 7) Debitur melarikan diri.
- 8) Mis manajemen.
- 9) Tersangka pihak pidana.
- 10) Adanya tekanan yang dilakukan oleh penguasa (kredit tuntas).
- 11) Jaminan yang tidak marketable, sehingga sulit dilakukan likuidasi pada saat kredit macet.

Hampir setiap bank mengalami kredit bermasalah alias nasabah tidak mampu lagi untuk melunasi kreditnya. Kemacetan suatu fasilitas kredit disebabkan oleh 2 faktor yaitu:

a. *Dari pihak perbankan*

Dalam hal ini pihak analisis kurang teliti baik dalam mengecek kebenaran dan keaslian dokumen maupun salah dalam melakukan perhitungan dengan rasio-rasio yang ada. Akibatnya apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi

sebelumnya. Kemacetan suatu kredit kolusi dari pihak analisis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara tidak obyektif.

b. *Dari pihak nasabah*

Kemacetan kredit yang disebabkan oleh nasabah diakibatkan oleh dua hal yaitu:

- 1) Adanya unsur kesengajaan. Artinya nasabah sengaja tidak mau membayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit yang diberikan dengan sendiri macet.
- 2) Adanya unsur tidak sengaja. Artinya nasabah memiliki kemauan untuk membayar akan tetapi tidak mampu dikarenakan usaha yang dibiayai terkena musibah misalnya banjir atau kebakaran.

## **B. Pembiayaan**

### **1. Pengertian Pembiayaan**

Pembiayaan merupakan Aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima Pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterima sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.<sup>62</sup>

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berbeda dengan kredit yang diberikan oleh bank konvensional. Dalam perbankan syariah, Return atas pembiayaan tidak dalam bentuk Bunga, akan tetapi dalam bentuk lain, sesuai dengan akad-akad yang disediakan di bank syariah.

Didalam perbankan syariah, istilah kredit tidak dikenal, karena bank syariah memiliki skema yang berbeda dengan bank konvensional dalam menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan. Bank syariah menyalurkan dananya kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan, Sifa pembiayaan bukan merupakan

---

<sup>62</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Prenada Goup, 2011), hal. 105

utang-piutang tetapi merupakan investasi yang diberikan bank kepada nasabah dalam melakukan usaha.

Menurut Undang-Undang perbankan No 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan. Dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Di dalam perbankan syariah, pembiayaan yang diberikan kepada pihak pengguna dana berdasarkan pada prinsip syariah. Aturan yang digunakan yaitu sesuai dengan hukum islam.

## **2. Unsur-Unsur Pembiayaan**

### **a. Bank Syariah**

Merupakan Badan usaha yang Memberikan Pembiayaan kepada pihak lain yang membutuhkan dana.

### **b. Mitra Usaha**

Merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, atau pengguna dana yang disalurkan oleh bank syariah.

### **c. Kepercayaan (Trust)**

Bank syariah memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pembiayaan bahwa mitra akan memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana bank syariah sesuai dengan jangka waktu tertentu yang diperjanjikan

### **d. Akad**

Akad merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara bank syariah dan pihak nasabah/mitra.

### **e. Risiko**

Setiap dana yang disalurkan/diinvestasikan oleh bank syariah selalu mengandung Risiko tidak kembalinya dana. Risiko pembiayaan merupakan kemungkinan kerugian yang akan timbul karena dana yang disalurkan tidak dapat kembali.

### **f. Jangka waktu**

Merupakan Periode Waktu yang diperlukan oleh nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh bank syariah.

g. Balas jasa

Sebagai balas jasa atas dana yang disalurkan oleh bank syariah, maka nasabah membayar sejumlah tertentu sesuai dengan akad yang telah disepakati antara bank dan nasabah.

### C. Produk Penyaluran Dana Bank syariah

Produk penyaluran dana di Bank Syari'ah dapat dikembangkan dengan tiga model, yaitu:

1. Transaksi pembiayaan yang di tujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli. Prinsip jual beli ini dikembangkan menadi bentuk pembiayaan-pembiayaan murobahah, salam, dan istisna'.<sup>63</sup>
2. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa (ijarah). Transaksi ijarah dilandasi adanya pemindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama dengan prinsip jual beli, namun perbedaanya terletak pada obyek transaksinya. Bila pada jual beli obyek transaksinya adalah barang, maka padaijarah obyek transaksinya jasa.
3. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa, dengan prinsip bagi hasil.<sup>63</sup>

Selain itu, secara garis besar produk pendanaan dan pembiayaan bank syari'ah di bagikan kedalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya. Keempat kategori itu adalah:

1. Pendanaan dengan prinsip bagi hasil.
2. Pembiayaan dengan prinsip jual beli.
3. Pembiayaan dengan prinsip sewa, dan
4. Pembiayaan dengan akad pelengkap.

Dalam menyalurkan dana pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam tiga kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu:

1. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli.

---

<sup>63</sup> Suhan, *Managemen Bank* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hal 149.

2. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa.
3. Transaksi pembiayaan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa, dengan prinsip bagi hasil.

Pada kategori pertama dan kedua, tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang dijual. Produk yang termasuk dalam kelompok ini adalah produk yang menggunakan prinsip jual-beli seperti *murabahah*, *salam*, dan *istishna* serta produk yang menggunakan prinsip sewa yaitu *ijarah*. Sedangkan pada kategori ketiga, tingkat keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi-hasil. Pada produk bagi hasil keuntungan ditentukan oleh nisbah bagi hasil yang disepakati di muka. Produk perbankan yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah *musyarakah* dan *mudharabah*.

## 1. Pembiayaan Dengan Prinsip Jual Beli (*Ba'i*)

Pembiayaan dengan prinsip jual beli ditujukan untuk memiliki barang yakni adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (*transfer of property*), dimana keuntungan bank telah ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang dijual. Barang yang diperjualbelikan dapat berupa barang konsumtif maupun barang produktif. Jenis pembiayaan berdasarkan akad jual beli ini dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:<sup>64</sup>

### a) Pembiayaan *Murabahah*

Syarat *Ba'i al Murabahah* adalah :

1. Penjual harus memberi tahu biaya modal kepada nasabah
2. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
3. Kontrak harus bebas dari riba.
4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
5. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian.

*Ba'i al Murabahah* memberi banyak manfaat kepada bank syariah. Salah satunya adalah keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual

---

<sup>64</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, Jakarta, Kencana-Prenadamedia Group, 2014.

dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, sistem ini juga sangat sederhana, hal tersebut memudahkan penanganan administrasinya di bank syariah. Namun ada beberapa risiko yang harus diantisipasi antara lain :

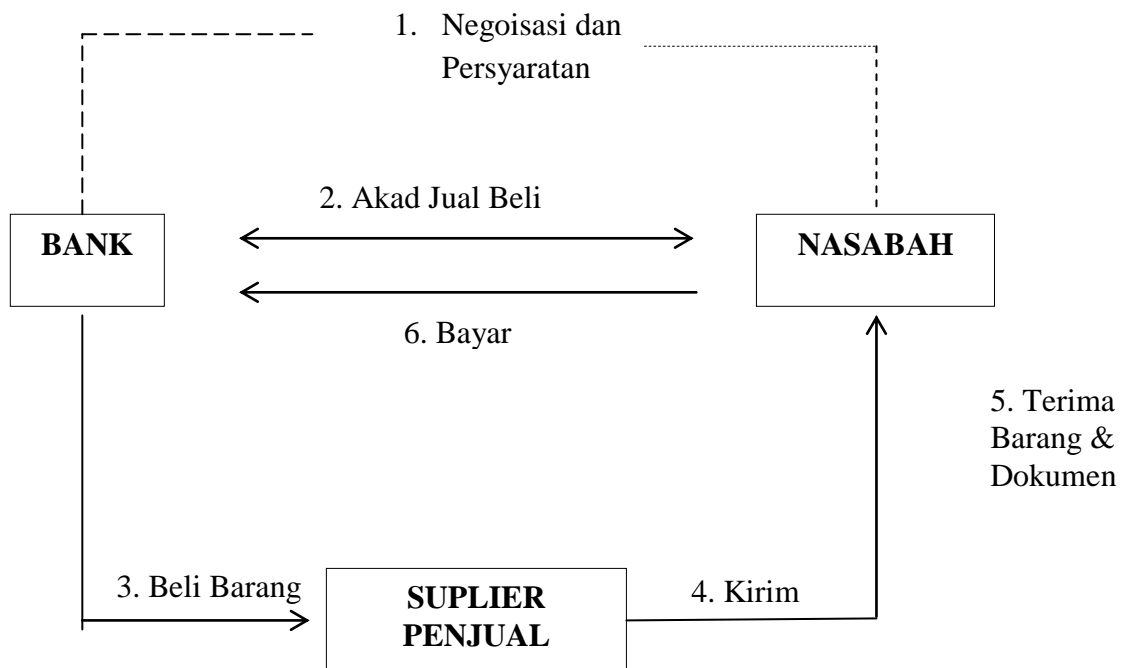
1. Default atau kelalaian; nasabah sengaja tidak membayar angsuran
2. Fluktuasi harga komperatif, ini terjadi bila harga suatu barang dipasar naik setelah bank membelinya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga beli tersebut.
3. Penolakan nasabah; barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab.
4. Dijual; karena ba'i al murabahah bersifat jual beli dengan utang, maka ketika kontrak ditandatangani barang tersebut menjadi milik nasabah. Nasabah bebas melakukan apapun terhadap aset miliknya tersebut, termasuk untuk menjualnya.

Berikutnya perbedaan Jual Beli (Murabahah) pada Bank Islam dan Kredit pada Bank Konvensional:

1. Pada bank konvensional, ada bantuan kredit untuk pengusaha. Untuk itu, bank menyerahkan uang kepada debitur untuk kelangsungan usahanya. Selanjutnya untuk pinjaman uang itu bank meminta bunga, yang dinyatakan dalam %.
2. Pada bank Islam, juga ada bantuan untuk pengusaha. Diantaranya, dengan pola jual/ murabahah. Caranya bank bukan menyerahkan uang, tetapi bank membelikan barang/jasa yang diperlukan untuk berusaha, kemudian bank menjualnya kembali kepada pengusaha. Untuk penjualan itu, maka bank mendapat laba, disebut margin yang dihitung dalam %.



### Skema Ba'i Al Murabahah



#### b. Salam

*Salam* adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu barang diserahkan secara tangguh sedangkan pembayaran dilakukan tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Sekilas transaksi ini mirip jual beli ijon, namun dalam transaksi ini kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti.<sup>65</sup>

Dalam praktek perbankan, ketika barang telah diserahkan kepada bank, maka bank akan menjualnya kepada rekanan nasabah atau kepada nasabah itu sendiri secara tunai atau secara cicilan. Harga jual yang ditetapkan bank adalah harga beli bank dari nasabah ditambah keuntungan. Dalam hal bank menjualnya secara tunai biasanya disebut pembiayaan talangan (*bridging financing*). Sedangkan dalam hal bank menjualnya secara cicilan, kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual-beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Umumnya transaksi ini diterapkan dalam pembiayaan barang yang belum ada seperti pembelian komoditi pertanian oleh bank untuk kemudian dijual kembali secara tunai atau secara cicilan.

<sup>65</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, Jakarta, Kencana-Prenadamedia Group, 2014.

Ketentuan umum *Salam*:

1. Pembelian hasil produksi harus diketahui spesifikasinya secara jelas seperti jenis, macam, ukuran, mutu dan jumlahnya. Misalnya jual beli 100 kg mangga harum manis kualitas "A" dengan harga Rp5000 / kg, akan diserahkan pada panen dua bulan mendatang.
2. Apabila hasil produksi yang diterima cacat atau tidak sesuai dengan akad maka nasabah (produsen) harus bertanggung jawab dengan cara antara lain mengembalikan dana yang telah diterimanya atau mengganti barang yang sesuai dengan pesanan.
3. Mengingat bank tidak menjadikan barang yang dibeli atau dipesannya sebagai persediaan (*inventory*), maka dimungkinkan bagi bank untuk melakukan akad *salam* kepada pihak ketiga (pembeli kedua) seperti bulog, pedagang pasar induk atau rekanan. Mekanisme seperti ini disebut dengan paralel *salam*.

Syarat-syarat jual beli salam antara lain sebagai berikut:

a) Modal Transaksi *Bai' As salam*

1) Modal harus diketahui

Barang yang akan di suplai harus diketahui jenis, kualitas, dan jumlahnya. Hukum awal mengenai pembayaran adalah bahwa ia harus dalam bentuk uang tunai.

2) Penerimaan pembayaran salam

Kebanyakan ulama mengharuskan pembayaran salam dilakukan di tempat kontrak. Hal tersebut dimaksudkan agar pembayaran yang diberikan oleh al muslim (pembeli) tidak dijadikan sebagai utang penjual. Lebih khusus lagi, pembayaran salam tidak bisa dalam bentuk pembebasan utang yang harus dibayar dari muslim ilaih (penjual). Hal ini adalah untuk mencegah praktik riba melalui mekanisme salam.

b) *Al muslim fiih* (Barang)

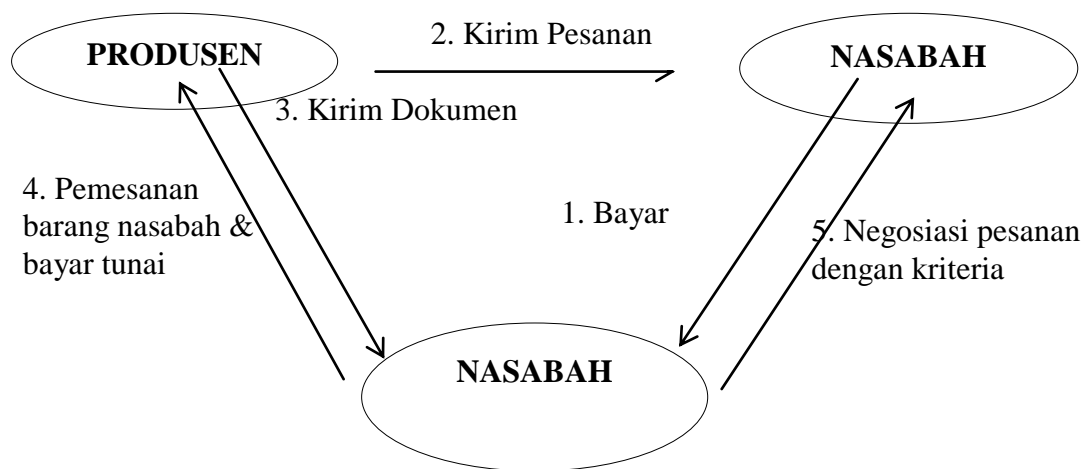
1) Harus spesifik dan dapat diakui sebagai utang

2) Harus bisa diidentifikasi secara jelas untuk mengurangi kesalahan akibat kurangnya pengetahuan tentang macam barang tersebut.

3) Penyerahan barang dilakukan dikemudian hari

- 4) Kebanyakan ulama mensyaratkan penyerahan barang harus ditunda pada suatu waktu kemudian, tetapi mazhab syafi'i membolehkan penyerahan segera.
- 5) Bolehnya menentukan tanggal waktu dimasa yang akan datang untuk penyerahan barang
- 6) Tempat penyerahan harus sesuai dengan kesepakatan pihak-pihak yang berkontrak.
- 7) Penggantian muslim fiih dengan barang lain pada bai' as salam tidak diperkenankan, barang tersebut tidak lagi milik si muslim alaih, tetapi sudah milik muslim (fidz dzimah).

#### **Skema Bai' As Salam**



#### **c. Istishna**

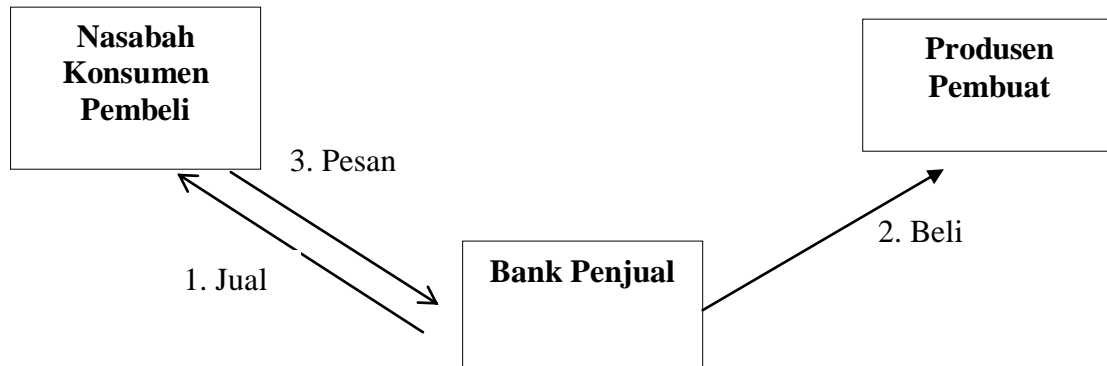
Produk *istishna* menyerupai produk *salam*, namun dalam *istishna* pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (termin) pembayaran. Skim *istishna* dalam bank syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi.

Ketentuan umum:

- 1) Spesifikasi barang pesanan harus jelas seperti jenis, macam ukuran, mutu dan jumlah. Harga jual yang telah disepakati dicantumkan dalam akad *istishna* dan tidak boleh berubah selama berlakunya akad. Jika terjadi perubahan dari kriteria

pesanan dan terjadi perubahan harga setelah akad ditandatangani, maka seluruh biaya tambahan tetap ditanggung nasabah.

### **Skema Bai' al Istishna'**



## **2. Pembiayaan dengan Prinsip Sewa (Ijarah)**

Pembiayaan dengan prinsip sewa ditujukan untuk mendapatkan jasa, dimana keuntungan bank ditentukan didepan dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang disewakan. Namun dalam beberapa kasus, prinsip sewa dapat pula disertai dengan opsi kepemilikan. Yang termasuk dalam kategori ini adalah *ijarah* dan *ijarah muntahia bit tamlik* (IMBT). *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui barang itu sendiri. *Ijarah* tanpa akad pemindahan kepemilikan sebagai *operational lease* dalam ilmu keuangan konvensional.

Sementara *ijarah muntahia bit tamlik* adalah pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa, diikuti dengan opsi kepindahan kepemilikan atas barang itu diakhir masa kontrak. Sehingga penyewa memiliki hak untuk memiliki barang yang disewa pada akhir masa kontrak penyewaan dan ini yang sering dikenal sebagai *financial lease* dalam ilmu keuangan konvensional. Pemindahan kepemilikan inilah yang membedakan antara *ijarah* dengan *ijarah muntahia bit tamlik*.<sup>66</sup>

Al *ijarah muntahia bit tamlik* memiliki banyak bentuk, bergantung pada apa yang telah disepakati kedua pihak yang berkontrak. Misalnya, al *ijarah* dan janji menjual, nilai

---

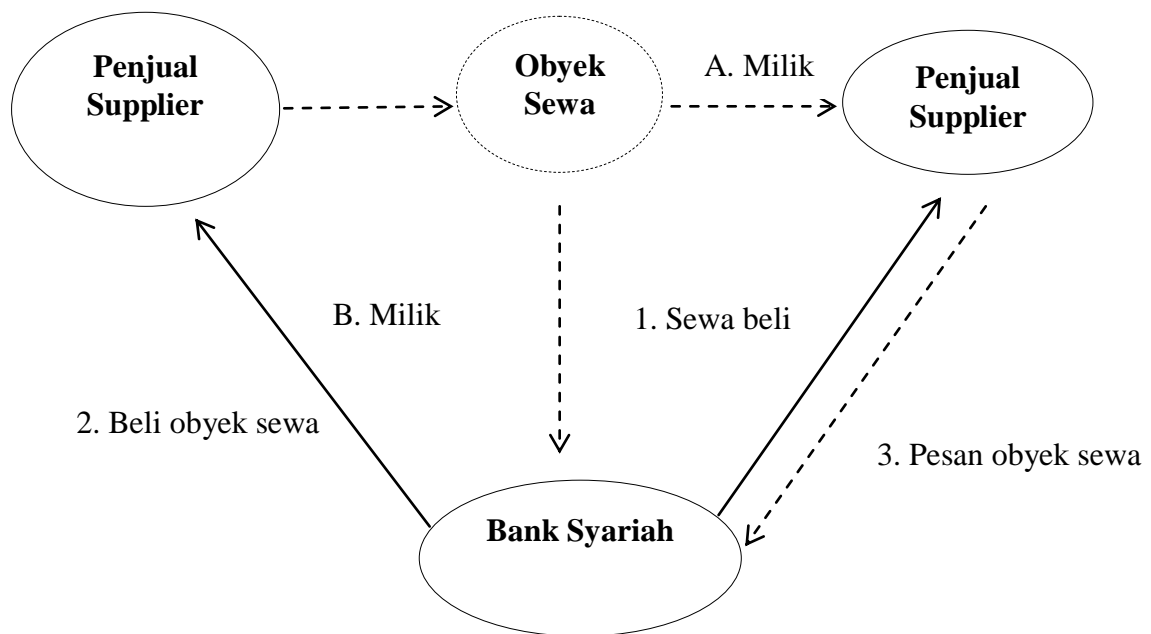
<sup>66</sup> Muhammad Nejatullah Siddiqi. *Bank Islam*. (Bandung. Penerbit Pustaka, 2002)

sewa yang mereka tentukan dalam al ijarah, harga barang dalam transaksi jual, dan kapan kepemilikan dipindahkan.

Adapun dasar hukum bagi ijarah adalah Al Quran surat Al Baqarah ayat 233:

“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. Al Baqarah :233).

#### Skema Al Ijarah



### 3. Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil (*Syirkah*)

Produk pembiayaan syariah yang berdasarkan prinsip bagi hasil adalah:

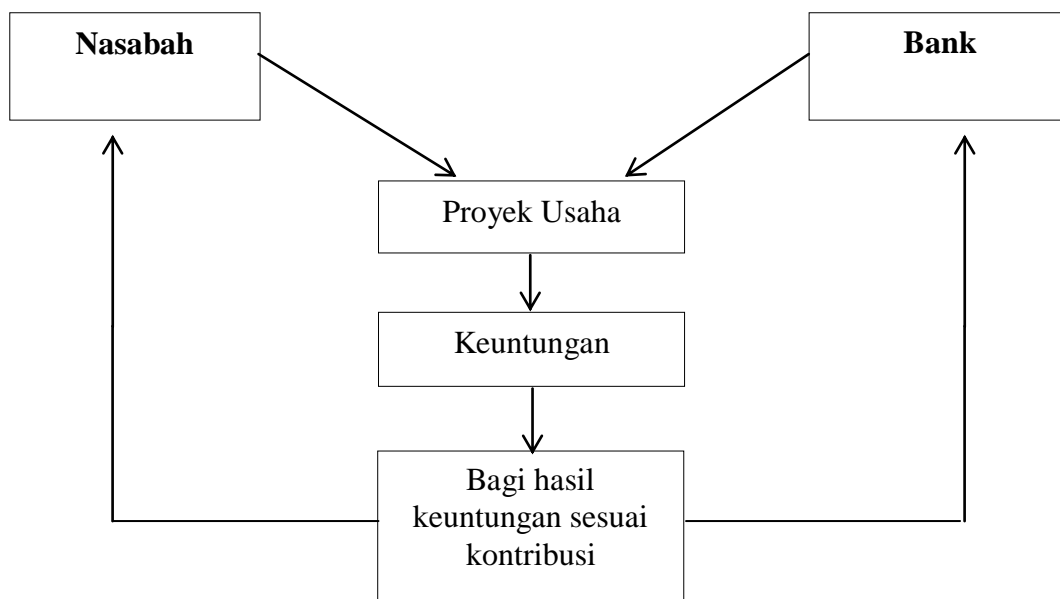
#### a. *Musyarakah*

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Transaksi musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang dimiliki secara bersama-sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak

atau lebih dimana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud dalam bahasa ekonomi hal ini dikenal sebagai joint venture.

Secara spesifik bentuk kontribusi dari pihak yang bekerjasama dapat berupa dana, barang perdagangan (*trading asset*), kewiraswastaan (*entrepreneurship*), kepandaian (*skill*), kepemilikan (*property*), peralatan (*equipment*), atau *intangible asset* (seperti hak paten atau *goodwill*), kepercayaan/reputasi (*credit worthiness*) dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang. Dengan merangkum seluruh kombinasi dari bentuk kontribusi masing-masing pihak dengan atau tanpa batasan waktu menjadikan produk ini sangat fleksibel.

#### Skema Musyarakah



Ketentuan umum:

Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek *musyarakah* dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek. Pemilik modal dipercaya untuk menjalankan proyek musyarakah tidak boleh melakukan tindakan seperti:

- 1) Menggabungkan dana proyek dengan harta pribadi.
- 2) Menjalankan proyek musyarakah dengan pihak lain tanpa izin pemilik modal lainnya.

- 3) Memberi pinjaman kepada pihak lain.
- 4) Setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan atau digantikan oleh pihak lain.
- 5) Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerjasama apabila:
  - Menarik diri dari perserikatan
  - Meninggal dunia
  - Menjadi tidak cakap hukum
- 6) Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan sedangkan kerugian dibagi sesuai dengan porsi kontribusi modal.
- 7) Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad. Setelah proyek selesai nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

**b. *Mudharabah***

Secara spesifik terdapat bentuk *musyarakah* yang populer dalam produk perbankan syariah yaitu *mudharabah*. *Mudharabah* adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (*shahibul maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi 100% modal dari *shahibul maal* dan keahlian dari *mudharib*.<sup>67</sup>

Transaksi jenis ini tidak mensyaratkan adanya wakil *shahibul maal* dalam manajemen proyek. Sebagai orang kepercayaan, *mudharib* harus bertindak hati-hati dan bertanggung jawab untuk setiap kerugian yang terjadi akibat kelalaian. Sedangkan sebagai wakil *shahibul maal* dia diharapkan untuk mengelola modal dengan cara tertentu untuk menciptakan laba optimal.

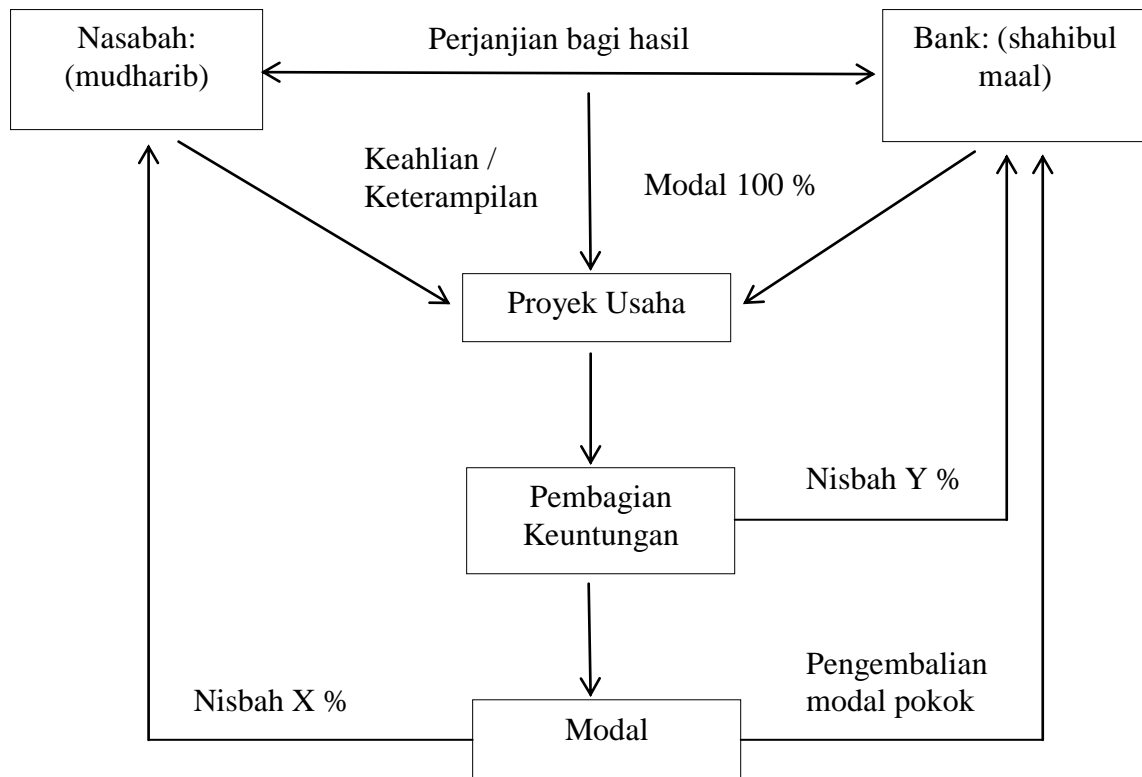
Perbedaan yang esensial dari *musyarakah* dan *mudharabah* terletak pada besarnya kontribusi atas manajemen dan keuangan atau salah satu diantara itu. Dalam *mudharabah* modal hanya berasal dari satu pihak, sedangkan dalam *musyarakah* modal berasal dari dua pihak atau lebih. *musyarakah* dan *mudharabah* dalam literatur fiqih berbentuk perjanjian kepercayaan (*uqud al amanah*) yang menuntut tingkat kejujuran yang tinggi dan

---

<sup>67</sup> Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah; dari Teori ke Praktek*, Jakarta, Gema Insani Press, 2001.

menjunjung keadilan. Karenanya masing-masing pihak harus menjaga kejujuran untuk kepentingan bersama dan setiap usaha dari masing-masing pihak untuk melakukan kecurangan dan ketidakadilan pembagian pendapatan betul-betul akan merusak ajaran Islam.

### Skema *Mudharabah*



### Ketentuan umum

- 1) Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal; harus diserahkan tunai, dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap, harus jelas tahapannya dan disepakati bersama.
- 2) Hasil dan pengelolaan modal pembiayaan *mudharabah* dapat diperhitungkan dengan dua cara:
  - (Perhitungan dari pendapatan proyek (*revenue sharing*))
  - (Perhitungan dari keuntungan proyek (*profit sharing*))
- 3) Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang disepakati. Bank selaku pemilik modal menanggung seluruh



kerugian kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah, seperti penyeleweng-an, kecurangan dan penyalahgunaan dana.

- 4) Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan/usaha nasabah. Jika nasabah cidera janji dengan sengaja misalnya tidak mau membayar kewajiban atau menunda pembayaran kewajiban, dapat dikenakan sanksi administrasi.

### ***Mudharabah Muqayyadah***

Karakteristik *mudharabah muqayadah* pada dasarnya sama dengan persyaratan di atas. Perbedaannya adalah terletak pada adanya pembatasan penggunaan modal sesuai dengan permintaan pemilik modal.

### **Soal Diskusi**

1. Jelaskan perbedaan kredit dengan pembiayaan?
2. Sebutkan dan jelaskan produk pembiayaan berdasarkan tujuan penggunaannya?
3. Gambarkan dan jelaskan skema pembiayaan murabahah?
4. Jelaskan perbedaan salam dan istishna'?
5. Jelaskan perbedaan pembiayaan dengan akad ijarah dan akan ijarah muntahiyah bittamlik?
6. Sebutkan dan jelaskan produk pembiayaan syariah yang berdasarkan prinsip bagi hasil?

## BAB VI. PRODUK JASA PERBANKAN SYARIAH

### Tujuan Intruksional:

1. Menjelaskan tentang pengertian jasa bank
2. Menjelaskan tentang jenis pelayanan jasa bank
3. Menjelaskan tentang jenis pelayanan jasa dalam bank syariah

### A. Pengertian Jasa Bank

Jasa dapat juga diartikan sebagai sesuatu yang diproduksi dan dikonsumsi secara simultan. Jadi, jasa tidak pernah ada dan hasilnya dapat dilihat setelah terjadi. Misalnya: bila Anda potong rambut, jasa dikonsumsi ketika diproduksi, tetapi hasil jasa tampak dan akan berakhir beberapa waktu. Kesenjangan produksi dan konsumsi merupakan perbedaan yang penting. Jasa tidak dapat diproduksi di satu tempat dan dikirim ke tempat lain seperti barang, juga tidak dapat disimpan. Semua karakteristik ini dapat dihubungkan dengan kesenjangan produksi dan konsumsi.<sup>68</sup>

Jasa bank adalah semua aktivitas bank, baik yang secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan tugas dan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi, yaitu lembaga yang memperlancar terjadinya transaksi perdagangan, sebagai lembaga yang memperlancar peredaran uang serta sebagai lembaga yang memberikan jaminan kepada nasabahnya.<sup>69</sup>

Pelayanan jasa bank merupakan produk jasa bank yang diberikan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhannya. Bank menawarkan produk jasa dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kepada nasabah bank atau pihak lain yang memerlukannya. Dengan memberikan pelayanan jasa bank maka bank akan memperoleh pendapatan. Pendapatan yang diperoleh bank yang berasal dari pendapatan atas produk jasa disebut dengan *fee based income*.<sup>70</sup>

Semakin ketatnya persaingan antar bank, membuat bank berlomba-lomba untuk memberikan pelayanan jasa yang sangat baik. Pelayanan jasa bank akan menimbulkan dampak positif terhadap perkembangan usaha bank. Pelayanan jasa yang umum diberikan oleh bank syariah menggunakan berbagai jenis akad sesuai dengan karakteristik masing-masing jasa bank syariah.

---

<sup>68</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Ed. 1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 41.

<sup>69</sup> Ahmad Supriyadi, *Perbankan Syari'ah*, (STAIN Kudus, 2011), hal. 134

<sup>70</sup> Ismail, *perbankan syariah*, (Jakarta: kencana, 2011), hal. 193

Tujuan pemberian jasa-jasa bank ini adalah untuk mendukung dan memperlancar kedua kegiatan utamanya, yaitu kegiatan usaha menghimpun dana dari dan kepada masyarakat. Semakin lengkap jasa bank yang diberikan, maka semakin baik, hal ini disebabkan jika nasabah hendak melakukan suatu transaksi perbankan, cukup berhenti disatu bank saja. Demikian pula sebaliknya jika jasa bank yang diberikan kurang lengkap, maka nasabah terpaksa untuk mencari bank lain yang menyediakan jasa yang mereka butuhkan.

## **B. Jenis Pelayanan Jasa Bank**

Jenis pelayanan jasa dalam bank umum adalah:

### **1. Transfer (jasa pengiriman uang)**

*Transfer* adalah suatu kegiatan jasa bank untuk memindahkan sejumlah dana tertentu sesuai dengan perintah si pemberi amanat yang ditujukan untuk keuntungan seseorang yang ditunjuk sebagai penerima *transfer*. Dalam arti lain, *transfer* adalah kiriman uang yang diterima bank termasuk hasil inkaso yang ditagih melalui bank tersebut yang akan diteruskan kepada bank lain untuk dibayarkan kepada nasabah (*transfer*). Baik *transfer* uang keluar atau masuk akan mengakibatkan adanya hubungan antar cabang yang bersifat timbal balik, artinya bila satu cabang mendebet cabang lain mengkredit.<sup>71</sup>

Jasa pengiriman uang ini merupakan salah satu kegiatan usaha industri perbankan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan pasal 6 huruf e Undang Undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 10 tahun 1998, yaitu: bank umum dapat melakukan jasa pengiriman uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabahnya.

Pengiriman uang atau *transfer* lewat bank akan memberikan keuntungan bagi nasabah, jika dibandingkan dengan jasa pengiriman lainnya. Seperti pengiriman uang lebih cepat, aman sampai tujuan, pengiriman dapat dilakukan lewat telepon melalui pembayaran rekening dan prosedur mudah dan cepat. Sedangkan bank akan memperoleh biaya kirim, biaya provisi dan komisi.

---

<sup>71</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: kencana, 2011), hal. 196

## 2. Inkaso

Inkaso adalah pemberian kuasa pada bank oleh nasabah (baik perusahaan maupun perorangan) untuk melakukan penagihan terhadap surat-surat berharga (baik yang berdokumen maupun yang tidak berdokumen) yang harus dibayar setelah pihak yang bersangkutan (pembayar atau tertarik) berada ditempat lain (dalam atau luar negeri) menyetujui pembayarannya. Dalam arti lain, Inkaso merupakan kegiatan jasa bank untuk melakukan amanat dari pihak ke tiga berupa penagihan sejumlah uang kepada seseorang atau badan tertentu di kota lain yang telah ditunjuk oleh pemberi amanat.

Warkat yang diinkasokan sama halnya dengan warkat kliring antara lain: cek, bilyet giro, dan warkat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Hasil inkaso atau tagihan yang dilakukan oleh bank dengan menggunakan jasa inkaso memakan waktu yang kurang lebih lima hari kerja.

Bagi pengusaha yang sering kali memerlukan dana segera, jangka waktu penagihan melalui transaksi inkaso di nilai sangat lama. Melihat dari kondisi lambatnya hasil inkaso tersebut, maka BI memberikan jasa yang dapat menggantikan inkaso yaitu *intercity kliring*.

### a. Warkat Inkaso

- 1) *Warkat inkaso* tanpa lampiran yaitu warkat-warkat inkaso yang tidak dilampirkan dengan dokumen-dokumen apapun seperti cek, bilyet giro, wesel, dan surat berharga lainnya.
- 2) *Warkat Inkaso* dengan lampiran yaitu warkat-warkat inkaso yang dilampirkan dengan dokumen-dokumen lainnya seperti kwitansi, faktur, polis asuransi dan dokumen-dokumen penting.

### b. Jenis Inkaso

- 1) *Inkaso Masuk* merupakan kegiatan yang masuk atas warkat yang telah diterbitkan oleh nasabah sendiri. Dalam kegiatan inkaso masuk, bank hanya memeriksa kecukupan dari nasabahnya yang telah menerbitkan warkat kepada pihak ketiga.
- 2) *Inkaso Keluar*, Merupakan kegiatan untuk menagih suatu warkat yang telah diterbitkan oleh nasabah bank lain. Di sini bank menerima amanat

dari nasabahnya sendiri untuk menagih warkat tersebut kepada seseorang nasabah bank lain di kota lain.

### **3. *Safe Deposit Box***

Layanan *safe deposit box* adalah jasa penyewaan penyimpanan harta atau surat-surat berharga yang dirancang secara khusus dari bahan baja dan ditempatkan dalam ruang khasanah yang kokoh tahan bongkar dan tahan api untuk memberikan jasa aman pada penggunanya. Kondisi ketidakpastian selalu menambah rasa khawatir terutama menyangkut barang-barang yang bernilai harganya, dalam menentukan pilihan tempat yang aman tentunya harus memilih tempat yang terpercaya.

Penyediaan kotak dan tempat penyimpanan barang dan surat surat berharga ini merupakan salah satu kegiatan usaha bank umum sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 6 huruf h Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menyatakan bahwa usaha bank umum termasuk menyediakan tempat untuk penyimpanan barang dan surat berharga.

Disamping bank umum, bank indonesia juga melakukan kegiatan penyimpanan sekuritas, surat berharga dan barang berharga dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas bank indonesia. Oleh karena itu, diadakan ketentuan jenis barang dan surat berharga yang dapat disimpan, pihak yang dapat menyimpan dan mekanisme penyimpanan pada bank indonesia sebagaimana diatur dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 7/16/PBI/2005 tentang penyimpanan sekuritas, surat dan barang berharga. Ketentuan tata cara penyimpanan sekuritas, surat dan barang berharga sudah diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/21/DPM tanggal 1 juli 2005 tentang perihal tata cara penyimpanan sekuritas, surat dan barang berharga pada bank indonesia.

### **4. *Letter of Credit***

Layanan *Letter of Credit* atau dalam bahasa Indonesia disebut Surat Kredit Berdokumen merupakan salah satu jasa yang ditawarkan bank dalam rangka pembelian barang, berupa penangguhan pembayaran pembelian oleh pembeli sejak LC dibuka sampai dengan jangka waktu tertentu sesuai perjanjian. Berdasarkan pengertian tersebut, tipe

perjanjian yang dapat difasilitasi LC terbatas hanya pada perjanjian jual – beli, sedangkan fasilitas yang diberikan adalah berupa penangguhan pembayaran.<sup>72</sup>

Perdagangan merupakan suatu aktivitas yang telah lama ada dimuka bumi ini. Transaksi perdagangan melibatkan sekurang-kurangnya dua pihak yaitu penjual dan pembeli. Apabila perdagangan ini dilakukan secara langsung dimana pihak penjual dan pembeli bertemu dan melakukan negoisasi tentang jenis barang, harga, cara pengiriman, pembayaran dan lainnya. Maka tidak ada kesulitan dalam melakukan jual beli ini. Dalam kondisi dimana penjual dan pembeli tidak secara langsung bertemu dan bernegoisasi maka permasalahan akan timbul.

Beberapa permasalahan yang mungkin akan terjadi antara lain tentang kualitas barang yang dipesan, cara pengiriman barang serta waktu pengirimannya, dan cara pembayaran atas pembelian barang tersebut. Pembeli dan penjual berada dalam wilayah yang berbeda. Misalnya dinegara yang berbeda maka resiko keduanya sangat mungkin terjadi. Pembeli membayar uang muka kemudian barang baru dikirim setelah pembayaran uang muka diterima oleh penjual. Berarti resiko ada di pembeli.

Resiko atas transaksi perdagangan luar negri bisa diminimalkan dengan menggunakan cara pembayaran yang tepat, yang risikonya sangat kecil. Cara pembayaran tersebut dengan *letter of credit*. Cara pembayaran ini akan menjamin pembayaran yang diinginkan penjual atas pengiriman barang serta menjamin pembeli bahwa pembeli akan menerima barang sesuai dengan pesanan baik jumlah maupun kualitas barang yang diinginkan.

## **5. Jasa Kliring (*Clearing*)**

Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 16 dan pasal 17 UUBI, Bank Indonesia mempunyai wewenang mengatur sistem kliring antar bank dalam mata uang rupiah atau valuta asing. Disamping dilakukan oleh bank indonesia, penyelenggaraan kegiatan kliring antar bank dapat dilakukan oleh pihak lain dengan persetujuan bank Indonesia. Berkenaan dengan hal tersebut, bank indonesia telah memberikan sistem kliring yang merupakan pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antar peserta baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah peserta yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu.

---

<sup>72</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2014) hal. 437

Layanan kliring merupakan jasa perbankan yang diberikan dalam rangka penagihan warkat antar bank yang berasal dari wilayah kliring yang sama. kliring merupakan sarana atau cara perhitungan utang piutang dalam bentuk surat berharga atau surat dagang dari suatu bank peserta yang diselenggarakan oleh bank indonesia atau pihak lain yang di tunjuk.

Warkat adalah alat pembayaran bukan tunai yang diperhitungkan melalui kliring atas beban atau untung rekening nasabah atau bank yang digunakan dalam penyelenggaraan kliring. dalam ketentuan pasal 14 peraturan Bank Indonesia Nomor 7/18/PBI/2005 tentang warkat yang dapat dilakukan dalam transaksi kliring antara lain: cek, bilyet giro, wesel, nota debet dan lainnya. Proses penagihan warkat melalui kliring ini pada umumnya memakan waktu satu hari.

Ketentuan teknis pembakuan jenis warkat yang dapat dipertukarkan atau diperhitungkan dalam kegiatan penyelenggaraan kliring lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/52/DASP tanggal 31 Desember 2004 perihal warkat dan dokumen kliring serta pencetakannya pada perusahaan percetakan warkat dan dokumen kliring.<sup>73</sup>

Kemudian Bank Indonesia melakukan penyempurnaan atas penyelenggaraan kliring diatur dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 1/3/PBI/1999 tentang penyelenggaraan kliring lokal dan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/14/PBI/2000 dengan menetapkan ketentuan mengenai Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/18/PBI/2005 tentang Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia.

Adapun jenis sistem kliring yang dapat digunakan dalam kegiatan penyelenggaraan kliring antara lain:

- a. Sistem kliring secara manual
- b. Sistem kliring semi otomasi atau kliring lokal
- c. Sistem kliring otomasi
- d. Sistem kliring elektronik

Penyelenggaraan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia terdiri dari dua sub sistem kliring yaitu Kliring Debet dan Kliring Kredit dan proses penyelesaian kliring

---

<sup>73</sup> Djoni s. Gozali, *Hukum Perbankan*, (Jakarta: Sinar Grapika, 2010), hal. 383

dilakukan dalam dua tahap yaitu Kliring penyerahan dan Kliring retur dan proses penyelesaian warkat-warkat kliring di lembaga kliring antara lain kliring keluar, kliring masuk dan pengembalian kliring.

Jadwal penyelenggaraan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/27/DASP tanggal 22 juli 2005 tentang jadwal penyelenggaraan sistem kliring nasional indonesia. Dan biaya penyelenggaraan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/28/DASP tanggal 22 juli 2005 mengenai ketentuan jenis dan besarnya biaya serta perhitungan dan pembebanan biaya dalam penyelenggaraan sistem kliring nasional indonesia.

Tujuan penyelenggaraan kliring oleh bank indonesia adalah:

- a. Memperluas dan mendukung kelancaran sistem pembayaran secara giral (bukan tunai).
- b. Membantu dan mempercepat penyelesaian perhitungan seketika mengenai utang piutang baik atas nama bank maupun nasabah.
- c. Memberikan pelayanan kepada nasabah.

## **6. Bank Card (kartu kredit)**

*Bank card* atau lebih dikenal dengan sebutan kartu kredit atau juga kartu plastik, kartu ini dapat digunakan atau dibelanjakan di berbagai tempat hiburan dan tempat pembelanjaan. Kartu ini juga dapat digunakan untuk mengambil uang tunai di ATM-ATM yang tersebar diberbagai tempat-tempat yang strategis. Kepada pemegang kartu kredit dikenakan biaya iuran yang besarnya dikeluarkan tergantung dari bank yang mengeluarkannya.

Sesuai dengan peraturan bank indonesia nomor 7/52/PBI/2005 tentang penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu sebagaimana diubah dengan peraturan bank indonesia nomor 10/8/PBI/2008, bahwa penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu (APMK) tidak hanya dilakukan oleh bank, melainkan dapat pula dilakukan oleh lembaga selain bank, baik bertindak sebagai prinsipal dan penerbit. Kemudian dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/59/DASP tanggal 30 Desember 2005 perihal tata cara penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu , diantaranya mengenai ketentuan dan



persyaratannya sebagai AMPK yaitu prinsipal, penerbit, acquirer. Dan berkenaan dengan penerapan prinsip perlindungan nasabah dalam penyelenggaraan kegiatan APMK, maka Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/60/DASP tanggal 30 Desember 2005 perihal prinsip perlindungan nasabah dan kehati-hatian, serta peningkatan keamanan dalam penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu.

Alat pembayaran dengan menggunakan kartu tersebut dapat berupa:

- a) Kartu kredit
- b) Kartu *Automated Teller Machine* (ATM)
- c) Kartu debet
- d) Kartu prabayar
- e) Kartu prabayar *singel-purpose*
- f) Kartu prabayar *multi-purpose*

Adapun jenis-jenis bank card yang ada saat ini, yaitu sebagai berikut:

- a) *Charge card*
- b) *Credit card*
- c) *Debet card*
- d) *Smart card*
- e) *Private label card*

## **7. Bank Garansi**

Layanan bank garansi merupakan jaminan bank yang diberikan kepada nasabah dalam rangka membiayai suatu usaha dan lainnya. Dengan jaminan bank ini si pengelola usaha memperoleh fasilitas untuk melaksanakan kegiatannya dengan pihak lain. Tentunya sebelum jaminan bank dikeluarkan bank terlebih dahulu mempelajari kredibilitas nasabahnya.

Bank garansi merupakan salah satu bentuk peminjaman utang dalam bisnis perbankan, yang merupakan salah satu bentuk layanan jasa bank kepada masyarakat yang menjadi nasabahnya. Dalam bank garansi ini, bank mengikat diri untuk kepentingan orang guna menjamin atau menjadi penjamin bagi nasabahnya. Pada prinsipnya bank garansi merupakan perjanjian penjaminan utang, karenanya ketentuan-ketentuan *borgtocht*

sebagaimana diatur dalam ketentuan kitab undang-undang hukum perdata berlaku pula bagi bank garansi.

Selain merujuk kepada ketentuan-ketentuan perjanjian penanggungan sebagaimana diatur dalam kitab undang-undang hukum perdata, penerbitan bank garansi berdasarkan pula kepada surat keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/88/KEP/DIR dan surat Edaran Bank Indonesia Nomor 23/7/UKU masing-masing tanggal 18 maret 1991 tentang pemberian garansi oleh bank, yang mencabut dan menggantikan ketentuan yang sama sebagaimana termuat dalam surat keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 11/10/KEP/DIR dan surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/11/UPPB masing-masing tanggal 28 maret 1979 tentang pemberian jaminan oleh bank dan pemberian jaminan oleh lembaga keuangan bukan bank.<sup>74</sup>

## **8. Perdagangan valuta asing (valas)**

Istilah lain dari perdagangan valuta asing adalah pasar valuta asing (*foreign exchange dealing*), yaitu pertukaran suatu mata uang dengan mata uang lainnya. Bukan sebatas *money changer*, lebih luas dari itu. Pasar valuta asing adalah suatu pasar dimana surat-surat berharga jangka pendek (umumnya kurang dari satu tahun) diperdagangkan. Surat-surat berharga tersebut tidak selalu dalam valuta yang sama. Valuta yang diperdagangkan adalah valuta yang berbeda satu sama lainnya.

Adapun jenis-jenis transaksi dalam perdagangan valuta asing adalah sebagai berikut:

- a. Transaksi *spot* (transaksi tunai)
- b. Transaksi *forward* (transaksi berjangka/tunggak)
- c. Transaksi *swap* (transaksi barter)

Dalam rangka kesinambungan peraturan terhadap pedagang valuta asing yang meliputi kegiatan pemberian izin usaha, pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh bank indonesia sejak tahun 1967 berdasarkan peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1965 tentang tata cara penggunaan, pembebanan, pemindahan hak atas devisa yang tidak diharuskan untuk diserahkan kepada dana devisa (devisa pelengkap), dan upaya melindungi kepentingan publik agar tidak terjadi distorsi dalam kegiatan perekonomian nasional khususnya transaksi jual beli uang kertas asing, Bank Indonesia mengeluarkan

---

<sup>74</sup> Djoni s. Gozali, *Hukum Perbankan*, (Jakarta: Sinar Grapika, 2010), hal. 383

peraturan Bank Indonesia Nomor 9/11/PBI/2007 tentang pedagang valuta asing, yang mencabut dan mengganti peraturan Bank Indonesia Nomor 6/1/PBI/2004 tentang pedagang valuta asing.

Ketentuan teknis mengenai tata cara perizinan dan pelaporan bagi bank umum dan BPR dan BPRS yang melakukan kegiatan usaha sebagai pedagang valuta asing, lebih lanjut diatur dalam:

- a. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/36/DPNP tanggal 19 desember 2007 perihal tata cara perizinan dan pelaporan bagi bank umum yang melakukan kegiatan usaha sebagai pedagang valuta asing.
- b. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/38/DPBPR tanggal 28 desember 2007 perihal tata cara perizinan dan pelaporan bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah yang melakukan kegiatan usaha sebagai pedagang valuta asing.

## **9. *Payment***

Layanan payment merupakan jasa yang diberikan oleh bank dalam melaksanakan pembayaran untuk kepentingan nasabahnya. Bank akan mendapatkan *fee* atas pelayanan jasa yang diberikan

Beberapa pelayanan jasa (*payment*) yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya antara lain:

- a. Pembayaran telepon
- b. Pembayaran rekening listrik
- c. Pembayaran pajak
- d. Pembayaran uang kuliah
- e. Pembayaran gaji

## **10. *e-banking***

Layanan ini merupakan layanan perbankan dengan menggunakan fasilitas *mobile banking* SMS dan menggunakan *internet banking*. Kedua fasilitas tersebut akan di jelaskan di bawah ini:

- a. *mobile banking* adalah layanan perbankan berbasiss teknologi seluler yang bisa di akses melalui ponsel dengan fasilitas ini nasabah dapat bertransaksi melalui ponsel

dengan mengirimkan SMS dan semua transaksi dilindungi dengan PIN pribadi yang diberikan kepada nasabah.

- b. *Internet banking* adalah layanan perbankan melalui internet yang dapat diakses dimana saja tanpa batas waktu dan negara.

### C. Jenis pelayanan jasa dalam Bank Syariah

#### 1. *Al-Wakalah* (Perwakilan)

Wakalah merupakan akad antara dua pihak yang mana pihak satu menyerahkan, mendelegasikan, mewakilkan atau memberikan mandat kepada pihak lain, dan pihak lain menjalankan amanat sesuai permintaan pihak yang mewakilkan. Wakalah dapat diartikan sebagai pelimpahan kekuasaan seseorang kepada orang lain dalam menjalankan amanat tertentu dalam aplikasi perbankan, bank syariah sebagai penerima mandat, mendapat kuasa dari nasabah untuk mewakilkan urusannya.<sup>75</sup>

*Wakalah* dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukuan L/C, inkaso dan transfer uang.

Syarat dan kriteria *wakalah* dalam aplikasi perbankan adalah sebagai berikut:

- a. Bank dan nasabah yang dicantumkan dalam akad pemberian kuasa harus cakap hukum. Khusus untuk pembukaan L/C, apabila dana nasabah ternyata tidak cukup, maka penyelesaian L/C (*settlement L/C*) dapat dilakukan dengan pembiayaan *murabahah*, *salam*, *ijarah*, *mudharabah*, atau *musyarakah*.
- b. Kelalaian dalam menjalankan kuasa menjadi tanggung jawab bank, kecuali kegagalan karena *force majeure* menjadi tanggung jawab nasabah. Apabila bank yang ditunjuk lebih dari satu, maka masing-masing bank tidak boleh bertindak sendiri-sendiri tanpa musyawarah dengan bank yang lain, kecuali dengan seizin nasabah.
- c. Tugas, wewenang dan tanggung jawab bank harus jelas sesuai kehendak nasabah bank. Setiap tugas yang dilakukan harus mengatasnamakan nasabah dan harus dilaksanakan oleh bank. Atas pelaksanaan tugasnya tersebut, bank mendapat pengganti biaya berdasarkan kesepakatan bersama.

---

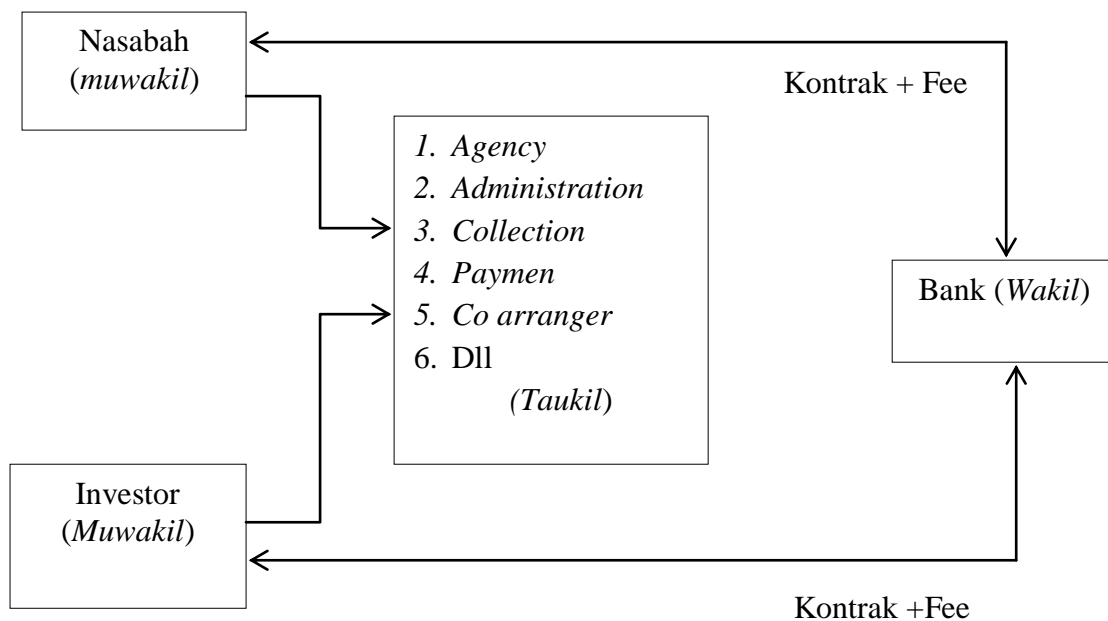
<sup>75</sup> Adiwirman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 107

- d. Pemberian kuasa berakhir setelah tugas dilaksanakan dan disetujui bersama antara nasabah dengan bank.

Adapun jenis-jenis pelayanan jasa yang diberikan bank syariah menggunakan akad wakalah antara lain:

- a. Kiriman uang (*Transfer*)
- b. Kliring (*clearing*)
- c. *Incaso*
- d. *Intercity clearing*
- e. *Letter of credit*
- f. *Payment*

#### Skema Wakalah



## 2. Al-kafalah

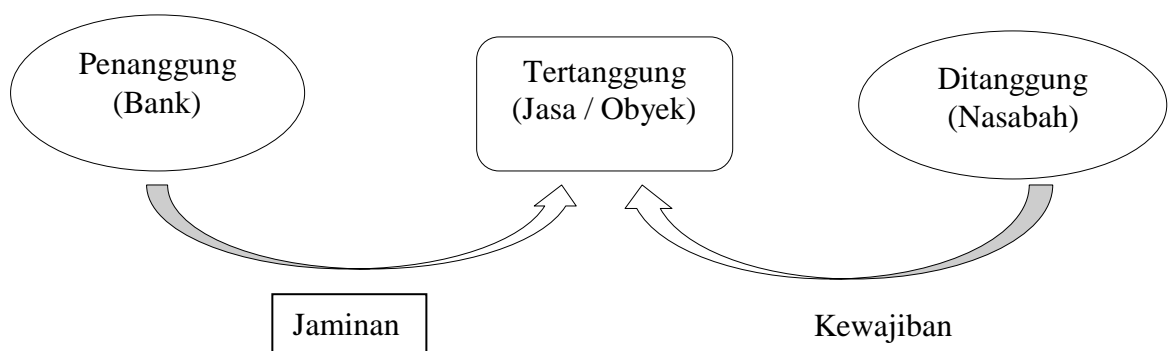
Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, kafalah juga berarti mengalihkan tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Kafalah memiliki beberapa macam yaitu :

- a. *Kafalah bin nafs* : merupakan akad memberikan jaminan atas diri (*personal guarantee*).
- b. *Kafalah bil maal* : merupakan jaminan pembayaran barang atau pelunasan utang.
- c. *Kafalah bit taslim*: merupakan jaminan pengembalian atas barang yang disewa, pada waktu masa sewa berakhir.
- d. *Kafalah al munjazah* : merupakan jaminan mutlak yang tidak dibatasi oleh jangka waktu dan untuk kepentingan/ tujuan tertentu.
- e. *Kafalah al muallaqah* : merupakan penyederhanaan dari kafalah al munjazah, baik oleh industri perbankan maupun asuransi.

Dalam akad kafalah diperjanjikan bahwa seseorang memberikan penjaminan kepada seorang kreditor yang memberikan utang kepada seorang debitur, yang mana pihak yang penjamin memberikan jaminan bahwa utang yang dilakukan oleh debitur kepada kreditor akan dilunasi oleh penjamin bila debitur wanprestasi. Pemberi jaminan disebut *kafil* dan yang dijamin disebut *makful*.

Produk *al-kafalah* yang diberikan oleh bank syariah dalam bentuk bank garansi. Bank garansi merupakan jasa yang diberikan oleh bank dalam rangka memberikan jaminan kepada nasabah. Jaminan ini dapat diberikan oleh bank kepada nasabah dalam mengikuti tender atas penawaran pekerjaan dari pemberi kerja, serta untuk mengerjakan sesuatu untuk kepentingan pihak lain, dan berbagai macam jaminan bank lainnya. Dengan mendapat bank garansi, pihak yang memberikan pekerjaan akan merasa aman. Pemberi kerja tidak perlu menagihkan kepada pihak terjamin, tetapi dapat menagihkan kepada bank yang menerbitkan bank garansi, apabila terdapat wanprestasi dari pihak yang terjamin.

#### Skema Kafalah



Garansi bank dapat diberikan dengan tujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Bank dapat mempersyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai *rahn*. Bank dapat pula menerima dana tersebut dengan prinsip *wadi ah*. Bank mendapatkan pengganti biaya atas jasa yang diberikan.

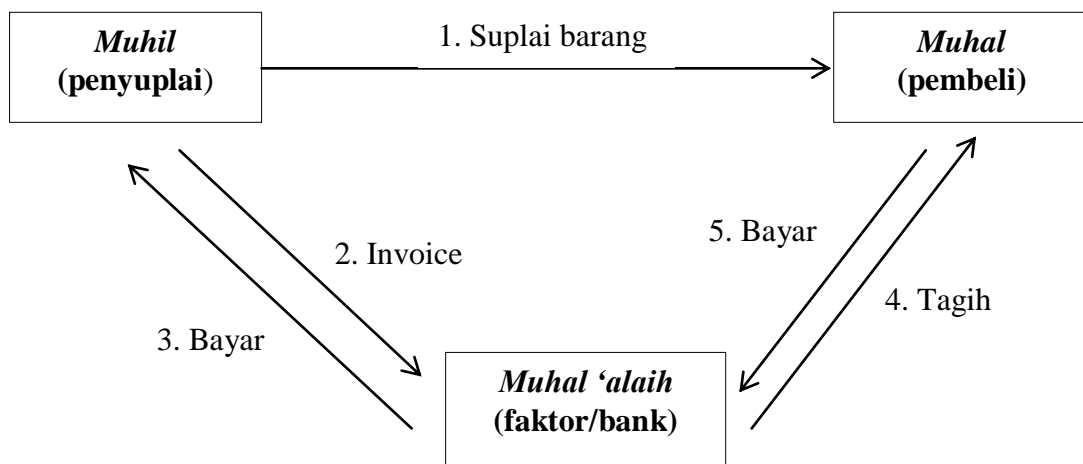
### 3. *Hiwalah* (Alih Utang-Piutang)

*Hiwalah* adalah transaksi mengalihkan utang piutang. Dalam praktek perbankan syariah fasilitas *hiwalah* lazimnya untuk membantu *supplier* mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan piutang. Untuk mengantisipasi resiko kerugian yang akan timbul, bank perlu melakukan penelitian atas kemampuan pihak yang berutang dan kebenaran transaksi antara yang memindahkan piutang dengan yang berutang. Katakanlah seorang *supplier* bahan bangunan menjual barangnya kepada pemilik proyek yang akan dibayar dua bulan kemudian. Karena kebutuhan *supplier* akan likuiditas, maka ia meminta bank untuk mengambil alih piutangnya. Bank akan menerima pembayaran dari pemilik proyek.

Beberapa produk jasa bank syariah yang menggunakan akad *hiwalah* antara lain:

- factoring* atau anjak piutang, dimana para nasabah yang memiliki piutang kepada pihak ketiga memindahkan piutang itu kepada bank, bank lalu membayar piutang tersebut dan bank menagihnya dari pihak ketiga.
- Post dated check*, dimana bank bertindak sebagai juru tagih, tanpa membayarkan dahulu piutang tersebut.
- Bill discounting* pada dasarnya sama dengan hawalah namun dalam *bill discounting* nasabah harus membayar *fee*.

#### Skema Hawalah



#### 4. *Ar-Rahn*

*Rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis dan nilai jual sekurang-kurangnya serta dengan pinjaman yang diterima menurut harga pasar. Dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Tujuan akad *rahn* adalah memberikan jaminan pembayaran kepada bank dalam memberikan pembiayaan.

Produk *rahn* dalam perbankan dapat dipakai sebagai produk pelengkap sebagai jaminan dalam pembiayaan, ataupun sebagai produk tersendiri atau yang biasa dikenal dengan gadai. *Ar-rahn* atau *rahn* merupakan perjanjian penyerahan barang yang digunakan sebagai agunan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan. Beberapa ulama mendefinisikan *rahn* sebagai harta yang oleh pemiliknya digunakan sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat. *Rahn* juga diartikan sebagai jaminan terhadap utang yang mungkin dijadikan sebagai pembayar kepada pemberi utang baik seluruhnya atau sebagian apabila pihak yang berutang tidak mampu melunasinya.

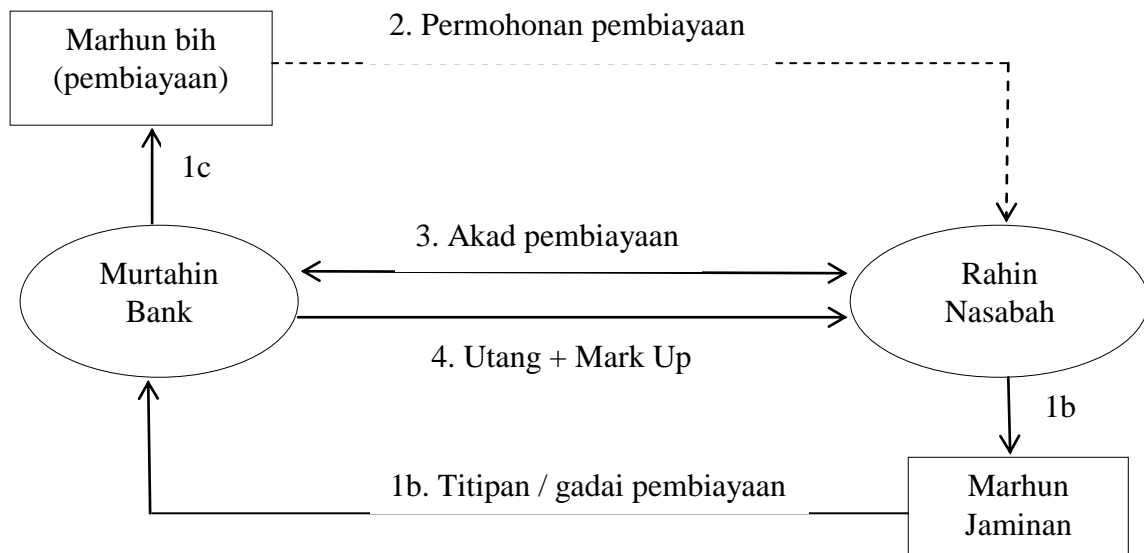
Barang yang digadaikan wajib memenuhi kriteria:

- a. Milik nasabah sendiri
- b. Jelas ukuran, sifat, dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai riil pasar
- c. Dapat dikuasai namun tidak boleh dimanfaatkan oleh bank. Atas izin bank, nasabah dapat menggunakan barang tertentu yang digadaikan dengan tidak mengurangi nilai dan merusak barang yang digadaikan. Apabila barang yang digadaikan rusak atau cacat, nasabah harus bertanggung jawab.

Apabila nasabah wanprestasi, bank dapat melakukan penjualan barang yang digadaikan atas perintah hakim. Nasabah mempunyai hak untuk menjual barang tersebut dengan seizin bank. Apabila hasil penjualan melebihi kewajibannya, kelebihan tersebut menjadi milik nasabah. Dalam hal hasil penjualan tersebut lebih kecil daripada kewajibannya, maka nasabah harus menutupi kekurangannya.



### Skema *Rahn* (Gadai)



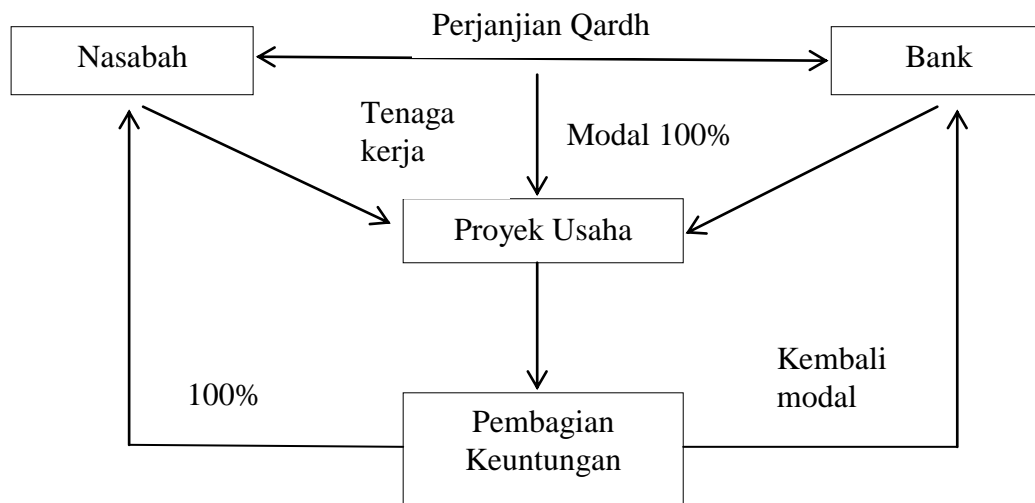
### 5. *Al-qardh*

Merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah dalam membantu pengusaha kecil. Pembiayaan qard diberikan tanpa adanya imbalan. *Al-qard* juga merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat di tagih atau diminta kembali sesuai dengan jumlah uang yang dipinjamkan, tanpa adanya imbalan atau tambahan yang diminta oleh bank syariah.

Adapun aplikasi *qard* dalam perbankan biasanya dalam empat hal, yaitu:

- Sebagai pinjaman talangan haji, dimana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji. Nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatan haji.
- Sebagai pinjaman tunai (*cas advanced*) dari produk kartu kredit syariah, dimana nasabah diberi keleluasan untuk menarik uang tunai milik bank melalui ATM. Nasabah akan mengembalikannya sesuai waktu yang ditentukan.
- Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, dimana menurut perhitungan bank akan memberatkan sipengusaha bila diberikan pembiayaan dengan skema jual beli, ijarah dan bagi hasil.
- Sebagai pinjaman kepada pengurus bank, dimana bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank. Pengurus bank akan mengembalikan dana pinjaman itu secara cicilan melalui pemotongan gajinya.

### Skema Qardh



### 6. *As-sharf*

Merupakan pelayanan jasa bank syariah dalam pertukaran mata uang. Pertukaran antara valas dan rupiah dibolehkan apabila pertukaran ini ditujukan untuk spekulasi. Arti harfiah *sharf* adalah penambahan, penukaran, penghindaran, pemalingan, atau transaksi jual beli. Sharf dapat diartikan transaksi jual beli antara mata uang yang satu dengan mata uang lainnya. Misalnya antara US dollar dan rupiah, dan singapore dollar dengan malaysian ringgit.

Pada prinsipnya jual beli valuta asing sejalan dengan prinsip *sharf*. Jual beli mata uang yang tidak sejenis ini, penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama. Bank mengambil keuntungan dari jual beli valuta asing ini.

Transaksi *sharf* dapat dibenarkan jika sesuai dengan persyaratan antara lain:

- Nilai tukar antar mata uang yang akan diperjualbelikan telah dikuasai secara langsung oleh penjual dan pembeli. Penguasaan dimaksud ialah terkait dengan fisik maupun hukumnya.
- Bila pertukaran antara mata uang yang sejenis, maka jumlah dan nilainya harus sama.
- Dalam *sharf* tidak boleh ada tenggang waktu antara transaksi dan saat penyerahan uang, artinya pertukaran ini harus dilakukan secara tunai.
- Transaksi *sharf* tidak untuk spekulasi, akan tetapi transaksi terjadi karena kedua pihak saling membutuhkan untuk melakukan jual beli mata uang.

## 7. Ijarah

Ijarah merupakan kontrak antara bank syariah sebagai pihak yang menyewakan barang dan nasabah sebagai penyewa, dengan menentukan biaya sewa yang telah disepakati oleh pihak bank dengan pihak penyewa. Barang-barang yang dapat disewakan pada umumnya yaitu aset tetap, seperti gedung, mesin dan peralatan, kendaraan, dan aset tetap lainnya.<sup>76</sup>

Adapun jenis kegiatan jasa dalam ijarah antara lain penyewaan kotak simpanan (*safe deposit box*) dan jasa tata laksana administrasi dokumen (*custodian*). Kemudian bank mendapatkan sewa dari jasa tersebut.

### Soal Diskusi

1. Jelaskan pengertian jasa bank?
2. Sebutkan jenis-jenis pelayanan jasa bank?
3. Sebutkan jenis-jenis pelayanan jasa dalam bank syariah?

---

<sup>76</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013) hal. 112

## **BAB IX. SUMBER DAN ALOKASI DANA PERBANKAN SYARIAH**

### **Tujuan Intruksional:**

1. Menjelaskan tentang sumber-sumber dana bank syariah
2. Menjelaskan tentang penggunaan atau alokasi dana bank syariah
3. Menjelaskan tentang pembagian keuntungan (*profit distribution*)

### **A. Sumber Dana Bank Syariah**

#### **1. Dana yang bersumber dari bank itu sendiri**

Sumber dana bank syariah terdiri dari sebagai berikut:<sup>77</sup>

##### *a. Modal Inti*

Modal ini adalah modal sendiri yaitu dana yang berasal dari para pemegang saham, yakni pemilik bank. Pada umumnya modal inti terdiri dari:

##### **1) Modal disetor**

Modal yang disetor oleh para pemegang saham sumber utama dari modal perusahaan adalah saham. Setoran modal dari pemegang saham yaitu merupakan modal dari para pemegang saham lama atau pemegang saham yang baru. Dana tersebut merupakan dana yang disetor secara efektif oleh para pemegang saham pada waktu bank berdiri. Pada umumnya modal setoran pertama dari pemilik bank sebagian digunakan untuk sarana perkantoran, pengadaan peralatan kantor dan promosi untuk menarik minat masyarakat.

##### **2) Cadangan laba**

Cadangan laba, yaitu merupakan laba yang setiap tahun di cadangkan oleh bank dan sementara waktu belum digunakan. Cadangan laba yaitu sebagian dari laba bank yang disisihkan dalam bentuk cadangan modal dan cadangan lainnya yang akan dipergunakan untuk menutupi timbulnya resiko di kemudian hari. Cadangan ini dapat diperbesar apabila bagian untuk cadangan tersebut ditingkatkan atau bank mampu meningkatkan labanya.

---

<sup>77</sup> Sutan remi sjahdeni, *Perbankan syariah*, (Rawamangun: KENCANA, 2014), hal. 27

### 3) Laba ditahan

Laba merupakan milik pemegang saham, yang keputusan penggunaannya merupakan hak sepenuhnya pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Laba bank yang belum dibagi, merupakan laba tahun berjalan tapi belum dibagikan kepada para pemegang saham.

## 2. Dana yang berasal dari masyarakat

### a. *Kuasi Ekuitas (mudharabah account)*

Bank menghimpun dana berbagai hasil atas dasar prinsip mudharabah, yaitu akad kerja sama antara pemilik dana (*shahib al – maal*) dengan pengusaha (mudharib) bentuk melakukan suatu usaha bersama, dan pemilik dana tidak boleh mencampuri pengelolaan bisnis sehari – hari. Keuntungan yang diperoleh dibagi antara keduanya dengan perbandingan (nisbah) yang telah disepakati sebelumnya. Kerugian finansial menjadi beban pemilik dana sedangkan pengelola tidak memperoleh imbalan atas usaha yang dilakukan.

Berdasarkan prinsip ini, dalam kedudukannya sebagai mudharib, bank menyediakan jasa bagi para investor berupa :<sup>78</sup>

- 1) Rekening Investasi Umum
- 2) Rekening Investasi Khusus
- 3) Rekening Tabungan Mudharabah

### b. *Dana Titipan (wadiyah/ non remunerated deposit)*

Selain bank menerima dana investasi, juga menerima dana titipan. Dana titipan adalah dana pihak ketiga yang dititipkan pada bank, yang umumnya berupa giro atau tabungan. Pada umumnya motivasi utama orang menitipkan dana pada bank adalah untuk keamanan dana mereka dan memperoleh keleluasaan untuk menarik kembali dananya sewaktu – waktu.<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup> *Ibid*, hal. 55

<sup>79</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: kencana, 2011), hal.74

Menurut Zainul Arifin, dana titipan *wadiah* ini dikembangkan dalam bentuk rekening giro wadiah dan rekening tabungan wadiah.<sup>80</sup> Dengan penjelasann sebagai berikut :

- 1) Rekening Giro Wadiah
- 2) Rekening Tabungan Wadiah

Sesuai dengan akad – akad penyaluran di bank syariah, maka hasil penyaluran dana tersebut dapat memberikan pendapatam bank. Hal ini dikatakan sebagai sumber pendapatan – sumber pendapatan bank syariah. Dengan deikian, sumber pendapatan bank syariah dapat di peroleh dari :<sup>81</sup>

- 1) Bagi hasil atas kontrak mudharabah dan kontrak musyarakah
- 2) Keuntungan atas kontrak jual beli (*al bai'*)
- 3) Hasil sewa atas kontrak ijarah dan ijarah wa iqtina; dan
- 4) *fee* dan biaya administrasi atas jasa – jasa lainnya.

### **3. Dana yang bersumber dari lembaga lainnya**

Sumber dana yang ketiga ini merupakan tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam pencarian sumber dana pertama dan kedua di atas. Pencarian dari sumber dana ini relaitif labih mahal dan sifatnya hanya sementara waktu saja. Kemudian dana yang diperoleh dari sumber ini digunakan untuk membiayai atau membayar transaksi-transaksi tertentu. Perolehan dana dari sumber ini antara lain dapat diperoleh dari :

#### *a. Kredit likuiditas dari Bank Indonesia*

Merupakan kredit yang diberikan bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditasnya. Kredit likuiditas ini juga diberikan kepada pembiayaan sektor-sektor tertentu.

#### *b. Pinjaman antar bank (interbank call money)*

Pinjaman ini ditunjukan untuk memenuhi kebutuhan menutup kliring (karena kalah kliring) atau dapat juga untuk memenuhi kebutuhan pemenuhan saldo Giro Wajib Minimum (GMW) di Bank Indonesia. Jangka waktu pinjaman ini

---

<sup>80</sup> Zainul Arifin, *Perbankan Syariah*, hal. 56.

<sup>81</sup> *Ibid*, hal. 64.

umumnya relative sangat singkat (overnight call money) dengan menggunakan instrumen sertifikat deposito, promes, dan Surat Berharga Pasar Uang (SBPU).

c. *Repurchase Agreement atau disebut dengan “Rps atau “Repos”*

Adalah penjualan surat berharga sesuai dengan waktu yang diperjanjikan dengan harga yang ditetapkan di muka. Instrument yang digunakan Repos antara lain Wesel dan promes yang akan jatuh tempo. Repurchase Agreement merupakan salah satu alternative bank untuk memenuhi kebutuhan dananya. Biasanya Repos merupakan sumber dana untuk memenuhi kebutuhan likuiditas atau kebutuhan jangka pendek bank.

d. *Fasilitas diskonto*

Penyediaan dana jangka pendek oleh Bank Indonesia dengan cara pembelian promes yang diterbitkan oleh bank-bank atas dasar diskonto. Fasilitas diskonto merupakan upaya terakhir bagi bank dan merupakan bantuan Bank Sentral sebagai Lender of The Last Report.

e. *Pinjaman dari bank-bank luar negeri*

Pinjaman yang lazimnya berbentuk pinjaman jangka menengah-panjang, offshore Loan dan pinjaman ini sebelumnya harus mendapat persetujuan dari Bank Indonesia karena berkaitan dengan kebijakan moneter.

f. *Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)*

Pinjaman ini lazimnya berupa surat berharga yang dapat diperjualbelikan seperti sertifikat bank dan atau deposit on call dengan waktu pendek dan dapat diperpanjang kembali.

g. *Surat Berharga Pasar Uang (SBPU)*

Dalam hal ini pihak perbankan menerbitkan SBPU kemudian diperjualkan kepada pihak yang berminat, baik perusahaan keuangan maupun nonkeuangan.

h. *Obligasi (Bond) dan saham*

Obligasi adalah bukti utang dari etimen yang dijamin dengan agunan harta kekayaan milik etimen dan atau pihak ketiga dari etimen dan atau penanggung yang menanggung janji pembayaran bunga atau janji lainnya serta pelunasan pokok

pinjaman yang dilakukan pada tanggal jatuh tempo, sekurangnya tiga tahun sejak tanggal emisi. Saham adalah bukti pernyataan modal dalam pemilikan suatu perusahaan terbatas. Dengan penjualan saham tersebut, dana sendiri (yang berasal dari agio saham) akan menjadi lebih besar yang pada gilirannya akan meningkatkan kemampuan bank dalam menjalankan usahanya.

## **B. Alokasi Dana Bank Syariah**

Unsur-unsur yang terdapat dalam pembiayaan bank syariah :

### **1. Kepercayaan**

Bank syariah memberikan pembiayaan kepada mitra usaha sama artinya dengan bank memberikan kepercayaan kepada pihak penerima pembiayaan, bahwa pihak penerima pembiayaan akan dapat memenuhi kewajibannya.

### **2. Akad**

Akad merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara bank syariah dan pihak nasabah.

### **3. Risiko**

Risiko pembiayaan merupakan kemungkinan kerugian yang akan timbul karena dana yang disalurkan tidak dapat kembali.

### **4. Jangka Waktu**

Periode waktu yang diperlukan oleh nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh bank syariah.

### **5. Balas Jasa**

Sebagai balas jasa atas dana yang disalurkan oleh bank syariah, maka nasabah membayar sejumlah tertentu sesuai dengan akad yang telah disepakati.

Alokasi penggunaan dana bank syariah pada dasarnya dapat dibagi dalam dua bagian penting dari aktiva bank yaitu:<sup>82</sup>

### **1. Aktiva yang menghasilkan (*Earning Asset*)**

---

<sup>82</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).



Aktiva yang dapat menghasilkan atau *earning assets* adalah asset bank yang yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan. Asset ini disalurkan dalam bentuk investasi yang terdiri atas:<sup>83</sup>

- a. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*)

Perjanjian antara dua pihak, yaitu pihak pertama sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan pihak kedua sebagai pengelola dana (*mudharib*) untuk mengelola suatu kegiatan ekonomi dengan menyepakati nisbah bagi hasil atas keuntungan yang akan diperoleh, sedangkan kerugian yang timbul merupakan risiko pemilik dana sepanjang tidak terdapat bukti bahwa *mudharib* melakukan kecurangan atau tindakan tidak amanah.

- b. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan (*musyarakah*)

Perjanjian antara pihak-pihak untuk menyertakan modal dalam suatu kegiatan ekonomi dengan pembagian keuntungan dan kerugian sesuai nisbah yang disepakati.

- c. Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli (*murabahah*)

Akad jual beli antara dua belah pihak yang didalamnya, pembeli dan penjual menyepakati harga jual yang terdiri atas harga beli ditambah ongkos pembelian dan keuntungan bagi penjual. *Murabahah* dapat dilakukan secara tunai dan bisa juga secara bayar tangguh atau bayar dengan angsuran.

- d. Pembiayaan berdasarkan prinsip sewa (*ijarah*)

Akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu.

- e. Surat-surat berharga *syari'ah* dan investasi lainnya.

## 2. Aktiva yang tidak menghasilkan (*Non earning assets*)

Asset bank yang lain adalah asset yang tergolong tidak memberikan penghasilan atau disebut *non earning assets* terdiri dari :

- a. Aktiva dalam bentuk tunai

Cash assets terdiri dari uang tunai dalam vault, cadangan likuiditas (*primary reserve*) yang harus dipelihara pada bank sentral, giro pada bank dan item-item tunai lain yang masih dalam proses penagihan (*collections*). Dari

---

<sup>83</sup>Umam, Khaerul., *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2017)

cash assets ini bank tidak memperoleh penghasilan, dan walaupun ada sangat kecil dan tidak berarti. Namun demikian investasi pada cash assets adalah penting untuk mendukung fungsi simpanan pada bank, dan dalam beberapa hal juga diperlukan untuk memenuhi kebutuhan layanan dari bank koresponden yang berkaitan dengan pembiayaan investasi. Bank harus memelihara uang tunai dalam vault yang terdiri dari uang kertas dan uang logam. Bank harus dapat memenuhi kebutuhan para nasabah penyimpan dana yang ingin menarik dananya dalam bentuk tunai, meskipun bank juga harus membatasi jumlah investasi dalam bentuk uang tunai, karena bila terlalu banyak dapat mengurangi tingkat penghasilan bank. Bank juga harus memelihara cash assets sebagai cadangan (reserve) dalam bentuk rekening pada bank sentral.

Biasanya bank sentral menetapkan kewajiban ini berdasarkan jumlah dan tipe simpanan nasabah bank. Bank menggunakan cadangan ini untuk memproses cek yang ditarik melalui kliring.

Bank juga memelihara saldo dalam jumlah tertentu pada bank koresponden sebagai kompensasi atas servis yang diperoleh seperti cek kliring, layanan yang berkaitan dengan proses pembiayaan, investasi dan partisipasi dalam sindikasi pembiayaan. Saldo pada bank koresponden dapat juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan cadangan bagi bank yang tidak menjadi anggota lembaga kliring.

b. Pinjaman (qard)

Pinjaman merupakan salah satu kegiatan bank syari'ah dalam mewujudkan tanggung jawab sosialnya sesuai dengan ajaran islam. Untuk kegiatan ini bank tidak memperoleh penghasilan karena bank dilarang untuk meminta imbalan apapun dari para penerima qard.

c. Penanaman dana dalam aktiva tetap dan inventaris

Penanaman dana dalam bentuk ini juga tidak menghasilkan pendapatan bagi bank, tetapi merupakan kebutuhan bank untuk memfasilitasi pelaksanaan fungsi kegiatannya. Fasilitas itu terdiri dari bangunan, gedung, kendaraan dan peralatan lainnya yang dipakai oleh bank dalam rangka penyediaan layanan kepada nasabahnya.

### C. Pembagian Keuntungan (*Profit Distribution*)

Pendapatan – pendapatan yang dihasilkan dari kontrak pembiayaan, setelah dikurangi dengan biaya – biaya operasional, harus dibagi atau di distribusikan antara bank dengan para penyandang dana, yaitu nasabah investasi, para penabung, dan para pemegang saham sesuai dengan nisbah bagi hasil yang diperjanjikan. Dalam hal ini bank dapat menegosiasikan nisbah bagi hasil atas investasi mudharabah sesuai dengan tipe yang ada, baik sifatnya maupun jangka waktunya. Bank juga dapat menentukan nisbah bagi hasil yang sama atas semua tipe, tetapi menetapkan bobot (*weight*) yang berbeda – beda atas setiap tipe investasi yang dipilih oleh nasabah.<sup>84</sup> Berdasarkan nisbah bagi hasil antara bank dengan para nasabah tersebut, bank akan mengalokasikan penghasilannya dengan tahap – tahap sebagai berikut :<sup>85</sup>

1. Tahap pertama bank menerapkan jumlah relatif masing – masing dana simpanan yang berhak atas bagi hasil usaha bank menurut tipenya, dengan cara membagi setiap tipe dana – dana dengan seluruh jumlah dana – dana yang ada pada bank dikalikan 100<sup>^</sup>%
2. Tahap kedua bank menetapkan jumlah pendapatan bagi hasil bagi masing – masing tipe dengan cara mengalikan persentasi (jumlah relatif) dan masing – masing dana simpanan pada huruf “a” dengan jumlah pendapatan bank.
3. Tahap ketiga bank menetapkan porsi bagi hasil untuk masing – masing tipe dana simpanan sesuai dengan nisbah yang diperjanjikan.
4. Tahap keempat bank harus menghitung jumlah relatif biaya operasional terhadap volume dana, kemudian mendistribusikan beban tersebut sesuai dengan porsi dana dari masing – masing tipe simpanan.
5. Tahap kelima bank mendistribusikan bagi hasil untuk setiap pemegang rekening menurut tipe simpanannya sebanding dengan jumlah simpanannya.

Pada umumnya bank – bank syariah di Indonesia dalam perhitungan bagi hasilnya menggunakan sistem bobot pada setiap dana investasi, dengan mengalihkan presentasi bobot tersebut dengan saldo rata – rata. Semakin labil investasi tersebut semakin kecil bobot yang dikenakan, dan semakin stabil investasi maka semakin besar bobot yang

---

<sup>84</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011), hal. 329-330

dikenakan pada investasi tersebut. Hal ini diterapkan sebagai bentuk dari pengamanan risiko pada setiap dana investasi. Bobot akan mempengaruhi besarnya bagi hasil yang akan di distribusikan sehingga akan berdampak pada bagi hasil yang akan diterima oleh pemilik dana.

### **Soal Diskusi**

1. Sebutkan dan jelaskan sumber-sumber dana bank syariah?
2. Jelaskan alokasi dana bank syariah?
3. Jelaskan pembagian keuntungan (*profit distribution*) dalam bank syariah?

## **BAB IX. KAPITA SELEKTA : PENGEMBANGAN BANK SYARIAH DI INDONESIA**

### **Tujuan Intruksional:**

1. Menjelaskan tantangan perbankan syariah
2. Menjelaskan kebijakan pengembangan bank syariah di Indonesia
3. Menjelaskan *grand strategy* pengembangan pasar perbankan syariah

### **A. Tantangan Perbankan Syariah**

Perbankan syariah di Indonesia dalam perkembangannya, tentu tidak semudah seperti membalikkan telapak tangan, yang dengan mudahnya akan diterima seluruh khalayak masyarakat baik pengguna jasa perbankan secara khusus maupun kalangan masyarakat secara umum. Terutama dari segi historikal dan politik. Negara kita baru mulai mencoba menjadikan perkeonomian syariah khususnya perbankan syariah menjadi instrument perekonomian yang turut dan berpengaruh dalam kemajuan bangsa ini.

Khusus tentang Perbankan Syari'ah, Karnaen Perwataatmaja merumuskan tantangan internal atau kelemahan kita adalah :

1. Masih terdapat berbagai kontroversi terhadap keberadaan dan sistem operasional bank syariah.
2. Rendahnya pemahaman masyarakat
3. Masih terbatasnya jaringan pelayanan
4. Moral hazard
5. Tantangan Eksternal
  - a. Pihak-pihak yang tidak senang dengan berkembangnya ekonomi syari'ah bersatu untuk menghambat perkembangannya : menghambat UU, PP, sosialisasi dan implementasi di masyarakat
  - b. Ekonomi Islam dikait-kaitkan dengan fanatisme agama
  - c. Kompetisi teknologi, pelayanan dan perkembangan produk dari sistem keuangan konvensional (sekuler).

Menurut sumber lain, ada beberapa tantangan yang perlu mendapatkan perhatian umat Islam. Pertama, dampak globalisasi, misalnya pesaing dari LKS asing. Kedua, persaingan di bidang layanan (servis), termasuk di bidang teknologi informasi (TI). Ketiga,

dukungan setengah hati dari pemerintah. Keempat, masih terbatasnya SDM yang andal. Kelima, pemahaman masyarakat tentang LKS dan bunga bank haram. Masih ada masyarakat yang masih kurang peduli terhadap hal tersebut.

Pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka *dual-banking sistem* atau sistem perbankan ganda dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API), untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Secara bersama-sama, sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional.

Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

Dalam konteks pengelolaan perekonomian makro, meluasnya penggunaan berbagai produk dan instrumen keuangan syariah akan dapat merekatkan hubungan antara sektor keuangan dengan sektor riil serta menciptakan harmonisasi di antara kedua sektor tersebut. Semakin meluasnya penggunaan produk dan instrumen syariah disamping akan mendukung kegiatan keuangan dan bisnis masyarakat juga akan mengurangi transaksi-transaksi yang bersifat spekulatif, sehingga mendukung stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian kestabilan harga jangka menengah-panjang.

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam

lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan.

## **B. Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia**

Untuk memberikan pedoman bagi stakeholders perbankan syariah dan meletakkan posisi serta cara pandang Bank Indonesia dalam mengembangkan perbankan syariah di Indonesia, selanjutnya Bank Indonesia pada tahun 2002 telah menerbitkan “Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia”. Dalam penyusunannya, berbagai aspek telah dipertimbangkan secara komprehensif, antara lain kondisi aktual industri perbankan syariah nasional beserta perangkat-perangkat terkait, trend perkembangan industri perbankan syariah di dunia internasional dan perkembangan sistem keuangan syariah nasional yang mulai mewujud, serta tak terlepas dari kerangka sistem keuangan yang bersifat lebih makro seperti Arsitektur Perbankan Indonesia (API) dan Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia (ASKI) maupun international best practices yang dirumuskan lembaga-lembaga keuangan syariah internasional, seperti IFSB (Islamic Financial Services Board), AAOIFI dan IIFM.

Pengembangan perbankan syariah diarahkan untuk memberikan kemaslahatan terbesar bagi masyarakat dan berkontribusi secara optimal bagi perekonomian nasional. Oleh karena itu, maka arah pengembangan perbankan syariah nasional selalu mengacu kepada rencana-rencana strategis lainnya, seperti Arsitektur Perbankan Indonesia (API), Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia (ASKI), serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Dengan demikian upaya pengembangan perbankan syariah merupakan bagian dan kegiatan yang mendukung pencapaian rencana strategis dalam skala yang lebih besar pada tingkat nasional.

“Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia” memuat visi, misi dan sasaran pengembangan perbankan syariah serta sekumpulan inisiatif strategis dengan prioritas yang jelas untuk menjawab tantangan utama dan mencapai sasaran dalam kurun waktu 10 tahun ke depan, yaitu pencapaian pangsa pasar perbankan syariah yang signifikan melalui pendalaman peran perbankan syariah dalam aktivitas keuangan nasional,

regional dan internasional, dalam kondisi mulai terbentuknya integrasi dgn sektor keuangan syariah lainnya.<sup>86</sup>

Dalam jangka pendek, perbankan syariah nasional lebih diarahkan pada pelayanan pasar domestik yang potensinya masih sangat besar. Dengan kata lain, perbankan Syariah nasional harus sanggup untuk menjadi pemain domestik akan tetapi memiliki kualitas layanan dan kinerja yang bertaraf internasional.

Pada akhirnya, sistem perbankan syariah yang ingin diwujudkan oleh Bank Indonesia adalah perbankan syariah yang modern, yang bersifat universal, terbuka bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Sebuah sistem perbankan yang menghadirkan bentuk-bentuk aplikatif dari konsep ekonomi syariah yang dirumuskan secara bijaksana, dalam konteks kekinian permasalahan yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia, dan dengan tetap memperhatikan kondisi sosio-kultural di dalam mana bangsa ini menuliskan perjalanan sejarahnya. Hanya dengan cara demikian, maka upaya pengembangan sistem perbankan syariah akan senantiasa dilihat dan diterima oleh segenap masyarakat Indonesia sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan negeri.

### **C. *Grand Strategy* Pengembangan Pasar Perbankan Syariah**

Sebagai langkah konkrit upaya pengembangan perbankan syariah di Indonesia, maka Bank Indonesia telah merumuskan sebuah *Grand Strategy* Pengembangan Pasar Perbankan Syariah, sebagai strategi komprehensif pengembangan pasar yg meliputi aspek-aspek strategis, yaitu: Penetapan visi 2010 sebagai industri perbankan syariah terkemuka di ASEAN, pembentukan citra baru perbankan syariah nasional yang bersifat inklusif dan universal, pemetaan pasar secara lebih akurat, pengembangan produk yang lebih beragam, peningkatan layanan, serta strategi komunikasi baru yang memposisikan perbankan syariah lebih dari sekedar bank.

Selanjutnya berbagai program konkrit telah dan akan dilakukan sebagai tahap implementasi dari *grand strategy* pengembangan pasar keuangan perbankan syariah, antara lain adalah sebagai berikut:<sup>87</sup>

1. Menerapkan visi baru pengembangan perbankan syariah pada fase I tahun 2008 membangun pemahaman perbankan syariah sebagai *Beyond Banking*, dengan

---

<sup>86</sup> Bank Indonesia. *Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2002-2011*. Jakarta : Bank Indonesia, 2002.

<sup>87</sup> Bank Indonesia, *Kebijakan Akselerasi Pengembangan Perbankan Syariah 2007-2008*, Jakarta : Direktorat Perbankan Syariah BI.



pencapaian target asset sebesar Rp.50 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 40%, fase II tahun 2009 menjadikan perbankan syariah Indonesia sebagai perbankan syariah paling atraktif di ASEAN, dengan pencapaian target asset sebesar Rp.87 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 75%. Fase III tahun 2010 menjadikan perbankan syariah Indonesia sebagai perbankan syariah terkemuka di ASEAN, dengan pencapaian target asset sebesar Rp.124 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 81%.

2. Program pencitraan baru perbankan syariah yang meliputi aspek positioning, differentiation, dan branding. Positioning baru bank syariah sebagai perbankan yang saling menguntungkan kedua belah pihak, aspek diferensiasi dengan keunggulan kompetitif dengan produk dan skema yang beragam, transparans, kompeten dalam keuangan dan beretika, teknologi informasi yang selalu up-date dan *user friendly*, serta adanya ahli investasi keuangan syariah yang memadai. Sedangkan pada aspek branding adalah “bank syariah lebih dari sekedar bank atau beyond banking”.
3. Program pemetaan baru secara lebih akurat terhadap potensi pasar perbankan syariah yang secara umum mengarahkan pelayanan jasa bank syariah sebagai layanan universal atau bank bagi semua lapisan masyarakat dan semua segmen sesuai dengan strategi masing-masing bank syariah.
4. Program pengembangan produk yang diarahkan kepada variasi produk yang beragam yang didukung oleh keunikan value yang ditawarkan (saling menguntungkan) dan dukungan jaringan kantor yang luas dan penggunaan standar nama produk yang mudah dipahami.
5. Program peningkatan kualitas layanan yang didukung oleh SDM yang kompeten dan penyediaan teknologi informasi yang mampu memenuhi kebutuhan dan kepuasan nasabah serta mampu mengkomunikasikan produk dan jasa bank syariah kepada nasabah secara benar dan jelas, dengan tetap memenuhi prinsip syariah; dan
6. Program sosialisasi dan edukasi masyarakat secara lebih luas dan efisien melalui berbagai sarana komunikasi langsung, maupun tidak langsung (media cetak, elektronik, online/web-site), yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang kemanfaatan produk serta jasa perbankan syariah yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

**Soal Diskusi**

1. Jelaskan tantangan yang dihadapi bank syariah?
2. Jelaskan kebijakan pengembangan perbankan syariah di Indonesia?
3. Jelaskan tahap implementasi *grand strategy* pengembangan pasar keuangan perbankan syariah?

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah; dari Teori ke Praktek*, Jakarta, Gema Insani Press, 2001.
- Arifin, Zainul. *Memahami Bank Syariah*. Bandung, Alvabet, 2000.
- \_\_\_\_\_. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Bandung. Alvabet.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2015.
- Danupranata, Gita. *Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah*. Jakarta, Salemba Empat, 2013.
- Dewi, Gemala. *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*. Jakarta, Kencana Prenada Group, 2006.
- El-Gamal, M.A. *Islamic Finance: Law, Economic and Practice*, (Cambridge:Cambridge University Press,2006
- Gozali, Djoni s. *Hukum Perbankan*, Jakarta: sinar grapika, 2010.
- Hay, Marhaenis Abdul. *Hukum Perbankan*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1997
- Hosen, M. Nadratatzaman, dkk. *Bankku Syariah*. Jakarta, pkes Publishing, versi e-book, Agustus, 2008.
- \_\_\_\_\_, *Perbankan Syariah*, Jakarta, pkes Publishing, versi e-book, Agustus, 2008.
- Indonesia, Bank. *Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2002-2011*. Jakarta : Bank Indonesia, 2002.
- \_\_\_\_\_. *Kebijakan Akselerasi Pengembangan Perbankan Syariah 2007-2008*, Jakarta : Direktorat Perbankan Syariah BI.
- \_\_\_\_\_. *Kodifikasi Produk Bank Syariah*. Jakarta : Direktorat Perbankan Syariah BI, 2008.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta : Kencana-Prenada Media Group, 2011
- Karim, Adiwarman A. *Bank Islam; analisis fiqih dan keuangan*. Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006.
- \_\_\_\_\_. *Ekonomi Makro Islami*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007.

- Kara, Muslimin H. *Bank Syariah di Indonesia: Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia terhadap Perbankan Syariah*, Yogyakarta, UII Press, 2005.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, edisi kedua, 2007.
- Machmud, Amir dan Rukmana. *Bank Syariah; Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*. Jakarta, Erlangga, 2010.
- Muhammad. *Bank Syariah; Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia*. Yogyakarta, Graha Ilmu, 2005.
- \_\_\_\_\_. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- Purnawati, Gusti Ayu, dkk, *Akuntansi Perbankan Teori dan Soal Latihan*. Yogyakarta: GRAHA ILMU, 2014.
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah. *Bank Islam*. Bandung. Penerbit Pustaka, 2002.
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta, Prenada, 2010.
- Suharno, *Analisa Kredit*, (Jakarta : Djambatan, 2003
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, Jakarta, Kencana-Prenadamedia Group, 2014.
- Suyatno, Thomas & dkk. *Dasar-Dasar Perkreditan Edisi Keempat*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Sumitro, Warkum. *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*. Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004.
- Umam, Khotibul. *Perbankan Syariah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016
- Usman, Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Islam Di Indonesia*, Bandung. Citra Aditya Bakti, 2002.
- UU No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Wirdyaningsih, dkk., *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta, Prenada, 2005.

## DAFTAR ISTILAH

**Bank Syariah**, Mencakup bank umum syariah, BPR Syariah dan Unit Usaha Syariah dari bank umum konvensional

**BPRS**, Bank Perkreditan Rakyat yang beroperasi berdasarkan prinsip Syariah

**Mudharabah**, Akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola

**Mudarib**, Dalam kontrak *mudharabah*, salah satu orang atau pihak yang bertindak sebagai pengusaha

**Murabahah**, Jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati

**Musyarakah**, Akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan

**Riba**, Secara harfiah berarti penambahan atas harta pokok pinjaman karena unsur waktu. Dalam dunia perbankan, hal tersebut dikenal dengan bunga.

**Shahibul maal**, Dalam kontrak *mudharabah*, seseorang atau pihak yang menginvestasikan modalnya

**Takaful**, Dukungan yang saling menguntungkan yang menjadi dasar untuk konsep asuransi syariah atau solidaritas sesama.

**Unit Usaha Syariah**, Unit kerja di kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah dan atau unit syariah.

## DAFTAR SINGKATAN

ATM	Anjungan Tunai Mandiri
BAMUI	Badan Arbitrase Muamalat Indonesia
BAPEPAM	Badan Pengawas Pasar Modal
BAZIS	Badan Amil Zakat Infaq Shadaqah
BPRS	Bank Perkreditan Rakyat Syariah
BUK	Bank Umum Konvensional
BUS	Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah
CAR	Capital Adequacy Ratio (Rasio Kebutuhan Penyediaan Modal minimum)
DPK	Dana Pihak Ketiga
DPS	Dewan Pengawas Syariah
DSN	Dewan Syariah Nasional
FDR	Financing to Deposit Ratio (analog dengan LDR pada bank konvensional)
FKPPS	Forum Komunikasi Pengembangan Perbankan Syariah
GCG	Good Corporate Governance
IAI	Ikatan Akuntan Indonesia
IFSB	Islamic Financial Services Board
IIFM	International Islamic Financial Market
IMA	Investasi <i>Mudharabah</i> Antar-bank berdasarkan Syariah
IT	Information Technology (Teknologi Informasi)
KCS	Kantor Cabang Syariah
KCK	Kantor Cabang Konvensional
KCPS	Kantor Cabang Pembantu Syariah
KK	Kantor Kas
LDR	Loan to Deposit Ratio (Rasio Pinjaman yang diberikan terhadap DPK)
MES	Masyarakat Ekonomi Syariah

NPL	Non Performing Loan (Kredit bermasalah)
OJK	Otoritas Jasa Keuangan
PLS	Profit and Loss Sharing (Bagi Hasil)
PUAS	Pasar Uang Antar-bank berdasarkan prinsip Syariah
UKM	Usaha Kecil Menengah
US	Unit Syariah
UU	Undang-Undang
UUS	Unit Usaha Syariah